

**DISERTASI**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA  
MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**RUDY BADRUDIN**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2012**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA  
MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DISERTASI**  
**Untuk Memperoleh Gelar Doktor**  
**Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi**  
**Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**  
**Telah Dipertahankan Dihadapan**  
**Panitia Ujian Doktor Terbuka**  
**Pada Hari: Senin**  
**Tanggal: 16 Januari 2012**  
**Pukul: 10.00 – 12.00**

**RUDY BADRUDIN**  
**NIM 090970305 / D**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISERTASI INI TELAH DISETUJUI  
Pada Tanggal 26 Januari 2012**

**Oleh:  
Promotor**

**Prof. Dr. H. Effendie, SE.  
NIP 130 531 816**

**Ko Promotor:**

**Dr. Soekarnoto, SE.  
NIP 130 524 077**

## PANITIA PENGUJI DISERTASI

**Telah Diuji Pada Ujian Tertutup**

**Pada Tanggal 19 Desember 2011**

---

**Ketua : Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE.**

**Anggota :**

- 1. Prof. Dr. H. Effendie, SE.**
- 2. Dr. Soekarnoto, SE.**
- 3. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec.**
- 4. Prof. Dr. H. Murdijanto Purbangkoro, MP., SE., SU.**
- 5. Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S.**
- 6. Dr. Hj. Siti Umayah Masjkuri, SE.**
- 7. Dr. Rudi Purwono, SE., MSE.**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 2439/H3/KR/2011  
Tanggal: 21 Desember 2011**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas berkah, karunia, dan rahmatNYA penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah”**. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan, dan dukungan, serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kerendahan hati disampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Prof. Dr. H. Effendie, SE. sebagai Guru Besar Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Airlangga selaku Promotor, Penasehat Akademik, Ketua Tim Penguji dan Penilai usulan penelitian dan kelayakan naskah disertasi, yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sejak mengikuti proses perkuliahan, penelitian, hingga penyelesaian penyusunan disertasi ini. Keluasan cakrawala keilmuan, ketelitian, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan Prof. Dr. H. Effendie, SE. telah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis untuk senantiasa mengembangkan ilmu yang telah diproses dan untuk bersikap rendah hati tanpa kehilangan jatidiri.

Dr. Soekarnoto, SE. sebagai Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Airlangga selaku Ko-Promotor, Anggota Tim Penguji dan Penilai usulan penelitian dan kelayakan naskah disertasi, yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sejak mengikuti proses perkuliahan, penelitian, hingga penyelesaian penyusunan disertasi ini. Ketelitian, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan Dr. Soekarnoto, SE. telah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan benar dan baik.

Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, Ir., M.Eng. sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, M.Sc., Akuntan sebagai mantan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan telah menyediakan fasilitas belajar di Universitas Airlangga sehingga memperlancar proses pembelajaran hingga penulisan disertasi ini.

Prof. Dr. H. Fasich, Apt. sebagai Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.BTKV sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan telah menyediakan fasilitas belajar di Universitas Airlangga sehingga memperlancar proses pembelajaran, pembimbingan, dan penulisan disertasi ini.

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr.,Sp.P(K). sebagai mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr.

Suhariningsih, Ir. sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas kepada penulis untuk mengikuti seluruh proses pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Dr. Rudi Purwono, SE., MSE. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan Prof. Dr. H. Effendie, SE. sebagai mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dengan kewenangannya dengan penuh kesabaran telah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis untuk mengikuti seluruh proses pendidikan hingga penulisan disertasi ini pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Effendie, SE., Dr. Soekarnoto, SE., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec., Prof. Dr. H. Murdijanto Purbangkoro, MP., SE., SU., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si., Dr. Hj. Siti Umayah Masjkuri, SE., dan Dr. Rudi Purwono, SE., MSE. sebagai Dosen Penguji Kualifikasi dan Penilai usulan penelitian dan kelayakan naskah disertasi sehingga sanggahan, kritik, dan saran Prof. Dr. H. Effendie, SE., Dr. Soekarnoto, SE., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec., Prof. Dr. H. Murdijanto Purbangkoro, MP., SE., SU., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si., Dr. Hj. Siti Umayah Masjkuri, SE., dan Dr. Rudi Purwono, SE., MSE. menjadikan naskah disertasi ini menjadi benar dan baik.

Prof. Dr. H. Effendie, SE., Prof. Dr. IBM. Santika, SE. (alm), Prof. Dr. H. Munawar Ismail, DEA., Prof. Budiman Christiananta, Drs. Ec., MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., MS., Dr. H. Tjuk Kasturi Sukiadi, SE., Dr. Soekarnoto, SE., Dr. Fajar Siahaan, SE., MM., Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., M.Si., Dr. Hj. Siti Umayah Masjkuri, SE., dan Dr. Anis Eliyana, SE, M.Si. sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik kepada penulis tentang Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro, Ekonomi Moneter dan Internasional, Sejarah Pemikiran dan Perbandingan Sistem Ekonomi, Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, Ekonomi Publik, Kependudukan, Pembangunan Ekonomi, dan Lingkungan, Ekonometri/*Structural Equation Modeling*, Manajemen Umum, Logika dan Metode Sains, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Ilmu Ekonomi yang menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan studi ini. Beliau semua telah mengajar penulis dengan cara yang berbeda dalam mengajar, kedalaman materi, serta metode evaluasi sehingga telah mengubah wawasan penulis dalam mempelajari semua mata kuliah tersebut jauh lebih mendalam.

Prof. Dr. Djoko Mursinto, Dr. Soekarnoto, SE., dan Dr. Hj. Siti Umayah Masjkuri, SE. sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang telah banyak memberikan masukan materi penulisan dan pencerahan cakrawala ilmu dalam disertasi ini. Materi Bapak/Ibu dalam MKPD sungguh-sungguh telah memberi warna pada studi teoritik dan studi empirik disertasi yang penulis susun.

Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., MS. sebagai Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Airlangga selaku Pembimbing Metodologi Penelitian, Anggota Tim Penguji dan Penilai usulan penelitian, dan

kelayakan naskah disertasi yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam melakukan penelitian hingga penyelesaian penyusunan disertasi ini. Ketelitian, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., MS. telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan benar dan baik.

Prof. Dr. H. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan mantan Pembantu Rektor II Universitas Gadjah Mada sebagai Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec. sebagai Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Airlangga, dan Prof. Dr. H. M. Wahyuddin, SE., MS. sebagai Pendidik pada Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk mengikuti proses pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Rekomendasi Prof. Dr. H. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan, Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs., Ec., M.Ec., dan Prof. Dr. H. M. Wahyuddin, SE., MS. merupakan modal awal yang sangat bernilai bagi penulis untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh seluruh proses pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan sebagai Ketua Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) Yogyakarta dan Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta yang telah memberikan ijin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti seluruh proses pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, serta Ibnu Subiyanto, Drs., Akuntan sebagai Bupati Sleman 2000-2005 dan 2006-2009 yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi staf ahli Bappeda Kabupaten Sleman 2002-2005 dan 2006-2007. Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan adalah “bapak” dan Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan adalah “kakak” tempat penulis untuk berbagi rasa suka dan duka selama mengikuti seluruh proses pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Ibnu Subiyanto, Drs., Akuntan adalah “bapak” yang telah mengenalkan dan memahami bagaimana konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam praktek pemerintahan daerah kepada penulis sehingga penulis tertarik untuk mempelajarinya. Tak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akuntan sebagai Guru Besar Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi segala sesuatu tentang Desentralisasi Fiskal di Indonesia ketika penulis memulai kuliah pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga di awal September 2009.

Prof. Dr. H. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan, Prof. Dr. Arif Suadi, MBA., dan Al. Haryono Jusup, Drs., MBA., Akuntan sebagai Badan Pelaksana Harian STIE YKPN Yogyakarta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk mengembangkan diri menjadi dosen yang benar dan baik. Mulyadi, Drs., M.Sc., Akuntan sebagai mantan Ketua STIE YKPN Yogyakarta yang selalu mendidik dan mengajarkan kepada penulis agar menjadi dosen mekar penuh dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

Pimpinan dan karyawan Badan Pusat Statistik Pusat Jalan Dr. Sutomo Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Jalan Menoreh Tengah Sampangan Semarang, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Arteri *Ring Road* Selatan Yogyakarta yang telah memberikan data dan akses kepada penulis sehingga diperoleh data sebagai bahan penyusunan disertasi ini. Tiada berarti disertasi ini tanpa data dan akses dari Bapak/Ibu sekalian.

Teman-teman seperjuangan dalam suka dan duka selama mengikuti proses pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, “kakak kelas” Dr. Wasiaturrehman, SE., M.Si., Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si., Dr. Nur Feriyanto, Drs., M.Si., Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, SE., MM. dan “angkatan 2009/2010” Jemmy Wijaya, SE., MM., Baling Kustriyono, Ir., MM., Hj. Hamsinah, Ir., M.Si., Aslina Asnawi, S.Pt., MS., Ngadiman, Drs., M.Si., dan lain-lain yang belum saya sebutkan. Bersama-sama teman-teman seperjuangan, penulis menikmati semua suka dan duka dalam mengikuti seluruh proses pendidikan hingga penulisan disertasi ini pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Bersama-sama teman-teman seperjuangan, “kawah Candradimuka” itu menjadi media untuk saling berdebat, saling menghormati, dan tempat *sharing knowledge* yang sungguh luar biasa.

Teman-teman di STIE YKPN Yogyakarta, khususnya Dr. Baldric Siregar, MBA., Akuntan yang telah mendorong penulis untuk segera menempuh Program Doktor Ilmu Ekonomi, Nurofik, Drs., M.Si., Akuntan yang telah melatih penulis mengolah dan membaca data hasil program *Partial Least Square* (PLS) dengan sangat sabar dan jelas, Dr. Wisnu Prajoga, SE., MBA. yang telah melatih penulis mengolah dan membaca data hasil program *Analysis of Moment Structure* (AMOS) dengan sangat sabar dan jelas, serta Dr. Eko Widodo Lo, Drs., SE., M.Si., Akuntan, Bambang Suropto, Drs. M.Si., Akuntan, Efraim Ferdinan Giri, Drs., M.Si., Akuntan, Theresia Trisanti, Dra., MBA., Haryono Subiyakto, Drs., SE., M.Si., Rusmawan Wahyu Anggoro, Drs., MSA., Akuntan, dan Miswanto, Drs., M.Si. yang telah banyak melakukan diskusi dengan penulis untuk materi penulisan disertasi, metode penelitian, dan alat analisis. Kalian memang dosen hebat.

Bapak Didik, Ibu Yayuk, keluarga Bapak/Ibu Ananta di Karangmenjangan V Nomor 5, keluarga Jemmy Wijaya, SE., MM., dan keluarga Nurul Qomari, Drs. Ec., M.Si. yang telah banyak direpoti penulis sejak kali pertama menginjakkan kakinya di Surabaya untuk mengikuti proses pendidikan hingga penulisan disertasi ini pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Bapak/Ibu dan keluarga sungguh mulia.

Bapak Waljuakir, Wartiman, Darman, Pariman, dan Yusuf sebagai karyawan akademik dan rumah tangga STIE YKPN Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam kesehariannya. Bundel berbagai berkas penulisan disertasi yang telah Bapak Waljuakir dan Wartiman susun sangat membantu penulis dalam melakukan arsip. Racikan kopi, teh, nasigoreng, dan cemilan yang telah Bapak Darman, Pariman, dan Yusuf sajikan kepada penulis telah membuat penulis selalu sehat dan bugar. Kalian memang administrator dan *chef* yang sesungguhnya.



Bapak/Ibu Guru SD Muhammadiyah Ngupasan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Yogyakarta, Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan Bapak/Ibu Dosen di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bekal hidup yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tertinggi di Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ayahanda tercinta H. Ilyas Achmad (alm) dan Ibunda terkasih Hj. Sri Wiyati Ilyas yang dengan ikhlas tanpa pamrih telah mendidik, membesarkan, serta selalu senantiasa mendoakan tiada henti kepada penulis. Secara hakikat, kedua Beliau adalah “guru” yang sebenarnya pada “sekolah kehidupan”. Kepada Ayahanda mertua tercinta H. Toto Haryono (alm) dan Ibunda mertua terkasih Hj. Siti Romlah, yang dengan ikhlas tanpa pamrih telah mendidik dan selalu senantiasa mendoakan tiada henti kepada penulis. Istriku tercinta dan terkasih Hj. Mufidhatul Khasanah, Dra., M.Si., dan ketiga putriku tersayang Myria Rafiz Khasandy, SE., Akuntan, Elleriz Aisha Khasandy, dan Ragizel Putri Khasandy yang dengan penuh untaian doa-doa terindah, kesetiaan, pengertian, kesabaran, pengorbanan, dorongan, dan semangat kepada suami dan ayahanda selama mengikuti Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga hingga selesai penulisan disertasi ini. Semua yang telah engkau lakukan telah “Bikin Hidup Papa Lebih Hidup”. Papa persembahkan karya ini untuk menjadi inspirasi ananda bertiga, penerus Batik Khasandy.

Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya di sini, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kerendahan hati disampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga ALLAH SWT. menerima segala amal kebajikan dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih di dunia dan akhirat nanti. *Aamiin Yaarobbal Alamin.*

## RINGKASAN

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan desentralisasi fiskal adalah membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah; memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah dan nasional; meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah; dan memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Hampir 11 tahun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam era otonomi daerah, tetapi dampak desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat relatif belum optimal.

Studi ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2004 s.d 2008 sebagai data sekunder yang bersumber dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah karena dari tahun dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan tahun 2008, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah sehingga akan terlihat originalitas atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Studi teoritis berlandaskan pada Teori Ekonomi Publik, Teori Desentralisasi Fiskal, Teori Pengeluaran Pemerintah, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dan Teori Kesejahteraan Masyarakat, sedang studi empiris menggunakan beberapa studi terdahulu. Model analisis *Partial Least Square* (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedang model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). PLS digunakan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang telah diolah diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: Pertama, desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti; Kedua, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti; Ketiga, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti; Keempat, belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat, yaitu belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti; Kelima, belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima, yaitu belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti; dan Keenam, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam, yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti.

Berdasarkan kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis, diketahui bahwa hipotesis yang tidak terbukti signifikan, semuanya berkaitan dengan variabel belanja modal sebagai variabel intervening. Ini disebabkan karena variabel belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik tertentu. Oleh karena itu, pemerintahan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam membelanjakan dana termasuk belanja modal harus sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota dan berdasarkan aspek non ekonomis yang menyangkut hal-hal di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral.

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan APBD menjadi sangat penting bagi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola APBD hendaknya mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD/pelaksanaan APBD, maupun pertanggungjawaban APBD.

## *SUMMARY*

### **The Influence of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Economic Growth, and Social Welfare of Regency/City in Central Java Province**

Regional autonomy and fiscal decentralization are two sides in a currency that can not be separated and give each other meaning. Through the regional autonomy and fiscal decentralization, local governments have an authority to explore the revenue and role allocation independently by setting priorities on development. The goal of fiscal decentralization are to improve the allocation of national and local government operational efficiency, meet local aspirations; improve the overall fiscal structure, and the mobilization of regional and national income; improve accountability, transparency, and develop the constituent participation in decision making at the local level; reduce the fiscal gap on intergovernmental area, ensuring the implementation of basic public services throughout Indonesia, and promote government efficiency targets, and improve social welfare of the people of Indonesia. Nearly 11 years of regencies/cities in Central Java Province were in the era of regional autonomy, but the impact of fiscal decentralization on capital expenditure, economic growth, and social welfare relative is not optimal yet.

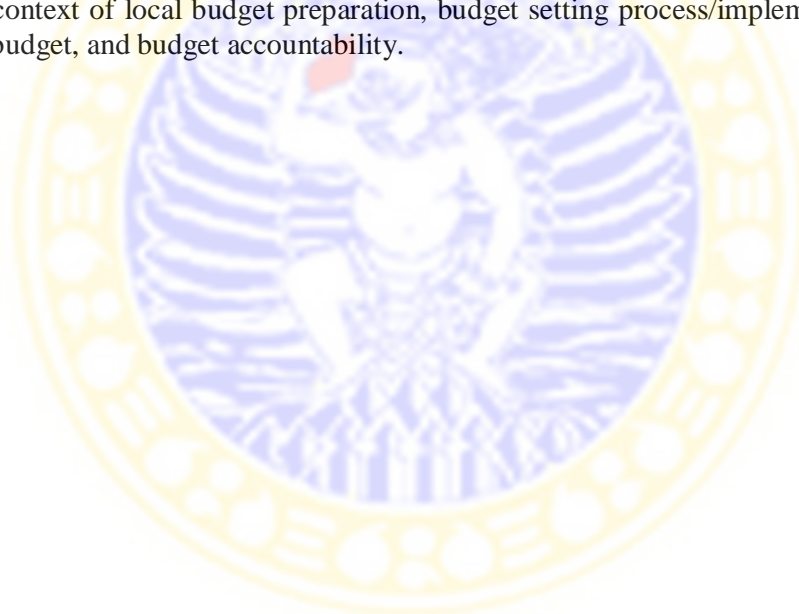
This study has analyzed the influence of fiscal decentralization toward capital expenditure, economic growth, and social welfare regency/city in Central Java Province by using panel data (polled data) in 2004 till 2008 as a secondary data sourced from 35 regencies/cities in Central Java Province. Those districts in Central Java Province were chosen because of the years of commencement of the implementation of regional autonomy was through 2008, Central Java Province is a province that does not have regional divisions so its originality or authenticity of the territorial integrity of the regency/city autonomy has been seen into force since January 1, 2001. The years of 2004 to 2008 were chosen as the research period, because the period was the first 5 years implementation of regional autonomy in Indonesia after 2001. The Theoretical studies are based on Public Economic Theory, Theory of Fiscal Decentralization, Public Expenditure Theory, Theory of Economic Growth and Development, and the Theory of Social Welfare, are empirical studies using several previous studies. The analysis model of Partial Least Square (PLS) used in this study follows the pattern of structural equation models Equation Structural Modeling (SEM)-based variant that can simultaneously test the measurement model as well as testing the structural model. Measurement model used to test the validity and reliability, while the structural model used to test causality (hypothesis testing with the model predictions). PLS is used to predict a model for the development of theory.

Based on the research results and discussion of the processed data, some findings have been obtained as follows: 1) fiscal decentralization had no significant effect on capital expenditure of regency/city in Central Java Province; 2) fiscal decentralization had significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 3) fiscal decentralization had significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province; 4) capital expenditure had no significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 5) capital expenditure had no significant effect on social

welfare of regency/city in Central Java Province; and 6) economic growth had significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province.

Based on the summary related to the hypothesis, noted that the hypothesis which haven't significantly proved, were all related to the capital expenditure variable as an intervening variable. Those were caused by the capital expenditure variable on regency/city budgets (APBD) in Central Java Province have certain characteristic. Therefore, the regency/city government on Central Java Province should match the needs and priorities each regency/city on spending the funds, including the capital expenditure and based on non-economic aspects related to things beyond the economic rationality criteria, even the moral dimension aspect.

The study results shows that fiscal management has become very important for the regency/city in the Central Java Province. Since the fiscal decentralization in Indonesia was carried out on the expenditure side of fiscal decentralization that is funded primarily through transfers to the regions, the regency/city in Central Java Province should be able to meet the basic principle or principles of transparency of financial management, efficient, effective, accountable, and participatory in managing the budget (APBD). These five principles must be reflected in every area of financial management policy implementation, both in the context of local budget preparation, budget setting process/implementation of the budget, and budget accountability.



**ABSTRACT****The Influence of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Economic Growth, and Social Welfare of Regency/City in Central Java Province**

This research analyzed the influence of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Economic Growth, and Social Welfare of Regency/City in Central Java Province based on the data of year 2004 to 2008. Those districts in Central Java Province were chosen because of the years of commencement of the implementation of regional autonomy was through 2008, Central Java Province is a province that does not have regional divisions so its originality or authenticity of the territorial integrity of the regency/city autonomy has been seen into force since January 1, 2001. The years of 2004 to 2008 were chosen as the research period, because the period was the first 5 years implementation of regional autonomy in Indonesia after 2001. The method used to analyze the hypotheses was the Partial Least Square (PLS) analysis ( $\alpha = 5\%$ ). The results showed that 1) fiscal decentralization had no significant effect on capital expenditure of regency/city in Central Java Province; 2) fiscal decentralization had significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 3) fiscal decentralization had significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province; 4) capital expenditure had no significant effect on economic growth of regency/city in Central Java Province; 5) capital expenditure had no significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province; and 6) economic growth had significant effect on social welfare of regency/city in Central Java Province.

**Keywords:** fiscal decentralization, capital expenditure, economic growth, social welfare

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah di Negara Sedang Berkembang Mulai Tahun 2001.....	2
Tabel 1.2. Kemampuan Keuangan Daerah dan Pola Hubungan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Mulai Tahun 2001 .....	19
Tabel 2.1. Kategori Negara Menurut Jenis Hubungan Fiskal Antarpemerintahan, Tahun 1991.....	41
Tabel 2.2. Ringkasan Perbedaan Pengertian Ekonomi Pertumbuhan, Ekonomi Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Ekonomi, Tahun 1994 .....	75
Tabel 2.3. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM Indonesia, Tahun 2009.....	96
Tabel 4.1. Rincian Pemekaran Wilayah untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi di Indonesia sampai dengan Tahun 2008 .....	123
Tabel 5.1. PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2004 s.d 2008 (Jutaan Rupiah)..	145
Tabel 5.2. Distribusi PDRB per Sektor di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (%) .....	147
Tabel 5.3. Penggolongan Daerah Menurut Sektor Dominan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2007 .....	148
Tabel 5.4. Perbandingan PDRB Menurut Harga Konstan, PDRB Per Kapita, serta Laju Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (Jutaan Rupiah dan %) .....	149
Tabel 5.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (%) .....	150
Tabel 5.6. Laju Pertumbuhan PDRB Jenis Penggunaan di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (%) .....	151
Tabel 5.7. Karakteristik Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Tipologi Klassen, Tahun 2004 s.d 2008 .....	155
Tabel 5.8. Proksi Desentralisasi Fiskal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 .....	156
Tabel 5.9. Total Belanja Modal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi	

	Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (jutaan Rupiah) .....	161
Tabel 5.10.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 (%) .....	168
Tabel 5.11.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 .....	171
Tabel 5.12.	Indeks Kriminalitas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 .....	175
Tabel 5.13.	Hasil Pengujian Asumsi Linieritas .....	181
Tabel 5.14.	<i>Outer Factor</i> Variabel Kesejahteraan Masyarakat .....	183
Tabel 5.15.	Hasil <i>Outer Weights</i> Variabel .....	185
Tabel 5.16.	Hasil Pengujian Hipotesis .....	186
Tabel 6.1.	Proksi Desentralisasi Fiskal pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1998 s.d 2000 dan 2004 s.d 2008..	196
Tabel 6.2.	Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1998 s.d 2000 dan 2004 s.d. 2008 (%) .....	201
Tabel 6.3.	Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d. 2008 (%) .....	205
Tabel 6.4.	Hubungan antara Karakteristik Wilayah Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen dengan Sektor Dominan, PDRB Per Kapita, Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 .....	257
Tabel 6.5.	Matriks Strategi Pengembangan Wilayah dan Sektor per Periode Waktu di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, per Tahun 2009 .....	259



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. <i>Circular Flow Diagram</i> .....	29
Gambar 2.2. Model Leviathan .....	54
Gambar 2.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pola <i>Steplike</i> .....	57
Gambar 2.4. Posisi Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen .....	86
Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir .....	116
Gambar 3.2. Kerangka Konseptual .....	117
Gambar 4.1. Konstruksi Diagram Jalur .....	135
Gambar 5.1. Karakteristik Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen .....	154
Gambar 5.2. Karakteristik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tipologi Klassen .....	154
Gambar 5.3. Diagram Jalur Hasil Pengujian <i>Inner Weight</i> .....	188
Gambar 6.1. Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja di Indonesia, Tahun 2001 .....	198
Gambar 6.2. Pola <i>Steplike</i> Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 s.d 2008 .....	235

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pernyataan .....	294
Lampiran 2 Peta Teori .....	295
Lampiran 3 Data Input .....	319
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Linieritas .....	352
Lampiran 5 Hasil Pengolahan <i>Partial Least Square</i> .....	361



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antarwilayah (Waluyo, 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan *moment* yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah (Nugroho, 2004:195-199) dan (Riyadi, 2003:331-352).

Hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah daerah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul

dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Waluyo, 2007).

Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusreni, 2009). Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta swasta harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta swasta dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan daerah telah dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sistesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada dan memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam pembangunan ekonomi daerah. Paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH**  
**DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG MULAI TAHUN 2001**

No.	Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
1	Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal
2	Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
3	Aset-Aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
4	Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

**Sumber:** Arsyad (2004:302).

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan yang kuat bagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, yaitu perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan dengan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka

pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antarwilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu (Carson, 2002: 47-78).

Bupati/Walikota sebagai pimpinan daerah dalam mengelola keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD), di samping memenuhi ketentuan tentang basis standar akuntansi pemerintah juga harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan merupakan salah satu indikator pelaksanaan kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Hasil pantauan akan dianalisis sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Ndadari (2008), Kuncoro (2007), dan Maimunah (2006), terjadinya mislokasi dalam anggaran belanja pemerintah terkait dengan perilaku oportunistik politisi dan aparat pemerintah. Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran membuka ruang bagi legislatif untuk memaksakan kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi terhadap alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan terhadap alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan

berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris ditemukan adanya *flypaper effect*, yaitu adanya perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan).

Abdullah dan Asmara (2007) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Hal itu terjadi kemungkinan adanya *power* legislatif yang sangat besar yang menyebabkan diskresi terhadap penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pada tahun anggaran 2003. Anggaran berbasis kinerja mendorong partisipasi *stakeholders* sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Menurut Khasanah (2007), analisis terhadap rasio keuangan pada APBD di Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan proporsi secara statistik (rasio keuangan keuangan daerah atau



RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005. Artinya, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Di samping itu, ketergantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana ekstern semakin menurun. Besarnya proporsi anggaran untuk belanja pembangunan pada tahun 2005 (tahun dilaksanakannya pilihan kepala daerah langsung) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004.

Subiyanto (2006:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang tidak disajikan berdasarkan pada basis standar akuntansi pemerintah yang memadai berkaitan dengan standar akuntansi pada unit-unit pemerintahan mengakibatkan suatu unit pemerintahan sulit menyusun laporan keuangan kepada publik karena penafsirannya sangat bervariasi. Kelemahan-kelemahan dalam standarisasi laporan keuangan pemerintah inilah yang mengakibatkan berbagai penafsiran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan aspek politik, hukum, sistem anggaran, dan lain-lain mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Bahkan laporan keuangan yang mengandung tindak kecurangan justru tidak teridentifikasi, tetapi justru laporan keuangan yang bersih dari kecurangan ditafsirkan sebagai adanya tindak kecurangan.

Dalam menjalankan pemerintahan sangat disadari adanya keterbatasan dan hambatan yang dibentuk dari lingkungan pemerintahan daerah tersebut berada. Keterbatasan sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia yang berbeda-beda akan sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya memakmurkan masyarakatnya. Begitu juga keterbatasan sumber-sumber keuangan daerah maupun penguasaan teknologi juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan

suatu pemerintahan di daerah. Kemampuan seluruh sumberdaya manusia beserta seluruh sistem politik lokal yang melingkupinya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan melaksanakan amanat negara tersebut. Hal ini berarti, kecakapan di dalam merumuskan strategi pemerintahan di daerah akan sangat menentukan tercapainya usaha-usaha mensejahterakan masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya rekomendasi Bank Dunia kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebaiknya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki manajemen penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam jangka pendek dan menengah dalam hal penerimaan dan pembiayaan, pengeluaran pemerintah, perencanaan, dan pemecahan masalah di hirarki pemerintahan yang lebih tinggi (Bank Dunia, 2005). Format baru penyusunan APBD belum sepenuhnya dijalankan di semua kabupaten/kota hingga 2004. Selain memperkenalkan konsep anggaran berbasis kinerja, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 juga mengakibatkan perubahan format APBD yang menggunakan konsep anggaran terpadu. Perubahan utama adalah pos belanja daerah tidak lagi dibedakan antara belanja rutin dan pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanja publik. Selain itu pinjaman dan arus pembiayaan lain serta cadangan pemerintah dibuat terpisah. Jika penanganan terhadap sisi pendapatan tidak terlalu banyak berubah, ada sejumlah perubahan pada sisi pengeluaran yang mempengaruhi APBD secara mendasar. Penggolongan antara belanja aparatur dan belanja publik didasarkan pada siapa yang menikmati. Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat umum akan dicatat sebagai belanja publik.

Sebelum adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002,

setiap unit kerja menyusun dokumen anggaran masing-masing. Permohonan anggaran diajukan secara terpisah dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk anggaran rutin dan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan. Dalam struktur baru, seluruh unit kerja kini hanya menggunakan satu dokumen anggaran (Dokumen Anggaran Satuan Kerja/DASK). Secara umum, DIK mencakup seluruh pengeluaran rutin, setara dengan kategori administrasi umum dalam DASK yang mencakup belanja pegawai dan publik. DIP mencakup seluruh pengeluaran proyek, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Dalam format anggaran baru, pengeluaran untuk menambah modal dicatat di bawah belanja modal, sementara belanja operasional proyek (kini disebut kegiatan) dicatat di bawah belanja operasi dan pemeliharaan. Hal ini membuat perbandingan belanja pembangunan dengan pos-pos terkait dalam format yang baru menjadi bermasalah. Format yang baru bertujuan untuk bergeser dari pembedaan rutin/pembangunan ke pendekatan yang lebih berorientasi pada program (Suhab, 2004).

Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sudah ada undang-undang otonomi daerah sejak tahun 1945. Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah sebelum 2004, mengalami fluktuasi operasional sejalan dengan kondisi politik yang ada. Menurut Saragih (2003:11-20), peraturan perundangan tentang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 2004 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, di mana kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah menitikberatkan pada dekonsentrasi.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana kebijakan pemerintah tentang

- otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, di mana kebijakan otonomi bersifat dualisme dimana kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD.
  4. Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, di mana pemerintah menekankan pada dekonsentrasi.
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana kebijakan pemerintah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah sedangkan dekonsentrasi hanya sebagai pelengkap.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi isu sentral dibandingkan politik. Pada penerapannya, seolah-olah terjadi proses politisasi peran pemerintahan daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Perubahan mendasar dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mulai tahun 2005 karena terjadi perubahan mendasar yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga politik. Dengan demikian, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi (Rochjadi, 2006:16). Hal ini nampak dengan mulai diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) mulai bulan Mei 2005.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Said (2008:5), otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Menurut Said (2008:5), otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan diantunya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional, artinya orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan, yaitu layanan, pengaturan, dan pemberdayaan agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana otonomi adalah suatu keadaan yang tidak tergantung pada siapapun. Dalam bahasa yang lebih politis, dalam konteks hubungan pusat-daerah, otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur sistem administrasi birokrasi, keuangan, kebijakan publik, dan hal-hal lain dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Adanya otonomi daerah, lebih memungkinkan sebuah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.

Menurut Said (2008:22 dan 31), terdapat empat perspektif yang mendasari segi positif dan empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah. Empat perspektif yang mendasari segi positif otonomi daerah, yaitu sarana untuk demokratisasi, membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan, mendorong stabilitas dan kesatuan nasional, dan memajukan pembangunan daerah. Empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah, yaitu menciptakan fragmentasi dan keterpecahbelahan yang tidak diharapkan; melemahkan kualitas pemerintahan, menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar, memungkinkan terjadinya penyimpangan arah demokrasi yang lebih besar.

Segi negatif otonomi daerah nampak jelas dengan berpotensinya 10 pemerintahan kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami

kebangkrutan. Hal ini berdasarkan audit Badan Pemeriksan Keuangan ke-10 pemerintahan kabupaten tersebut dianggap telah menyalahgunakan anggaran berupa kas bon atau utang proyek kepada pihak ketiga, kelebihan pembayaran pajak, utang kepada pihak ketiga untuk menutup utang lama sebelum pertanggungjawaban anggaran, dan menggunakan dana sisa lebih anggaran untuk deposito. Di samping itu, ke-10 pemerintahan kabupaten tersebut telah mengalokasikan lebih daripada 75% dana APBD untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan kabupaten (Kompas, 26 Maret 2011). Menurut Kompas (19 Maret 2011), semangat dan politisasi yang berlebihan terhadap aspek demokrasi dan hak politik ekonomi sosial budaya telah menghasilkan daerah otonom baru yang tidak kapabel dengan menggantungkan pembiayaan APBD dari dana perimbangan. Menurut Kompas (18 Januari 2011 dan 24 Januari 2011) telah terjadi penyimpangan dana APBD dari Aceh sampai dengan Papua yang berakibat 17 orang gubernur dan 138 bupati/walikota bermasalah dengan hukum sehingga dinonaktifkan. Korupsi akan menahan pertumbuhan dan porsi belanja rutin untuk kepentingan aparatur pemerintah daerah pada APBD yang berlebihan akan menekan anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat (Priyarsono dkk, 2010 dan Kompas, 22 Februari 2011).

Menurut Kuncoro (2010:106) selama otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, telah terjadi kecenderungan yang menyedihkan, yaitu kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, ataupun pungutan lainnya dengan kurang memperhatikan layanan publik secara optimal. Menurut Kompas (8 Februari 2011), implementasi otonomi daerah telah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dari 29 pemerintah provinsi dan 57

pemerintah kabupaten/kota, semua pemerintah provinsi memperoleh predikat agak kurang dan kurang, 5 kabupaten/kota memperoleh predikat baik (Kota Sukabumi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sleman, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Dumai), dan hanya 16% kabupaten/kota yang memperoleh nilai cukup.

Otonomi daerah merupakan realisasi ide desentralisasi. Menurut Sidik (2002), konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Sebagai ide desentralisasi, otonomi daerah mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi fiskal. Menurut Saragih (2003:39), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Menurut Priyarsono dkk (2010), Saragih (2003:40), Mardiasmo (2002:1-7), dan Reksohadiprodjo (2001:153-158), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008), dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Studi tentang desentralisasi fiskal telah banyak dilakukan, baik di Indonesia



maupun di luar negeri. Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah menyebabkan ketidakefisienan desentralisasi fiskal di daerah, berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Studi ini menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2004 s.d 2008 di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah dari tahun dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan tahun 2008 merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali sehingga akan terlihat originalitas atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan mulai 1 Januari 2001.

Pemekaran wilayah dalam 8 tahun terakhir (dari tahun 2001) telah melahirkan 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota baru. Harapan masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah menjadi lebih sejahtera belum terbukti karena banyaknya kasus korupsi. Menurut studi Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM telah ditemukan indikasi korupsi di daerah hasil pemekaran di Provinsi Banten (593 kasus), Kepulauan Riau (463 kasus), Maluku Utara (184 kasus), Kepulauan Bangka Belitung (173 kasus), Sulawesi Barat (168 kasus), Gorontalo (155 kasus), dan Papua Barat (147 kasus). Temuan tersebut diperkuat dengan hasil survei Bank Dunia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM terhadap 1.815 rumah tangga di tujuh provinsi hasil pemekaran wilayah yang menunjukkan bahwa pemekaran wilayah semakin menyuburkan praktek-praktek korupsi sehingga menyebabkan inefisiensi dan semakin tidak sejahteranya masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah akibat desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001 (Kompas, 2 Agustus 2010).

Sebelumnya, Yudhoyono dan Muladi mengatakan bahwa 80% daerah pemekaran telah gagal dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai tujuan pemekaran wilayah, sementara anggaran keuangan yang dikucurkan sudah sedemikian besar dan menjadi beban anggaran keuangan negara (Kompas, 16 Juli 2010 dan 30 September 2009).

Kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran Belanja Langsung termasuk Belanja Modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Langsung yang di dalamnya terdapat komponen Belanja Modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Belanja Tidak Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan, misalnya untuk membayar gaji pegawai negeri dan honorarium sebagai kompensasi bagi pegawai negeri terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan di daerah yang akan menjadi faktor pendapatan dan akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan

aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dua kegiatan, yaitu konsumsi pegawai negeri dan belanja pemerintah daerah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pegawai negeri dan pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi ini akan membentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan dan terjadi penurunan kriminalitas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut dalam implementasi desentralisasi fiskal belum sesuai dengan yang diharapkan karena berbagai faktor. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat apabila besarnya pendapatan yang diterima daerah relatif besar nilainya, sehingga apabila pendapatan yang diterima daerah relatif kecil nilainya maka menjadi terkendala tujuan desentralisasi fiskal untuk peningkatan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan alokasi belanja modal pada APBD yang relatif kecil nilainya karena terlalu

besarnya proporsi belanja pegawai pada APBD menjadi kendala bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal menjadi tidak produktif. Indikator kesejahteraan masyarakat terkini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan yang dilengkapi dengan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) yang dihitung dari tingkat kejahatan per 1.000 penduduk di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota. Apabila tujuan pembangunan tersebut berhasil maka angka IPM meningkat dan angka IKD menurun.

Kondisi keuangan obyek studi, yaitu Total Pendapatan Daerah dan Total Pengeluaran Daerah pada APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi yang mencakup karakteristik dan dinamika kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya data keuangan dan perekonomian serta hubungan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota lain di Provinsi lain, dan pemerintah pusat. Total Pendapatan Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemampuan dalam memperoleh sumber pendanaan APBD, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun yang berasal dari luar kabupaten/kota. Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemampuan dalam mengalokasikan anggaran pengeluaran APBD, baik anggaran belanja tidak langsung maupun anggaran belanja langsung.

Selama tahun 2004 s.d 2008, Total Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tumbuh sekitar 16,7%, sedang Total Pengeluaran

Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tumbuh sekitar 19,8%. Tingginya rata-rata laju pertumbuhan Total Pengeluaran Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan indikasi bagaimana pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, baik melalui alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rata-rata kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maka nilainya hanya sebesar 9,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rendah sekali dan pola hubungan dalam desentralisasi fiskal berupa instruktif (Halim dalam Mursinto, 2004:37). Kemampuan keuangan, kemandirian, dan pola hubungan dalam desentralisasi fiskal disajikan dalam Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN POLA HUBUNGAN**  
**DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA MULAI TAHUN 2001**

No.	Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
1	Rendah sekali	0 - <25	Instruktif
2	Rendah	25 - <50	Konsultatif
3	Sedang	50 - <75	Partisipatif
4	Tinggi	75 - 100	Delegatif

**Sumber:** Halim dalam Mursinto (2004:37).

Alokasi anggaran belanja langsung sebagian digunakan untuk belanja modal. Selama tahun 2004 s.d 2008, belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tumbuh sekitar 63,7%. Tingginya laju pertumbuhan rata-rata belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa belanja modal sebagai bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun akan

menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui perubahan nilai relatif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004 s.d 2008 sebesar 13,22%. Tingginya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum dapat mengindikasikan semakin sejahteranya masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan.

Angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengalami kenaikan. Apabila dikaitkan dengan awal pemberlakuan otonomi daerah per 1 Januari 2001 sebagai awal desentralisasi fiskal maka dapat ditunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap indikator kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM (Soesilowati, 2005:112-115). Hal lain yang dapat dilihat adalah angka IPM untuk kota cenderung lebih tinggi daripada angka IPM untuk kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan karena faktor belanja modal kota yang lebih besar nilainya daripada belanja modal kabupaten.

Semakin sejahteranya masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diproksi dengan angka IPM yang semakin tinggi dari tahun ke tahun ternyata belum tentu diimbangi dengan turunnya angka IKD. Angka IKD yang cenderung semakin tinggi adalah angka IKD di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Boyolali, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, serta Kota Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Tegal. Angka IKD yang cenderung semakin turun adalah angka IKD di Kabupaten Banyumas, Blora, Brebes, Demak, Grobogan, Kudus, Magelang, Rembang, Semarang, Temanggung, serta Kota Magelang dan Salatiga. Tingginya angka IKD di Kota Semarang dan Kota Surakarta didominasi oleh kejahatan jenis pencurian kendaraan bermotor per 1.000 penduduk. Pembagi per 1.000 penduduk digunakan untuk menyeragamkan indikator angka kriminalitas antardaerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk antardaerah (BPS:2009b).

Berdasarkan penjelasan tentang desentralisasi fiskal tersebut, mengindikasikan adanya perbedaan antara teori dan praktek. Hal inilah yang menjadi masalah dalam studi ini. Bahm dalam Priyati (2010) menjelaskan bahwa langkah awal untuk memasuki dunia ilmu adalah masalah. Tanpa masalah tidak akan ada ilmu. “Jantung” ilmu adalah masalah yang dijawab secara ilmiah yang diikuti dengan sikap, metode, aktivitas, simpulan, dan efek. Suatu masalah dianggap ilmiah apabila memiliki karakteristik *communicable* yang dapat didekati dengan sikap dan metode ilmiah. Artinya, desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang secara teori mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata secara praktek belum mampu berdasarkan fakta yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik

untuk melakukan studi tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang yang menjelaskan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maka disusun Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
7. Bagaimanakah perbandingan desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?



### 1.3. Tujuan Studi

Berdasarkan Rumusan Masalah, Tujuan Studi yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pada APBD kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pada APBD kabupaten/kota terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Untuk mengetahui perbandingan desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.4. Manfaat Studi

Manfaat Studi ini adalah:

1. Berdasarkan segi teori, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi

fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota.

2. Berdasarkan segi praktik, sebagai sumbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang benar yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sumbangan bagi DPRD kabupaten/kota untuk mengetahui wewenang legislasi dalam menggunakan, mengawasi, dan mengendalikan alokasi APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumbangan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah.
3. Sebagai sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih luas dan rinci.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan teori yang melandasi dan berkaitan dengan studi ini, yaitu tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam suatu studi, landasan teori menjadi penting karena merupakan pendekatan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus untuk memperjelas wawasan dalam melakukan analisis melalui teori. Menurut Chalmers (1983:83-84), teori harus dipandang sebagai keutuhan struktural, karena bersumber dari studi tentang sejarah ilmu, berhubungan erat dengan ketergantungan observasi pada teori, teori yang tersusun secara koheren konsep-konsep dapat memperoleh makna yang tepat. Ilmu akan maju lebih efisien apabila teori disusun sedemikian rupa sehingga terdapat di dalamnya berbagai petunjuk dan keterangan mengenai bagaimana seharusnya teori dikembangkan dan diperluas. Teori merupakan struktur yang masih terbuka untuk perkembangan lebih lanjut.

##### **2.1.1. Teori Ekonomi Publik**

Menurut Mangkoesubroto (1994:3-23), ekonomi publik menjelaskan tentang mengapa pemerintah harus ikut campur tangan dalam menata perekonomian, mengapa timbul monopoli dan bagaimana konsekuensinya terhadap perekonomian makro, mengapa timbul eksternalitas positif dan negatif, bagaimana terjadinya

penyediaan barang publik, dan bagaimana mendistribusikan pajak. Pemerintah mempunyai peran penting dalam memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti prasarana jalan dan bendungan. Ekonomi publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusinya terhadap pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik.

Menurut Musgrave *and* Musgrave (1989:6), pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian terutama untuk melaksanakan fungsinya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak. Fungsi pemerintah dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Dilihat dari fungsi alokasi, suatu barang publik tidak dapat disediakan melalui sistem pasar yang melalui transaksi antara konsumen dan produsen secara individu. Mekanisme pasar sering berfungsi namun tidak efisien. Hal ini karena kegagalan mekanisme pasar. Hubungan antara produsen dan konsumen yang terjadi dalam mekanisme pasar tidak ada dan pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi barang publik. Pemerintah harus mengambil tindakan apabila mekanisme pasar tidak berjalan. Di samping itu, sebagai akibat kegagalan mekanisme pasar yang

lain maka proses politik akan menggantikan mekanisme pasar.

Pemerintah harus menjamin bahwa proses politik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang publik dapat terjadi secara efisien. Barang pribadi dapat diproduksi dan dijual kepada pembeli swasta baik oleh swasta maupun oleh perusahaan pemerintah, sedangkan barang publik dengan cara yang sama dapat diproduksi oleh perusahaan swasta dan dijual kepada pemerintah atau dapat juga diproduksi secara langsung oleh pemerintah, seperti misalnya layanan yang diberikan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang timbul dalam fungsi alokasi adalah berapa banyak barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah, jenis, dan kualitas barang.

## 2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Dilihat dari fungsi distribusi, fungsi distribusi mempunyai sifat yang lebih sulit dipecahkan dibanding fungsi alokasi dan merupakan permasalahan utama dalam penentuan kebijakan publik. Fungsi distribusi mempunyai peranan penting dalam kebijakan pajak dan transfer. Tanpa adanya intervensi kebijakan, distribusi pendapatan dan kekayaan akan tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan kepemilikan kekayaan. Permasalahannya terletak pada aspek pemerataan dan keadilan. Apabila hukum ekonomi pasar diberlakukan, penggunaan sumber daya yang efisien ditentukan oleh nilai penetapan harga faktor produksi yang kompetitif dan distribusi pendapatan keluarga ditentukan oleh proses pasar. Namun hal ini dipandang sebagai suatu tingkat ketidakadilan, terutama dalam distribusi pendapatan modal. Para ekonom sepakat bahwa dibutuhkan

penyesuaian untuk menentukan batas minimum kelompok berpenghasilan rendah. Proses penyesuaian ini akan menimbulkan inefisiensi dan biaya. Hal inilah yang selanjutnya diperhitungkan dalam merancang kebijakan distribusi.

Alternatif peralatan fiskal dalam fungsi distribusi adalah skema pemindahan pajak yang menggabungkan pajak progresif, yaitu pengenaan jenis pajak dimana rasio pajak terhadap penghasilan naik dengan naiknya pendapatan. Pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai layanan umum. Dalam mempertimbangkan instrumen kebijakan, perlu diperhitungkan bobot atau biaya efisiensi, yaitu biaya yang timbul akibat pilihan terhadap perilaku konsumen atau produsen. Pemecahan optimal menghendaki suatu kombinasi yang kompleks antara pajak dan subsidi. Konsekuensi pilihan instrumen fiskal menunjukkan bahwa setiap perubahan harus diselesaikan dengan biaya efisiensi yang minimum dan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk menyeimbangkan konflik antara tujuan pemerataan dan tujuan efisiensi.

### 3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Suatu kebijakan publik, misalnya pengenaan pajak dan pengeluaran publik, dapat secara simultan diarahkan kepada ketiga tujuan tersebut. Permasalahan utama adalah merancang kebijakan anggaran sehingga tujuan yang berbeda-beda tersebut dapat dicapai secara lebih terpadu.

Fungsi stabilisasi dirancang untuk mencapai tingkat kesempatan kerja,

tingkat stabilitas harga, neraca pembayaran yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa kebijakan stabilisasi pemerintah, perekonomian cenderung mengalami fluktuasi, pengangguran, dan inflasi meskipun faktor-faktor penyebab ketidakpastian dapat dialihkan dari suatu negara ke negara lain karena adanya saling ketergantungan antarnegara. Tingkat kesempatan kerja dan tingkat harga tergantung dari tingkat permintaan agregat dan output kapasitas berdasar harga yang berlaku. Permintaan agregat merupakan akumulasi dari pengeluaran individu dan perusahaan, sedangkan keputusan pengeluaran dipengaruhi oleh pendapatan, kesejahteraan, penyediaan kredit, dan pengharapan.

Peningkatan anggaran belanja pemerintah yang bersifat ekspansi akan meningkatkan permintaan pemerintah dan kemudian menjalar ke sektor swasta. Penurunan pungutan pajak dapat juga bersifat ekspansif, karena pendapatan yang diterima wajib pajak menjadi lebih besar sehingga pendapatannya akan digunakan untuk belanja yang lebih besar juga. Peranan sektor publik terletak pada bagaimana membiayai defisitnya anggaran. Jika kebijakan moneter longgar, pengaruh ekspansioner akan tinggi karena defisit anggaran dibiayai dengan pinjaman. Sebaliknya, jika kebijakan moneter ketat, pinjaman akan meningkatkan bunga sehingga menghambat ekspansi pasar.

Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan *circular flow diagram* yang dikembangkan dari Musgrave and Musgrave (1989:16) seperti tampak pada Gambar 2.1 di halaman 30. *Circular flow diagram* tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi di daerah saling berinteraksi, dengan asumsi ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan,



**Sumber:** Musgrave *and* Musgrave (1989:16). Diolah kembali.

**Gambar 2.1 CIRCULAR FLOW DIAGRAM**

lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Masyarakat diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi dan kemudian menjualnya kepada perusahaan yang oleh karena itu masyarakat akan memperoleh pendapatan. Di samping itu, masyarakat merupakan pelaku ekonomi yang mengkonsumsi barang dan jasa -pengeluaran konsumsi masyarakat- yang dihasilkan perusahaan.

Perusahaan diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang kemudian menjualnya kepada masyarakat. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa karena perusahaan membeli atau menyewa faktor produksi yang ditawarkan masyarakat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga



perantara (*intermediation role*) dan lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi (*transmission role*). Sebagai lembaga perantara, lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana (masyarakat) yang ditabung di lembaga keuangan dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana (perusahaan) yang digunakan untuk investasi. Sebagai lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi, lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga pencetak uang kartal dan uang giral yang digunakan sebagai *medium of exchange, unit of account, store of value, standard deferred of payment, dan medium of commodity* (Setyowati dkk, 2004:145).

Pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kekuasaan dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk melancarkan interaksi ekonomi antarpelaku ekonomi daerah. Pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi, yaitu menyusun dan memaksa aturan-aturan umum yang mengatur perilaku para individu dengan keterlibatan yang minimal, tanpa mengelola aktivitas individu tersebut baik secara langsung atau tidak langsung; membeli sumber daya yang digunakannya dalam pasar input (bukan mengendalikan/mengatur sumber daya tersebut); dan memproduksi barang atau jasa dengan membebankan secara pro rata kepada pengguna (bukan bertransaksi dengan pengguna).

Petty dalam Pressman (2000:8) mengatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris bukan melalui perdagangan internasional (seperti pendapat Merkantilisme) tetapi melalui keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Disebutkan oleh Petty bahwa keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak merupakan determinan yang lebih

penting untuk kemakmuran ekonomi daripada kebijakan perdagangan atau akumulasi surplus perdagangan yang besar, namun Petty juga mengkritik keuangan publik Inggris dengan menyatakan bahwa sistem pajak di Inggris merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pendapat Petty tersebut berdasarkan fakta bahwa di Inggris biaya penarikan pajak sangat tinggi, tidak ada kepastian mengenai pajak yang dibayar penduduk, dan banyaknya ketidakadilan dalam praktek penarikan pajak. Kondisi ini mengurangi dorongan rakyat Inggris untuk bekerja keras dan memperbaiki diri sendiri sehingga bukan tidak mungkin akan mengakibatkan ekonomi stasioner.

Petty dalam Pressman (2000:9) mengatakan bahwa pemanfaatan pajak lebih penting daripada pengumpulan pajak karena pajak akan merusak perekonomian hanya jika pendapatan pajak dikeluarkan dari sirkulasi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah akan mengembalikan uang ke sirkulasi dan membuat orang bekerja kembali. Hal ini menggantikan uang yang hilang dalam sirkulasi yang diakibatkan oleh pajak. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran uang untuk pertahanan, keadilan, bantuan pendidikan untuk orang miskin, dan pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Bahkan Petty mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang tidak bergunapun tidak masalah asal pengeluaran pemerintah tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan pengangguran.

Smith dalam Pressman (2000:34-35) mengatakan bahwa perlunya menyetujui ketentuan pemerintah terhadap barang publik yang berhubungan dengan eksternalitas dalam jumlah besar. Dalam situasi normal sebagian besar transaksi dibayar oleh orang yang membeli dan mengkonsumsi produk, demikian juga semua manfaat

produksi akan diperoleh oleh konsumen produk. Dalam situasi yang tidak normal terjadi kondisi ada pihak luar yang memperoleh keuntungan dan kerugian yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam kaitannya dengan eksternalitas dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok tertentu yang dirugikan karena eksternalitas tersebut. Perlindungan di sini dapat berupa pengenaan pajak terhadap pihak yang merugikan pihak lain atau memberikan subsidi kepada pihak yang dirugikan. Berkaitan dengan pajak dan retribusi berarti berhubungan dengan masalah desentralisasi fiskal.

Smith dalam Pressman (2000:36) menjelaskan peran pemerintah yang tepat dalam mengembangkan perekonomian khususnya dalam upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara terbaik, yaitu melalui sistem pajak untuk membiayai belanja publik. Smith menunjukkan empat aturan persyaratan untuk menetapkan pajak untuk publik, yaitu pajak seharusnya proporsional, artinya semua orang membayar pajak dalam persentase yang sama dari pendapatannya; pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak yang harus dibayarkan, artinya pembayar pajak seharusnya mengetahui terlebih dahulu berapa pendapatan yang dimiliki dan kapan pembayaran pajak harus dilunasi; pajak seharusnya ditarik pada waktu dan dengan cara yang paling sesuai bagi pembayar pajak, artinya penarikan pajak dilakukan ketika pendapatan terealisasi bukan ketika pendapatan terkumpul; dan pajak terbaik adalah pajak yang paling sedikit membutuhkan biaya pengumpulannya, artinya dalam penarikan pajak tidak memerlukan jumlah petugas pajak yang berlebihan, tidak membahayakan insentif ekonomi, tidak menciptakan usaha untuk menghindari pajak, dan tidak menetapkan denda yang terlalu besar yang akan menyulitkan pembayar pajak. Dengan demikian, pengenaan pajak dirancang untuk

menghasilkan pertumbuhan ekonomi maksimum.

Wicksell dalam Pressman (2000:125-126) menjelaskan aspek pengeluaran pemerintah yang lebih banyak untuk layanan sosial, khususnya pendidikan untuk mengimbangi kesenjangan pendapatan yang muncul ketika pendapatan didistribusikan berdasarkan produktivitas marjinal. Di samping itu, penting untuk mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara luas dengan tujuan semakin tersebar sehingga setiap anggota masyarakat merasa memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan.

Dalam situasi tertentu, mekanisme pasar mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien yang timbul pada saat tidak seorang pun dapat dipuaskan tanpa menyebabkan orang lain menderita kerugian, namun suatu masyarakat dapat saja memilih alokasi yang tidak efisien terhadap dasar kesetaraan atau kriteria lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya intervensi pemerintah dalam operasi pasar bebas. Ada dua argumen mengenai perlunya intervensi pemerintah yaitu kegagalan pasar dan penekanan pada aspek keadilan (Reksohadiprojo, 2001:33).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pemerintah terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat fungsi pemerintah tersebut masing-masing berkaitan dengan pemerintah dalam fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, fungsi dalam kesejahteraan, fungsi dalam pendidikan, dan fungsi dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia.

Kegiatan pemerintah dalam melaksanakan beberapa fungsi tersebut nampak

dalam kebijakan anggaran, sehingga kebijakan anggaran secara simultan mempunyai beberapa tujuan. Menurut Suparmoko (2002:15-22), tujuan kebijakan anggaran adalah meningkatkan layanan pemerintah yang perlu diikuti dengan kenaikan pajak (tujuan alokasi), mendistribusikan pendapatan ke kelompok rendah/tinggi yang perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya (tujuan distribusi), dan menaikkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak (tujuan stabilisasi). Suatu kebijakan publik mungkin tidak dapat memenuhi ketiga tujuan sekaligus, sehingga dimungkinkan adanya pengecualian, namun suatu kebijakan selalu berupaya meminimumkan konflik masing-masing tujuan.

## **2.1.2. Desentralisasi Fiskal**

### **2.1.2.1. Pengertian dan Tujuan Desentralisasi Fiskal**

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:30-38), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; dan devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah. Menurut Saragih (2003:83), desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1, desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rochjadi (2006:7-8), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sidik dalam Abimanyu (2009:540), tujuan desentralisasi fiskal adalah membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, mobilisasi pendapatan daerah dan nasional, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

#### **2.1.2.2. Teori Desentralisasi Fiskal**

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jumlah bidang

pemerintahan yang menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama di antara level pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi setiap daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah sebagai pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan desentralisasi prinsip efisiensi menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau layanan publik harus dikelola secara efisien, namun menghasilkan *output* yang maksimal. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saragih, 2003:40).

Oates (1993), menjelaskan tentang *Fiscal Decentralization and Economic Development* yang dilaksanakan di 58 negara dengan hasil bahwa sentralisasi fiskal berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat pendapatan per kapita. Oates juga menjelaskan hal yang sama tentang *Fiscal Decentralization and Economic Development* yang dilaksanakan di 43 negara pada tahun 1985. Berdasarkan sampel

18 negara industri sebagai obyek studi diperoleh hasil bahwa kontribusi pemerintah pusat dalam anggaran pengeluaran publik sebesar 65% sedang sampel di 25 negara industri sebagai obyek studi diperoleh hasil bahwa kontribusi pemerintah pusat dalam anggaran pengeluaran publik rata-rata lebih daripada 90%.

Prud'Homme (1994) menjelaskan tentang *On Dangers of Decentralization*, bahwa manfaat desentralisasi fiskal dalam hal efisiensi tidak jelas nyata seperti yang disarankan dalam teori desentralisasi fiskal karena adanya asumsi yang rapuh dalam teori desentralisasi fiskal, efisiensi produksi dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah manfaat yang meragukan karena adanya *carry cost*, desentralisasi fiskal dalam kebijakan redistribusi apakah *interpersonal* atau *interjurisdictional* adalah sesuatu yang lebih sulit, dan desentralisasi fiskal membuat kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah kabupaten/kota dapat *mengcounter* kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (pusat). Hal ini dalam faktanya sering terjadi ketika situasi ekonomi makro pusat dan daerah tidak sama dan ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari partai politik yang sama dengan partai politik yang mengusung Presiden terpilih. Hal ini nampak sekali di Indonesia.

Bhal (1999) menjelaskan tentang *Implementation Rules for Fiscal Decentralization* yang dipresentasikan di *International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute, Taiwan*. Bhal menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan oleh 12 ketentuan peraturan, yaitu desentralisasi fiskal harus dipandang sebagai sebuah sistem yang komprehensif, desentralisasi fiskal harus diikuti dengan desentralisasi keuangan,



pemerintah pusat harus mempunyai kekuatan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal, satu sistem dalam *intergovernmental* tidak *fit* untuk sektor perkotaan dan perdesaan, desentralisasi fiskal menuntut pemerintahan lokal yang kuat dalam hal perpajakan daerah, pemerintah pusat harus mampu menjadi kendali dari desentralisasi fiskal yang disusunnya, adanya ketentuan dalam desentralisasi fiskal yang sederhana yang *simple*, desain dari sistem transfer dalam *intergovernmental* seharusnya sejalan dengan bentuk desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal seharusnya mempertimbangkan tiga tingkatan dalam pemerintahan, paksaan yang ekstra keras dalam memperhatikan kendala anggaran, tuntutan sistem dalam *intergovernmental* yang terencana dan transisional, dan harus ada keberhasilan dalam implementasi desentralisasi fiskal.

Menurut Fuad dkk (2005:245), *The Tiebout Model* menjelaskan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara layanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya.

Menurut Mulyana dkk (2006:277-285), desentralisasi fiskal di negara federal maupun negara kesatuan selalu memunculkan pola hubungan fiskal antarpemerintahan. Hubungan fiskal antarpemerintahan yang berlaku saat ini ada

dua, yaitu federalisme fiskal dan keuangan federal. Model federalisme fiskal adalah model hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pada beberapa negara yang berbentuk federal, pemerintahan negara bagian bukan merupakan pelaku otonom. Perancis dan Inggris mencerminkan model federalisme fiskal untuk kelompok negara-negara maju; Indonesia, Maroko, dan Tunisia mencerminkan model federalisme fiskal untuk negara berkembang; serta Cina dan Vietnam mencerminkan model federalisme fiskal untuk negara transisi. Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian tinggi. Dalam perspektif ini, kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah bersifat *top down* dan berpola dekonsentrasi atau maksimalnya berpola delegasi. Kerangka analisis yang sesuai dengan perspektif tersebut adalah teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi.

Implikasi hubungan fiskal model federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka menggalakkan otonomi regional dan untuk memperbaiki infrastruktur lokal. Transfer dari pemerintah pusat ini akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman dan sektor-sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Sriningsih dan Muadi Yasin (2009), dalam federalisme fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pentingnya *revenue* dan *expenditure* antarpemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Model keuangan federal adalah model hubungan fiskal antarpemerintahan yang lebih tepat diterapkan untuk beberapa negara, terutama negara-negara yang memiliki keanekaragaman dalam aspek geografis dan etnis. Dalam model keuangan federal, batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah secara umum ditetapkan melalui undang-undang. Secara teoritis, negara yang berbentuk federal pada umumnya menganut model keuangan federal, misalnya Amerika Serikat dan Kanada.

Meski secara teoritis negara yang berbentuk federal akan menerapkan model keuangan federal, tetapi pada praktiknya tidak selalu demikian. Negara-negara seperti Pakistan, Argentina, dan Afrika Selatan adalah negara-negara berbentuk federal, namun prakteknya sejauh ini masih sentralisasi fiskal dan federalisme fiskal. Pada negara yang berbentuk kesatuan, model keuangan federal juga berlaku. Hubungan fiskal model federalisme fiskal dan keuangan federal yang diterapkan di berbagai negara ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**KATEGORI NEGARA MENURUT JENIS HUBUNGAN FISKAL**  
**ANTARPEMERINTAHAN, TAHUN 1991**

No.	Kategori Negara	Federalisme Fiskal	Keuangan Federal
1	Negara Maju	Jepang dan Perancis	Amerika Serikat dan Kanada
2	Negara Berkembang	Indonesia, Kolombia, Maroko, dan Tunisia	Argentina, Brasil, Afrika Selatan, India, dan Pakistan
3	Negara Transisi	Cina dan Vietnam	Bosnia Hezegovina dan Rusia

**Sumber:** Bird dan Vaillancourt (2000:31).

Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian tinggi sehingga kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah bersifat *top down* dan berpola dekonsentrasi atau maksimalnya berpola delegasi. Model hubungan

desentralisasi fiskal tersebut dapat dianalisis dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*.

Menurut Abdullah dan Asmara (2007), hubungan keagenan dalam penganggaran publik dapat terjadi antara eksekutif dan legislatif serta antara legislatif dan pemilih. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal*. Dalam *setting* pengambilan keputusan legislatif, seorang legislatur sebagai suatu keseluruhan bertindak selaku *principal* yang mendelegasikan tugas-tugas untuk merancang alternatif kebijakan terhadap kebijakan yang telah ada kepada *an expert agent* seperti pemerintah.

Interaksi *principal-agent* bermula ketika *agent* menyusun suatu usulan dan berakhir ketika *principal* menerima atau menolak usulan tersebut. *Legislators* ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, *legislators* mencari program dan proyek yang membuatnya populer di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin *agency*-nya berkembang dan konstituen percaya menerima manfaat dari pemerintah. Oleh karena semua pihak dapat bertemu dalam *action* yang sama, maka konsensus di antara *legislator* dan birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian. Sebagai *principal*, legislatif dapat juga berperilaku *moral hazard* dalam merealisasikan *self-interestnya*. Adanya *discretionary power* akan menimbulkan pelanggaran terhadap kontrak keagenan sehingga dapat

diprediksi bahwa semakin besar *discretionary power* yang dimiliki legislatif semakin besar pula kecenderungannya mengutamakan kepentingan pribadinya.

Hubungan keagenan antara legislatif dan pemilih pada dasarnya menunjukkan bagaimana pemilih memilih politisi untuk menyusun kebijakan publik bagi pemilih dan pemilih memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan *principalnya* ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian anggaran. Pada kenyataannya, legislatif tidak selalu memiliki preferensi yang sama dengan pemilih. Oleh karena itu, pendelegasian memiliki konsekuensi terjadinya abdikasi, yaitu agen tidak dibatasi dengan bagaimana harus bertindak untuk kepentingan *principalnya*. Persoalan abdikasi menjadi semakin nyata ketika tidak ada institusi formal yang berfungsi mengawasi kinerja legislatif. Pemilih sesungguhnya berkeinginan menghilangkan peluang oportunisme legislatif melalui suatu aturan, namun menyusun aturan untuk sesuatu yang tidak jelas dan tingginya kompleksitas situasi yang dihadapi menyebabkan kontrak yang sempurna sulit dibuat.

Halder (2007) menjelaskan tentang *Measures of Fiscal Decentralization*. Berdasarkan data di 61 negara dengan menggunakan data panel dan menggunakan 2 standar pengukuran desentralisasi fiskal, yaitu rasio pengeluaran dan rasio penerimaan yang dihitung dengan rasio baru yang disebut *Composit Ratio* (CR). Di samping itu, desentralisasi fiskal juga diukur dengan menggunakan ukuran rata-rata wilayah hukum dan jumlah penduduk di wilayah hukum tersebut. Berdasarkan model regresi dengan 4 variabel independen (*Human Development Index* (HDI), *life expectancy*, GDP, dan angka kematian bayi) dan 1 variabel dependen (desentralisasi fiskal) diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal secara umum mempunyai

korelasi positif dengan *economic outcome* yang menguntungkan.

Dimensi ekonomi baku dari suatu kebijakan keuangan publik adalah efisiensi, stabilitas makro ekonomi, dan keadilan (Musgrave dan Musgrave, 1989:6). Aspek efisiensi merupakan *raison d'etre* untuk desentralisasi fiskal. Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensinya dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan sosial (Usman, 2001:24).

Menurut Hirawan (2007:10), Adi dkk (2005a:16-22), dan Susanto (2004:4-16), argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para penduduk dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibandingkan pemerintah pusat (Erfanie, 2004:117-134). Menurut Solihin dan Niken Ajeng Lestari (2010), desentralisasi fiskal akan mengarahkan program pembangunan pemerintah pada kepentingan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat. Hal ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi alokasi oleh pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan *willingness to pay* masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Keputusan mengenai pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap keinginan konstituennya dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat (Vazques, 1997 dan Waluyo, 2007). Di samping itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan

persaingan antardaerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Desain fiskal antarpemerintahan juga memiliki implikasi penting terhadap stabilitas makro ekonomi dan keadilan (Rafinus, 2001). Desentralisasi inheren dengan destabilisasi makro ekonomi. Studi mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pengelolaan makro ekonomi menemukan hasil bahwa sistem desentralisasi fiskal menawarkan perbaikan potensial yang lebih besar terhadap perbaikan pengelolaan makro ekonomi dibandingkan sistem fiskal yang tersentralisasi. Negara-negara federal yang terdesentralisasi seperti Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan memiliki kinerja makro ekonomi yang sangat stabil dan tingkat inflasi yang rendah, namun di negara-negara berkembang penerapan desentralisasi fiskal tidak otomatis menstabilkan kondisi makro ekonomi. Menurut Mulyana dkk (2006:365-366), jika suatu negara mendesentralisasikan tanggungjawab pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat layanan akan menurun atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan kucuran dana dan atau pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, maka mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makro ekonomi dapat kembali muncul.

Menurut Fuad dkk (2005:246), aspek keadilan dalam desentralisasi fiskal berkaitan dengan redistribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam desentralisasi fiskal, redistribusi pendapatan memiliki dua dimensi, yaitu keadilan horisontal dan keadilan lokal. Keadilan horisontal merujuk pada tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi layanan publik. Dua faktor utama yang

memberikan kontribusi munculnya ketidakadilan horisontal adalah basis pajak yang sangat berbeda secara signifikan antardaerah dan karakteristik regional yang mengakibatkan perbedaan biaya penyediaan layanan. Untuk mengurangi ketidakadilan horisontal ini perlu dirancang kebijakan untuk memberikan sumber daya yang lebih besar kepada daerah yang lebih miskin sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan horisontal tersebut.

Penyediaan sumber daya yang lebih banyak kepada daerah miskin hanyalah satu aspek dari problem keadilan. Kesuksesan dalam kebijakan redistribusi juga memerlukan perhatian yang khusus terhadap keadilan lokal. Dalam merancang kebijakan redistribusi, pemerintah daerah memerlukan dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan redistribusi secara efektif. Mobilitas rumah tangga adalah hambatan riil pemerintah daerah untuk menggunakan kebijakan redistribusi. Jika pemerintah daerah mengeluarkan program redistribusi pendapatan secara agresif, maka akan menciptakan suatu insentif yang kuat bagi penduduk berpendapatan rendah untuk datang dan mendorong penduduk berpenghasilan tinggi untuk pindah. Program redistribusi pendapatan merupakan pajak bagi penduduk kaya dan sebagai subsidi bagi penduduk miskin.

Sidik (2002) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem, nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam layanan sektor publik.



Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*, serta terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat seperti pada masa Orde Baru (Aziz, 1994:105-108).

Menurut Mardiasmo (2005:9), pemerintah merupakan institusi yang dapat melakukan redistribusi pendapatan, penyediaan barang publik, dan perlindungan sosial lebih baik daripada swasta atau individu. Kekuatan dan mekanisme pasar diyakini tidak akan pernah menghasilkan distribusi pendapatan yang merata, padahal distribusi pendapatan yang relatif merata merupakan satu fenomena yang diinginkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa terdapat pembagian pendapatan yang lebih merata di antara kelompok-kelompok masyarakat. Redistribusi pendapatan sangat sulit dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang menerapkan sistem pajak progresif akan mendapatkan distribusi pendapatan yang lebih merata untuk daerahnya, tetapi kemungkinan besar diikuti dengan pindahnya kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Di samping itu, pemerintah dapat melakukan aktifitas redistribusi lain melalui pemerataan fiskal dengan cara mentransfer dana dari daerah yang lebih kaya kepada daerah yang lebih miskin sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang kurang lebih sama untuk menyediakan sejumlah layanan publik sebagai kunci konsep pemerataan antardaerah.

Redistribusi pendapatan juga dapat dilakukan pemerintah daerah dengan menyediakan barang publik lokal berdasarkan sifat barang publik itu sendiri.

Mekanisme pasar menghadapi sifat optimal individu sebagai *free rider* pada gilirannya akan menyebabkan barang publik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Penyediaan barang publik yang dipadukan dengan persaingan antardaerah akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan terlalu jauh dari batas optimal Pareto. Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perekonomian untuk menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat dari risiko kemiskinan di usia tua, risiko kesehatan, dan risiko pengangguran dalam jangka waktu lama. Penyediaan skema perlindungan sosial lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah pusat karena terjadinya mobilitas orang antardaerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan kependudukan.

Menurut Mardiasmo (2005:12-14), agar tujuan desentralisasi fiskal tercapai, maka ada empat elemen utama dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan, yaitu sistem dana perimbangan (transfer), sistem pajak dan pinjaman daerah, sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah, dan penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada sistem dana perimbangan (transfer), transfer dari pemerintah pusat pada prakteknya masih merupakan sumber pembiayaan dominan pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Pada sistem pajak daerah, pembatasan otonomi dari segi penerimaan cenderung berimplikasi pada penetapan retribusi baru dan pembatasan atau penundaan mekanisme penerusan pinjaman luar negeri sehingga terjadi praktek defisit anggaran. Pada sistem pinjaman daerah, perubahan regulasi dalam bentuk peningkatan batasan defisit anggaran daerah dan juga batasan akumulasi pinjaman, menandakan belum sepenuhnya disiplin fiskal berjalan. Pada sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah, efisiensi pada bagian pendapatan tidak

akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pusat dan daerah. Pada penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan SPM, otonomi luas untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum dikaitkan dengan skala ekonomis terkait dengan jenis layanan publik.

Desentralisasi fiskal yang menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 didefinisikan sebagai penyerahan wewenang fiskal oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia diukur dengan menggunakan proksi. Proksi yang digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal adalah rasio antara komponen dalam Pendapatan Daerah dengan komponen dalam Pengeluaran Daerah bukan rasio antara komponen dalam Pendapatan Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Proksi desentralisasi fiskal dengan menggunakan rasio antara komponen dalam Pendapatan Daerah dengan Total Pendapatan Daerah mengandung kelemahan karena mengukur kemandirian daerah hanya tergantung dari nilai Total Pendapatan Daerah dan tidak memperhatikan pendistribusian dari pengeluaran total daerah. Proksi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak digunakan karena hakekatnya merupakan pendapatan daerah hanya pelaksanaannya ditarik oleh pemerintah pusat, khususnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Mursinto, 2004:85).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan layanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus kembali oleh daerah. Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan; penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

Menurut Mursinto (2005a) dan Soepangat (1991:91), asas-asas pokok dalam penerimaan perpajakan pemerintah adalah asas manfaat, kemampuan membayar, politik finansial, ekonomis, keadilan, administrasi, dan yuridis. Asas manfaat adalah

wajib pajak memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara apabila wajib pajak telah menerima manfaat atas layanan yang diberikan pemerintah. Asas kemampuan membayar adalah wajib pajak memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak. Asas politik finansial adalah asas yang berkaitan dengan jumlah penerimaan pajak yang memadai dan dinamis. Asas ekonomis adalah asas yang berkaitan dengan pengenaan pajak pada aspek pendapatan, modal, atau pengeluaran karena berhubungan dengan jenis dan macam pajak terhadap wajib pajak dan kemungkinan penggeseran pajak. Asas keadilan adalah asas yang berkaitan dengan pajak yang hendaknya bersifat umum dan adanya kesamaan bebas. Asas administrasi adalah asas yang berkaitan dengan kepastian perpajakan, keluwesan dalam penagihan, dan biaya pemungutan hendaknya serendah mungkin. Asas yuridis adalah asas yang berkaitan dengan kejelasan peraturan perundangan dalam perpajakan dan penggunaan kata-kata dalam peraturan perundangan dalam perpajakan hendaknya tidak multitafsir.

Menurut Handoyo (2010), penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan khususnya pajak daerah perlu memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi karena tergantung respon wajib pajak serta permintaan dan penawaran barang yang dikenai pajak tersebut. Formulasi model ini disebut dengan Model Leviathan dengan menggunakan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan tidak signifikan, *ceteris paribus* level layanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besar pajak. Bentuk kurva *Laffer* yang berupa parabola menghadap sumbu tegak (tarif pajak) menghasilkan total penerimaan pajak maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk

menghindari beban pajak legal maupun illegal dengan mengubah *economic behavior* wajib pajak.

Berdasarkan Gambar 2.2, total penerimaan pajak maksimum sebesar  $T^*$  akan dicapai pada tarif pajak  $t^*$ . Kondisi ini disebut dengan *revenue maximizing tax rate*. Model Leviathan menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa sehingga dicapai total penerimaan pajak maksimum.



### 2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

#### 2.1.3.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Halim (2008:4-5), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan/ pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3.2. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Adolf Wagner dalam Soepangat (1991:42-44) dan Mursinto (2005b), pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena

semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Adolf Wagner menyebut dengan *The Law of Ever Increasing State Activities* atau hukum makin meningkatnya kegiatan negara atau hukum makin meningkatnya kebutuhan negara atau hukum makin meningkatnya pengeluaran negara. Peningkatan pengeluaran negara tersebut dalam arti relatif, yaitu membandingkan pengeluaran negara dengan Produk Nasional Bruto dan atau membandingkan dengan pengeluaran sektor swasta.

Menurut Peacock-Wiseman dalam Soepangat (1991:45-50), pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan, seperti yang dijelaskan oleh Adolf Wagner, namun Peacock-Wiseman menunjukkan tiga kelemahan teori Adolf Wagner. Ketiga kelemahan teori Adolf Wagner adalah teori Adolf Wagner mendasarkan pada teori kenegaraan yang sekarang tidak lagi dianut oleh negara-negara Barat, karena teori organistis menyatakan bahwa negara merupakan organisme tersendiri terlepas dari warganegaranya yang mempunyai kebutuhan tersendiri sehingga apabila setiap orang sebagai organisme selalu berkembang maka negara juga dianggap sebagai organisme yang selalu berkembang; tidak memperhitungkan pengaruh perang terhadap pengeluaran negara; dan kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran negara tersebut.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berpola seperti tangga rumah. Inilah yang disebut oleh Peacock-Wiseman dengan *steplike* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 di halaman 56. Perkembangan pengeluaran negara bentuk *steplike* disebabkan tiga efek yang saling berhubungan, yaitu *displacement effect*, *inspection*

*effect*, dan *concentration effect* (Soepangat, 1991:46). *Displacement effect* adalah efek yang berupa kenaikan pengeluaran pemerintah dan pajak akibat guncangan besar dalam suatu negara seperti perang dan depresi yang pada mulanya mengejutkan masyarakat, tetapi timbul toleransi dan kegiatan baru dari masyarakat untuk menyadarinya sehingga kenaikan tersebut tidak dirasakan. *Inspection effect* adalah efek yang berupa inspeksi dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang sebelumnya tidak diketahui sebagai akibat guncangan besar dalam suatu negara seperti perang dan depresi. *Concentration effect* adalah efek yang berupa konsentrasi yang harus dilakukan pemerintah daerah yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau sektor swasta.



**Sumber:** Soepangat (1991:45).

**Gambar 2.3**  
**PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH POLA *STEPLIKE***

*Displacement effect*, *inspection effect*, dan *concentration effect* di Indonesia mungkin tidak berlaku atau berlaku semua, sebagian, bahkan berlaku sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

yang berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain.

Menurut Soepangat (1991:70), peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah terjadi karena dengan *budgetary policy* pemerintah dapat mengurangi pengangguran dalam kondisi *under-employment* dengan pembiayaan secara *inflatoir* melalui penambahan jumlah uang beredar dan dapat menaikkan harga (inflasi) dalam kondisi *full employment* dengan pembiayaan secara *deflatoir* melalui penurunan jumlah yang beredar. Penurunan pengangguran akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi sehingga akan menambah produksi secara nasional dan pendapatan nasional atau Produk Nasional Bruto. Perubahan Produk Nasional Bruto secara relatif disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Fuad dkk (2005:224-228), dalam memahami faktor penyebab pertumbuhan belanja publik, perlu membedakan faktor belanja barang dan jasa dan belanja transfer karena mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja barang dan jasa di antaranya pertumbuhan pendapatan per kapita, perubahan teknologi, perubahan populasi, biaya relatif, dan urbanisasi. Faktor yang mempengaruhi belanja transfer di antaranya distribusi pendapatan.

Menurut Mulyana dkk (2006:365-366), jika suatu negara mendesentralisasikan tanggungjawab pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang

tersedia, maka tingkat layanan akan menurun atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan kucuran dana dan atau pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, maka mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makro ekonomi dapat kembali muncul (*Fly Paper Effect*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, klasifikasi Belanja Daerah dalam APBD terdiri dari belanja rutin (belanja aparatur) dan belanja pembangunan (belanja publik). Belanja rutin merupakan belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja pembangunan digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik, berupa pembangunan prasarana dan sarana publik. Belanja pembangunan selalu menjadi sorotan utama dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kepentingan dan kebutuhan daerah.

Menurut Halim (2008:4), belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Sebagai bentuk investasi sektor publik, belanja modal lebih fokus pada kebijakan pemerintahan dengan dimensi waktu yang bervariasi. Begitu juga dengan aspek tujuan dan arah yang tidak hanya terkait dengan aspek ekonomis tetapi menyangkut hal-hal di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik. Dalam konteks

pengelolaan negara, struktur investasi pada tingkat pemerintahan daerah otonom mempunyai spektrum yang paling luas dengan variasi ketugasan yang lebih banyak.

Menurut Halim (2008:5), belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja investasi terdiri belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode yang akan datang.

Sesuai hakekat desentralisasi fiskal, daerah otonom mempunyai otoritas melakukan layanan langsung kepada masyarakat. Untuk menunjang itu dibutuhkan elemen pelaksanaan kebijakan yang lebih lebar stratanya, tataran organisasi yang bersifat operasional dan menyebar, serta memerlukan pendanaan maupun pengendalian keuangan dengan tujuan setiap aspek ketugasan dalam pemerintahan daerah dapat dijangkau dan dilaksanakan. Sebagai generator pertumbuhan kawasan, keberhasilan investasi tidak dapat diukur dengan pengembalian dana yang secara langsung diperoleh dari obyek investasi semata, tetapi dengan mengukur seberapa jauh aktivitas ikutan atau lingkungan kawasan mampu menciptakan kegiatan

ekonomi ikutan yang dikelola kemudian hari sehingga mampu dikembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Kriteria ini penting karena fungsi belanja modal sebagai investasi sektor publik dalam pengembangan kawasan justru pada seberapa besar keberhasilan menciptakan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut.

Menurut Subiyanto dalam Halim (2008:14), investasi untuk memenuhi kepentingan layanan publik dibagi menjadi dua kelompok yaitu sarana/prasarana dan fasilitas umum lainnya. Jenis investasi ini tidak memperoleh aliran kas masuk untuk menutup biaya investasi tetapi berfungsi melayani aktivitas sektor ekonomi lainnya dan terkadang berubah menjadi pusat biaya. Jalan-jalan yang tidak dipelihara dengan baik akan menghambat mobilitas perpindahan barang ataupun pergerakan orang. Padahal, perekonomian akan tumbuh justru dari aspek mobilitas perpindahan barang dan pergerakan orang. Bahkan untuk jalan baru justru berdampak dalam perekonomian setelah beberapa tahun yang akan datang. Hal inilah yang harus dipertimbangkan dalam menganggarkan dan mengalokasikan belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja pembangunan/belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja rutin/belanja tidak langsung). Dalam mengalokasikan komponen belanja langsung yang berupa belanja modal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mengarahkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dan menyusun belanja modal sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggi dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggi diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar layanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; tenaga kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah;



penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; komunikasi dan informatika; dan perpustakaan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari layanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kelompok belanja tidak langsung pada belanja daerah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung pada belanja daerah merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Belanja modal pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun (Halim, 2008:4).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi diartikan sebagai penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat. Padahal aset pemerintah, khususnya aset tetap diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut belanja modal. Dengan demikian, investasi adalah setiap pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah

dalam melayani masyarakat. Secara logis dapat diinterpretasikan bahwa setiap belanja modal merupakan investasi, karena secara teoritis dapat dipastikan akan bermanfaat (Halim, 2008:5).

Menurut Soepangat (1991:61), asas-asas pokok dalam pengeluaran pemerintah adalah asas moralita, nasionalita, kerakyatan, rasionalita, fungsionalita, perkembangan, serta keseimbangan dan keadilan. Asas moralita adalah asas yang berkaitan dengan nilai-nilai yang didukung dan dijunjung tinggi sebagai dasar dan pendorong untuk melakukan perbuatan dalam masyarakat yang meliputi nilai-nilai agama, etika, sosial, adat-istiadat, dan kebudayaan. Asas nasionalita adalah asas yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pemerintah dan menjadi identitas yang harus dilayani, yaitu masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Asas kerakyatan adalah asas dengan membedakan antara rakyat yang memiliki kedaulatan rakyat dan rakyat yang harus dilayani oleh pemerintah. Asas rasionalita adalah asas yang berkaitan dengan penggunaan akal sehat bagi pejabat pemerintah dalam segala tindakan yang dilakukannya. Asas fungsionalita adalah asas yang menjadi dasar bagi lembaga negara atau pejabat negara berkaitan dengan fungsi atau kedudukannya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Asas perkembangan adalah asas yang berkaitan dengan perkembangan kumpulan manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya sebagai perkembangan hasil studi manusia secara kualitatif dan kuantitatif. Asas keseimbangan dan keadilan adalah asas yang berkaitan dengan keselarasan dan keserasian karena adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan potensi jiwa perasaan indera pendengaran dan indera penglihatan.

Otonomi daerah sebagai realisasi dari ide desentralisasi mempunyai salah satu tujuan yang berkaitan dengan efisiensi. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan

otonomi daerah sebagai realisasi ide desentralisasi fiskal, maka pemerintah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang *good governance*. Untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD/pelaksanaan APBD, maupun pertanggungjawaban APBD (Saragih, 2003: 120-121).

Transparan mensyaratkan adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD di dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD. Transparan dibangun berdasarkan kebebasan memperoleh informasi, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan.

Efisien dalam pengelolaan APBD didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan *output* yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan anggaran yang ada pemerintah harus mencapai target minimal. Dengan kata lain, standar layanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan segi pendapatan/penerimaan, efisien berarti dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah/beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya.

Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD berarti anggaran harus tepat sasaran. Pemikiran lama dengan mengabaikan apakah sasaran yang akan dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak karena yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai harus diganti dengan pemikiran baru yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan segi pengeluaran/belanja, efektif artinya segala jenis pengeluaran dalam APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai apa yang direncanakan dalam APBD.

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggungjawaban kepada publik yang dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD karena DPRD-lah yang menilai apakah kinerja pemerintah dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria yang sesuai. Pertanggungjawaban publik merupakan keharusan dalam upaya perwujudan *good governance*. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

Partisipatif berarti dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD yang benar. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD.

APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Dalam proses perencanaan atau penyusunan APBD, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kinerja (*performance budget*).

Pendekatan kinerja memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja/ pengeluaran, standar layanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, dan sumber pendapatan mana dalam APBD untuk membiayai belanja, apakah seluruh atau sebagian besar dana PAD digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah di luar belanja pegawai, ataukah ada kebijakan baru di dalam pemanfaatan atau penggunaan setiap jenis pendapatan daerah.

Hal itu penting untuk dianalisis dan dicermati agar tujuan dan sasaran (target) APBD tercapai. *Performance budget* atau anggaran kinerja merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari organisasi pemerintahan, artinya tujuan akhir yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas layanan publik. Untuk mencapai kinerja anggaran yang baik, maka prinsip efisiensi dan efektifitas menjadi syarat mutlak.

Menurut Saragih (2003:125), reformasi manajemen publik menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan APBD sebagai bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ada tiga bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pertanggungjawaban dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi, pertanggungjawaban dalam kerangka tugas dekonsentrasi, dan pertanggungjawaban dalam kerangka tugas perbantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan meningkatnya lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi rakyat daerah juga turut berkembang. Seiring dengan perkembangan ekonomi swasta lokal, maka APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja langsung lebih besar daripada anggaran pengeluaran tidak langsung, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintah daerah jika benar-benar pemerintah daerah menjalankan fungsi APBD secara konsekuen sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi distribusi pendapatan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendesain kebijakan anggaran daerah dengan kebijakan anggaran pengeluaran tidak langsung lebih besar daripada anggaran pengeluaran langsung, maka kebijakan anggaran pemerintah daerah yang bersifat kontraksi ini tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **2.1.4. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Djojohadikusumo (1994:1), pengertian ekonomi pertumbuhan berbeda dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi

masyarakat. Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Jhingan (1994:7-8), membedakan pengertian ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan nyata per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan disertai berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.

Menurut Sen dalam Pressman (2000:274), pengertian ekonomi pertumbuhan berbeda dengan ekonomi pembangunan (perkembangan). Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan (perkembangan) adalah ilmu yang mempelajari pengembangan kemampuan manusia.

Menurut Arsyad (2004:12-13), pengertian ekonomi pertumbuhan berbeda



dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan GDP/GNP itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya atau kelembagaan dalam aspek perbaikan di bidang organisasi dan perbaikan di bidang regulasi.

Sukirno (2006:9), membedakan pengertian antara ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada tahun tertentu dan secara konseptual nilai tersebut disebut Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GDP). Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ekonomi pertumbuhan ditambah perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dengan kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun tetapi juga perlu diukur dengan perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti

perkembangan pendidikan, teknologi, kesehatan, infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, ekonomi pembangunan meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:9), pengertian ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa berkaitan dengan efisiensi, alokasi biaya minimum dari keterbatasan sumber daya, dan pertumbuhan optimal dari sumber daya. Pemikiran ini sepaham dengan aliran ekonomi tradisional dan Neo-Klasik. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan perubahan lain dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan sosial, politik, dan kelembagaan yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.

Menurut Kuncoro (2010:5), pengertian ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional dalam dimensi yang lebih luas dan memusatkan perhatian pada kualitas proses pembangunan. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pengertian ekonomi pertumbuhan dan pembangunan menurut Djojohadikusumo (1994:1), Jhingan (1994:7-8), Sen dalam Pressman (2000:274), Arsyad (2004:12-13), Sukirno (2006:9), Todaro dan Stephen C. Smith (2006:9), serta

Kuncoro (2010:5), maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nasional atau *Gross National Product* GDP atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.

Berbeda dengan pengertian ekonomi pertumbuhan dan pembangunan yang melihat pada subyek ilmu, pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berfokus pada subyek proses. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak, sedang pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan. Pada umumnya, para ekonom memberikan pengertian yang sama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam penggunaan yang lebih umum, pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara maju sedang pembangunan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang (Arsyad, 2004:13).

Menurut Djojohadikusumo (1994:1), sebaiknya perlu membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi karena kedua istilah

tersebut di samping berbeda secara pengertian juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara. Menurut Sen dalam Pressman (2000:274), pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan (perkembangan) ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut, sedang pembangunan (perkembangan) ekonomi adalah pengembangan kemampuan manusia yang berupa peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2010:40-41), pengertian yang sama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terjadi pada awal perkembangan teori pembangunan yang pada dasarnya mengacu pada kondisi di Barat di mana dalam proses awal pembangunannya pada tiga abad yang lalu, tolok ukur itulah yang digunakan. Pembangunan ekonomi pada saat itu hanya diukur secara kuantitatif saja, misalnya dengan GNP per kapita, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, dan inflasi yang rendah. Implementasi teori pembangunan ekonomi memaksa ekonom untuk melakukan revisi strategi pembangunan ekonomi dengan memasukkan faktor pembangunan sosial dan politik. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi akhirnya tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Dengan demikian, Kuncoro (2010:40-41) sependapat dengan Djojohadikusumo (1994:1) dan Sen dalam Pressman (2000:274) yang menyatakan bahwa sebaiknya perlu membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara pengertian juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara.

Jhingan (1994:4-6), mengelompokkan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan alasan yang sesuai dengan pendapat Djojohadikusumo (1994:1). Kelompok teori yang masuk dalam teori pembangunan ekonomi dan digunakan sebagai landasan teori dalam studi ini adalah teori pembangunan ekonomi Smith. Kelompok teori yang masuk dalam teori pertumbuhan ekonomi dan digunakan sebagai landasan teori dalam studi ini adalah teori pertumbuhan ekonomi Kaldor dan Kuznets. Ringkasan perbedaan pengertian antara ekonomi pertumbuhan, ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**RINGKASAN PERBEDAAN PENGERTIAN EKONOMI PERTUMBUHAN, EKONOMI PEMBANGUNAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN EKONOMI, TAHUN 1994**

No.	Istilah	Subyek	Pengertian
1	Ekonomi Pertumbuhan	Ilmu	Ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
2	Ekonomi Pembangunan	Ilmu	Ilmu yang mempelajari perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
3	Pertumbuhan Ekonomi	Proses	Proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
4	Pembangunan Ekonomi	Proses	Proses perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

**Sumber:** Djojohadikusumo (1994:1).

#### 2.1.4.2. Teori Pembangunan Ekonomi

Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumberdaya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada (Arsyad, 2004:55-56).

Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian, artinya jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada berperan dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara optimal.

Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan pasif dalam proses pertumbuhan output, artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah daripada tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang

berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah tinggi dan meningkat jika permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output (Arsyad, 2004:57).

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum dari sumberdaya alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total dapat secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output, sedang pengaruh tak langsung adalah meningkatkan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja di antara tenaga kerja. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:244).

Spesialisasi dan pembagian kerja ini dapat menghasilkan pertumbuhan output, karena spesialisasi tersebut dapat meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja dapat mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan pekerjaan. Ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.

Potensi pasar dapat dicapai secara maksimal, jika dan hanya jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatannya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan perundangan yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*.

Tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal mempunyai hubungan erat dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan merosot yang akhirnya mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Dalam jangka panjang, tingkat keuntungan tersebut menurun dan akhirnya mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Menurut Sukirno (2006:245), apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan berlangsung terus menerus secara kumulatif. Perkembangan pasar, spesialisasi, dan pembagian kerja yang terjadi akan menimbulkan kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional dan perkembangan penduduk yang terjadi secara bersama-sama akan memperluas pasar (*vent for surplus*) dan menciptakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan investasi. Di samping itu, spesialisasi dan pembagian kerja akan menciptakan inovasi produk dan inovasi proses. Proses yang berlangsung dari waktu ke waktu tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita.

Menurut Sukirno (2006:247), ada lima hal penting dalam teori pembangunan ekonomi menurut Smith, yaitu tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung



jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, dan teknologi; pendapatan nasional suatu masyarakat meliputi pendapatan dari sewa tanah, upah pekerja, dan keuntungan pengusaha; kenaikan upah menyebabkan penambahan penduduk; pembentukan modal dipengaruhi tingkat keuntungan sehingga apabila tidak ada tingkat keuntungan perekonomian mengalami *stationary state*; dan *the law of diminishing return* mengakibatkan penambahan penduduk menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, dan meningkatkan tingkat sewa tanah apabila tidak ada kemajuan teknologi.

Keterbatasan teori pembangunan ekonomi Smith adalah pembagian kelas dalam masyarakat antara kelas kapitalis dan buruh, padahal ada kelas menengah yang berperan penting dalam masyarakat modern dalam mendorong pembangunan ekonomi; alasan menabung hanya dari para kapitalis dan tuan tanah, padahal dalam kenyataannya sumber utama tabungan dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan bukan kapitalis dan tuan tanah; asumsi persaingan sempurna, padahal asumsi persaingan sempurna tidak ditemukan di dalam perekonomian; mengabaikan peranan entrepreneur, padahal entrepreneur mempunyai peran sentral dalam pembangunan sebagai inovator yang akan menghasilkan akumulasi modal; dan asumsi stasioner berarti perubahan hanya terjadi di sekitar titik keseimbangan, padahal proses pembangunan terjadi teratur dan tidak seragam (Jhingan, 1994:106-107).

#### **2.1.4.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Kaldor menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh (Budiono, 1992:82-85) dan (Djojohadikusumo, 1994:49-52). Masing-masing kelompok memiliki *marginal*

*propensity to save* (MPS) yang berbeda, yaitu MPS kelompok kapitalis disebut  $s_k$  dan MPS kelompok buruh disebut  $s_b$  dan nilai  $s_k$  lebih besar daripada  $s_b$ . Selain membedakan masyarakat ke dalam kelompok kapitalis dan kelompok buruh, Kaldor juga membolehkan untuk membedakan kelompok yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan ciri-ciri sosio-ekonomis, misalnya kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan dan kelompok sektor pertanian dan kelompok sektor industri/jasa. Seluruh pendapatan nasional dihasilkan oleh kedua kelompok masyarakat tersebut.

Temuan empiris Kaldor pada duabelas negara industri selama tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an diperoleh hasil bahwa terjadi angka korelasi yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan output manufaktur dan meningkatnya *return of scale* dalam aktivitas industri, terjadi angka korelasi yang tinggi antara pertumbuhan produktivitas sektor manufaktur dengan pertumbuhan output manufaktur karena faktor *economies of scale*, dan terjadi angka korelasi yang tinggi antara pertumbuhan output sektor manufaktur dengan pertumbuhan output sektor lain, khususnya sektor pertanian sehingga produktivitas dan standar kehidupan sektor pertanian meningkat. Berdasarkan temuan empiris tersebut, maka Kaldor menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung terutama pada pertumbuhan sektor industri. Sektor manufaktur yang sehat dan maju berarti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong industri manufaktur dalam negeri melalui berbagai kebijakan seperti pembelian barang-barang manufaktur, pembebasan pajak, bantuan regular, dan intensif (Pressman, 2000:216-217).

Menurut Djojohadikusumo (1994:53), Kuznets mendefinisikan pertumbuhan

ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ada tiga komponen pokok penting, yaitu kenaikan output nasional secara terus menerus, kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, dan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Kuznets memisahkan enam karakteristik proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk, tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi, tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi, kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku, dan pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets, didasarkan pada hasil studinya di sejumlah negara dalam perjalanan sejarahnya ke arah modernisasi. Hasil identifikasi, pemantauan, dan pengkajian mengenai fenomena pertumbuhan ekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa Barat sejak akhir abad XVIII dan selama abad XIX dan XX yang meluas ke Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan Jepang diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut ditandai dengan tiga pokok, yaitu laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam arti riil, persebaran angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya, dan pola persebaran penduduk (Djojohadikusumo, 1994:55). Selain ditandai peran industri manufaktur dan konstruksi, pertumbuhan ekonomi juga memerlukan peran modernisasi teknologi yang akan berdampak pada

kegiatan ekonomi modern yang melintasi batas-batas antarnegara sehingga akhirnya perekonomian berada dalam tahap interdependensi dan globalisasi.

Pendapatan nasional yang meningkat belum tentu menunjukkan keadaan yang menjadi lebih baik, karena pendapatan dapat terdistribusi secara tidak merata sehingga meskipun secara keseluruhan pendapatan menjadi lebih tinggi tetapi mungkin mayoritas rumah tangga keadaannya lebih buruk. Proses pertumbuhan ekonomi juga dapat mengakibatkan hasil buruk seperti urbanisasi, kriminalitas, kemacetan lalu lintas, dan polusi.

Menurut Sukirno (2006:268-270), berdasarkan pendapat Kaldor dan Kuznets ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu luas tanah termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, jumlah dan perkembangan penduduk, jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu, dan tingkat teknologi dan perbaikannya dari waktu ke waktu. Faktor luas tanah dan kekayaan dalam suatu negara adalah tetap, sehingga faktor tersebut kurang dianggap penting sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor jumlah dan perkembangan penduduk, tidak selalu dipandang akan memberikan sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi. Kelebihan penduduk menyebabkan suatu masyarakat kembali kepada taraf pembangunan yang lebih rendah. Penduduk dianggap memberikan kontribusi positif karena pertumbuhan penduduk memperluas pasar, perbaikan keterampilan dan kualitas penduduk menyebabkan arah positif pembangunan, dan penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam pembentukan modal.

Faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu pasti akan memberikan kontribusi positif kepada pembangunan ekonomi. Faktor tingkat

teknologi dan perbaikannya dari waktu ke waktu digunakan dengan mengadakan pembentukan modal sehingga antara faktor modal dan teknologi mempunyai kaitan erat (Kuznets dalam Pressman, 2000:177). Oleh karena itu, yang ideal bagi pembangunan ekonomi adalah pembentukan modal yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan teknologi atau yang disertai dengan perbaikan yang seperti itu. Kekurangan dalam penanaman modal akan menimbulkan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan masalah resesi yang lebih serius dari masa-masa sebelumnya. Menurut Arsyad (2004:17), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:  $\text{PDRB}_t$  adalah PDRB tahun ke t

$\text{PDRB}_{t-1}$  adalah PDRB tahun ke t-1

Berdasarkan rumus pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus mengetahui terlebih dahulu nilai PDRB masing-masing tahun. Menurut BPS (2009a:1-10), PDRB di Indonesia dihitung dan disajikan dengan menggunakan dua metode, yaitu PDRB menurut metode produksi atau lapangan usaha dan PDRB menurut metode penggunaan atau pengeluaran atau belanja. PDRB menurut metode produksi adalah PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB menurut metode produksi disebut juga sebagai PDRB menurut sektor atau lapangan usaha atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi penyediaan. PDRB menurut metode penggunaan adalah PDRB yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDRB menurut metode penggunaan disebut pula sebagai PDRB menurut pengeluaran atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan.

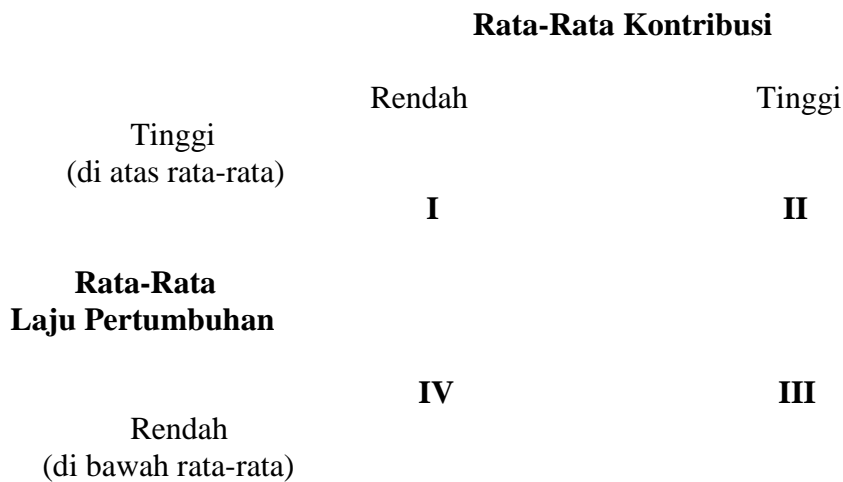
Menurut BPS (2009a:11-28), PDRB menurut metode produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produksi dari sembilan sektor produk, yaitu pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; transportasi dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa pemerintahan dan swasta. Menurut BPS (2009a:29-32), PDRB menurut metode penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Berdasarkan data PDRB dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisis Tipologi Klassen (Widodo, 2006:120-122 dan Dariwardani dan Amani, 2008:9). Teknik analisis Tipologi Klassen disajikan dalam bentuk diagram empat kuadran yang menggambarkan posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi masing-masing kabupaten/kota maka dapat ditentukan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam era otonomi daerah sebagai realisasi desentralisasi fiskal.

Posisi kabupaten/kota dalam diagram empat kuadran searah dengan putaran jarum jam, yaitu kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah). Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi kuadran I menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut berada pada posisi sebagai daerah berkembang karena rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tetapi rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota lebih kecil daripada rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi kuadran II menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut berada pada posisi sebagai daerah prima karena rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi kuadran III menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut berada pada posisi sebagai daerah potensial karena rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lebih kecil daripada rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tetapi rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada posisi kuadran IV menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut berada pada posisi sebagai daerah terbelakang karena rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota lebih kecil daripada rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota lebih kecil daripada rata-rata PDRB

Provinsi Jawa Tengah. Posisi 4 wilayah berdasarkan Tipologi Klassen ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut ini:



**Sumber:** (Widodo, 2006:120-122).

**Gambar 2.4**  
**POSISI WILAYAH BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN**

Berdasarkan teknik analisis Tipologi Klassen tersebut maka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan sebagai daerah prima apabila tumbuh cepat dan kontribusi besar, daerah potensial apabila tumbuh lambat tetapi kontribusi besar, daerah terbelakang apabila tumbuh lambat dan kontribusi kecil, dan daerah berkembang apabila tumbuh cepat tetapi kontribusi kecil. Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen dapat dikaitkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan untuk pengembangan ekonomi kabupaten/kota di masa mendatang dalam era otonomi daerah sehingga tujuan desentralisasi fiskal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat lebih mampu dan cepat tercapai.



## 2.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.5.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen dalam Pressman (2000:273), kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Pada tahun 1970an, standar kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto per kapita (GDP per kapita atau PDB per kapita) sebagai indikator pencerminan kemampuan penduduk dalam wilayah/negara tertentu dalam menghasilkan pendapatan menuai kritikan. Indikator PDB per kapita menunjukkan bahwa semakin besar PDB per kapita suatu negara, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut dan semakin kecil PDB per kapita suatu negara, semakin menurun kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

Indikator kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam PDB sehingga menjadi *purchasing power adjusted real* PDB. Formulasi PDB per kapita dengan memperhitungkan daya beli mengakibatkan PDB suatu wilayah menjadi lebih obyektif jika dibandingkan dengan PDB wilayah lain, namun tetap saja bahwa transformasi indikator PDB per kapita berdasarkan daya beli tetaplah dianggap subyektif karena ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sangat ekonomi dan kuantitatif. Hal inilah yang kemudian memunculkan ukuran-ukuran yang baru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan

#### **2.1.5.2. Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Secara umum, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach* (Sudarsono, 1982:360-361). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep di mana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat

kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda, misalnya, seseorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih produk A daripada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih produk A daripada produk B. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Menurut Sudarsono (1982:360), fungsi kesejahteraan masyarakat dirumuskan secara umum sebagai berikut:

$$W = f(U^A, U^B)$$

yang menunjukkan bahwa  $U^A$  dan  $U^B$  adalah daya guna (manfaat atau *utility*) golongan masyarakat A dan B sebagai fungsi daya guna individu.

Nilai *Wealth* ( $W$ ) akan meningkat apabila salah satu daya guna  $U^A$  atau  $U^B$  meningkat tanpa menurunkan daya guna orang lain. Fungsi ini menggambarkan

perbandingan fungsi kesejahteraan antarindividu yang sebelumnya tidak dapat ditentukan.

Menurut Arsyad (2004:32) dan Sukirno (2006:69-74), tingkat pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Kelemahan pertama meliputi kelemahan metodologis dan statistis dalam penghitungan pendapatan per kapita dengan nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Telah terjadi penafsiran yang salah/terlalu rendah terhadap negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan tersebar di berbagai pelosok sehingga tidak dimasukkan dalam variabel perhitungan pendapatan nasional dan nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan valuta asing tidak mencerminkan perbandingan harga kedua negara, walaupun dalam teori dikatakan nilai tukar menyatakan harga. Kelemahan kedua meliputi pengabaian faktor-faktor lain selain tingkat pendapatan, seperti faktor ekonomi, yaitu struktur umur penduduk, distribusi pendapatan timpang, corak pengeluaran masyarakat berbeda, dan faktor non ekonomi, yaitu adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat.

Untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut, Nordhaus dan Tobin mengenalkan *Net Economic Welfare* (NEW) dalam penghitungan pendapatan nasional (Arsyad, 2004:32-33). Indikator NEW menyempurnakan nilai PDB sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agar diperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu

dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah menambahkan pemanfaatan waktu senggang dan perekonomian sektor informal dalam penghitungan PDB. Koreksi negatif adalah mengurangi biaya kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan pembangunan dalam penghitungan PDB.

Menurut Sukirno (2006:70), kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu, Beckerman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis; kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara; dan kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet.

*United Nations Researh Institute for Social Development* menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita negara masing-masing (Sukirno, 2006:73). Delapan belas indikator tersebut adalah tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah, persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan, jumlah surat kabar, jumlah telepon, jumlah

radio, jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih, persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengakutan, pergudangan, dan transportasi, persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji, persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan, konsumsi energi per kapita, konsumsi listrik per kapita, konsumsi baja per kapita, nilai per kapita perdagangan luar negeri, produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian, dan pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau *Basic Need Approach*. PQLI merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belum memuaskan, karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2004:36-37). Untuk menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat, maka *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara/daerah maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh Sen pemenang nobel India, Haq seorang ekonom Pakistan, dan dibantu Ranis dari *Yale University* dan *London School of Economics*.

IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak. Dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan lamanya sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta dimensi standar hidup yang layak yang diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:59-64), konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas hidup. Formula penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [ X_1 + X_2 + X_3 ]$$

yang menunjukkan bahwa  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  masing-masing adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks tingkat kehidupan yang layak (BPS, 2009d:8).

Menurut BPS (2009d:9), secara konseptual angka harapan hidup (AHH) diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Hal ini sebagai bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berkaitan dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis secara langsung dapat memperpanjang usia hidup seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk.

AHH digunakan sebagai dasar untuk menghitung indeks kesehatan yang dianggap dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan masyarakat telah

menggunakan sumber daya masyarakat untuk memajukan kesehatan. Oleh karena itu, ditetapkan angka minimal dan maksimal dalam AHH. Berdasarkan standar UNDP, angka minimal dalam AHH ditetapkan sebesar 25 tahun, artinya seseorang diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 25 tahun meskipun dengan fasilitas kesehatan yang minimal. Berdasarkan standar UNDP, angka maksimal dalam AHH ditetapkan sebesar 85 tahun, artinya umur 85 tahun merupakan umur tertinggi bagi seseorang yang masih mempunyai makna dalam menikmati sisa hidupnya.

Menurut BPS (2009d:10), indeks pendidikan diwakili oleh sektor pendidikan dan merupakan salah satu komponen yang mengindikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup suatu masyarakat pada suatu daerah sehingga dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Indeks pendidikan diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka minimal untuk angka melek huruf adalah 0 (nol), artinya penduduk usia 15 tahun ke atas tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, sebaliknya apabila penduduk usia 15 tahun ke atas dengan mudah mengakses pendidikan, maka angka maksimal untuk angka melek huruf adalah 100. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka target pencapaian sebesar  $100-0 = 100$ . Rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Angka minimal untuk indikator ini adalah 0 (nol), artinya penduduk usia 15 tahun ke atas tidak mampu menempuh pendidikan formal, sebaliknya angka maksimal adalah 15, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikannya sampai lulus setara Sekolah Menengah Atas. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung



setelah masing-masing diberi bobot, yaitu angka melek huruf diberi bobot  $2/3$  (dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah diberi bobot  $1/3$  (sepertiga).

Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis. Tingkat melek huruf dihitung dari persentase populasi orang dewasa yang dapat menulis dan membaca. Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangannya, melek huruf diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini berkaitan langsung dengan seseorang dalam mendapatkan pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek huruf merupakan tolok ukur penting dalam menduga kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki

status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut BPS (2009d:11), indeks tingkat kehidupan yang layak diartikan sebagai jumlah pengeluaran yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per kapita per tahun. Konsumsi riil per kapita, yaitu jumlah pengeluaran per kapita yang benar-benar dipakai untuk mengkonsumsi satu paket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan non-makanan. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli adalah Rp732.720,- (batas maksimum) dan Rp300.000,- (batas minimum sampai dengan tahun 1996). Pada tahun 2002, dengan mengikuti kondisi pascakrisis ekonomi maka batas minimum disepakati menjadi Rp360.000,-. Data nilai maksimum dan minimum setiap komponen IPM disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM DARI SETIAP KOMPONEN IPM**  
**INDONESIA, TAHUN 2009**

No.	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3	Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4	Daya Beli	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 (1996) 360.000 <sup>b)</sup> 1999,2002	UNDP menggunakan PDB riil disesuaikan

**Sumber:** BPS (2009d:13).

**Keterangan:** a) Perkiraan maksimum pada akhir tahun PJP II tahun 2018.

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

Menurut BPS (2009d:3-5), penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar, dan menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan dan menjadi ukuran standar yang dapat dibandingkan antarwilayah atau antarnegara.

Menurut BPS (2009d:4), IPM sebagai manifestasi pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan. IPM yang memasukkan indeks kesehatan dan pendidikan dalam penghitungannya sangat tepat apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Dalam kondisi persaingan antarnegara dan antarbangsa yang sedemikian ketatnya, maka faktor kesehatan dan pendidikan sebagai pembentuk kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa menjadi unsur penting dalam meningkatkan potensi negara dan bangsa Indonesia.

Untuk meningkatkan IPM dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu dan pemerataan pembangunan sebagai syarat cukup karena dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh hasil bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan melalui distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk

kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh Korea Selatan yang telah sukses melakukan kedua tersebut dan Brasil yang telah gagal karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (BPS, 2009d:4).

IPM memiliki keterbatasan. Dengan memahami keterbatasan tersebut, diharapkan dapat menghindari kesalahan penggunaan IPM, dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan ketersediaan dan reliabilitas data, dan dapat digunakan dalam melakukan monitoring perkembangan pembangunan manusia. Keterbatasan IPM adalah bukan merupakan suatu ukuran yang komprehensif mengenai pembangunan manusia. Indeks tersebut hanya mencakup tiga aspek dari pembangunan manusia, tidak termasuk aspek penghargaan diri, kebebasan politik, dan masalah lingkungan. IPM tidak dapat menilai perkembangan pembangunan manusia dalam jangka pendek, karena dua komponennya, yaitu angka melek huruf dan angka harapan hidup, tidak responsif terhadap perubahan kebijakan dalam jangka pendek. IPM memasukkan variasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah, artinya IPM yang sama dari dua wilayah tidak mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki pembangunan manusia yang identik. Dengan kata lain, mungkin terdapat perbedaan bagaimana pembangunan manusia didistribusikan antarsubwilayah atau antarkelompok sosial.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan perhitungan fisik, namun juga faktor-faktor non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, ekonomi khususnya tingkat konsumsi per kapita, angka kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa (Arsyad, 2004:38). Dalam studi ini, untuk mengukur kesejahteraan

masyarakat, selain menggunakan IPM juga menggunakan indikator kesejahteraan sosial (non moneter) lainnya yang berupa angka kriminalitas. Untuk menyeragamkan indikator angka kriminalitas antardaerah maka disusun Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) sebagai rasio antara banyaknya kejahatan per 1.000 penduduk. Pembagi per 1.000 penduduk digunakan untuk menyeragamkan indikator angka kriminalitas antardaerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (BPS:2009b).

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Secara yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Secara kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum atau perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut BPS (2006b), jenis kejahatan adalah perampokan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pengrusakan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, kebakaran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu, pengeroyokan, dan narkotik.

Penggunaan kedua indikator kesejahteraan masyarakat (IPM dan IKD) untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi positif (indikator IPM) dan sisi

negatif (indikator IKD). Sisi positif indikator IPM menunjukkan bahwa semakin tinggi angka IPM maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan sebaliknya. Sisi negatif indikator IKD menunjukkan bahwa semakin tinggi angka IKD maka kesejahteraan masyarakat semakin menurun, dan sebaliknya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Oleh karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan; peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil tetapi juga menumbuhkan harga diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan; dan perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

*World Bank* pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006:22-24). Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular,

penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs dapat menjadi arah layanan kepada masyarakat dari pemerintah dalam satu pintu dalam mengurus perijinan berupa satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baru yang dapat berupa Badan/Dinas/Kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Badan sebagai unsur penunjang dan koordinasi kegiatan SKPD, dinas sebagai unsur pelaksana urusan, dan kantor sebagai unsur pelaksana urusan dengan eselon lebih rendah daripada dinas.

Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*). Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat secara lebih merata.

Menurut Sen dalam Pressman (2000:272), ekonomi kesejahteraan tidak hanya mencakup tentang konsumsi tetapi juga pengembangan potensi manusia karena ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk manusia daripada berusaha memproduksi lebih banyak barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas atau memahami bagaimana cara masyarakat memaksimalkan kepuasan secara rasional. Sen mengkritik pendapat mengenai ekonomi kesejahteraan yang hanya membahas

tentang produksi barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas karena tindakan tersebut mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik.

Ekonomi kesejahteraan yang hanya membahas bagaimana cara masyarakat memaksimalkan kepuasan secara rasional seperti yang dijelaskan dalam Pareto Optimum mengakibatkan dampak yang tidak baik. Sebagai contoh, dalam kasus ada sekelompok orang kaya dan ada sekelompok orang miskin yang kelaparan. Hal ini mungkin merupakan kondisi Pareto Optimum karena situasinya tidak dapat diperbaiki tanpa mengambil pendapatan dari orang kaya dan mengurangi kepuasannya, namun banyaknya orang miskin yang kelaparan jelas bukan merupakan hasil yang diinginkan. kesejahteraan masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat masyarakat lakukan dengan baik.

Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya tetapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi karena makanan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik (demokrasi). Kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki orang dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut.

## **2.2. Studi Terdahulu**

Dalam kajian empiris ini akan dijelaskan studi terdahulu yang berkaitan dengan studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan



ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### 1. Vazques dan Robert M. McNab

Vazques dan Robert M. McNab dalam *Fiscal Decentralization, Economics Growth, and Democratic Governance* meneliti implementasi desentralisasi fiskal dengan studi kasus di beberapa negara sedang berkembang dan negara transisi (1997). Hasil desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terjadinya kelemahan pada lembaga, tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan menyebabkan ketidakefisienan pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota atau pemerintahan yang berada pada tingkat yang lebih rendah di daerah.

#### 2. Parhah

Parhah meneliti tentang Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Data *Cross-Section* Tahun 2002 (2002). Kesimpulan hasil studi Parhah adalah desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan indikator Akai dan Sakata yang digunakan dalam mengukur implementasi desentralisasi fiskal belum mampu menjelaskan desentralisasi fiskal di Indonesia.

#### 3. Mursinto

Mursinto melakukan studi tentang Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan serta Elastisitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur (2004). Hasil studi Mursinto menunjukkan bahwa PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah

(TPD) masing-masing antara 3,07% sampai dengan 32,66%, 5,85% sampai dengan 29,92%, dan 45,82% sampai dengan 88,85%.

Hasil lain menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) masing-masing antara 3,39% sampai dengan 35,59% dan antara 4,68% sampai dengan 50,84%; kontribusi PAD dan BHPBP terhadap PTD dan PRD masing-masing antara 10,86% sampai dengan 59,96% dan antara 11,59% sampai dengan 67,39%. Kesimpulan studi Mursinto menunjukkan bahwa berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal inilah yang menurut Green disebut sebagai desentralisasi administratif (Green, 2005: 4-6), Kassum (2003: 13-16), dan Mubyarto (2001:83-86).

#### 4. Ismail, Muhammad Zilal Hamzah, dan Jhon Tafbu Ritonga

Ismail, Muhammad Zilal Hamzah, dan Jhon Tafbu Ritonga meneliti tentang *Fiscal Decentralization And Economic Growth: Evidence From Selected Muslim Countries* (2004). Studi Ismail dkk menguji efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Islam. Dengan menggunakan analisis ekonometri berdasarkan data panel di 4 negara Islam yang terpilih sebagai sampel, Ismail dkk menemukan hasil studi bahwa desentralisasi penerimaan lebih besar daripada desentralisasi pengeluaran dan indikator produksi-penerimaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil studi juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai peran di beberapa negara tersebut, khususnya dalam keterbukaan ekonomi yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 5. Adi

Adi (2005b) melakukan studi tentang Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap

Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan studi kasus di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Hasil studi Adi menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan daerah menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Namun demikian, hasil studi ini menunjukkan tidak semua daerah benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal.

Data awal dari temuan Adi menunjukkan ada 46% daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata. Faktor inilah yang diindikasikan sebagai alasan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang positif antardaerah setelah memasuki era desentralisasi fiskal. Namun demikian, apabila dilakukan analisis secara parsial, perbedaan yang terjadi hanya beberapa daerah saja. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang diindikasi kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang signifikan.

Terkait dengan hal tersebut, alokasi belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat. Belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan PAD relatif terjamin, namun demikian yang paling diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal ini investor (para pemilik modal). Belanja ini hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata dengan mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi.

6. Suryanto, Dhani Agung darmawan, dan Sukarna Wiranta

Suryanto dkk meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi Anggaran (2005). Menurut Suryanto dkk, pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di wilayah studi. Gambaran terhadap kondisi desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan secara deskriptif. Hasil studi Suryanto menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

7. Vazques dan Mark Rider

Vazques dan Mark Rider meneliti tentang *Fiscal Decentralization and Economics Growth: A Comparative Study of China and India* (2006). Hasil studi Vazques dan Mark Rider menunjukkan bahwa model desentralisasi fiskal yang diimplementasikan di China dan India ada perbedaan dan kesamaan. Misalnya, dalam hal defisit anggaran, pemerintah lokal di China tidak boleh menjalankan anggaran defisit dan dengan demikian tidak boleh membiayai defisit anggaran dengan pinjaman, sedang pemerintah lokal di India boleh menjalankan anggaran defisit dan diperbolehkan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman. Sekalipun Pemerintah China dan India berbeda dalam hal implementasi desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan anggaran tetapi Pemerintah China dan India mempunyai kesamaan dalam hal desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan implementasi yang secara simpel dan bertahap tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara *big-bang* dan rumit.

#### 8. Suhendra dan Hidayat Amir

Suhendra dan Hidayat Amir menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal selama 5 tahun pertama sejak 1 Januari 2001 masih lemah tetapi dalam kondisi menuju yang ideal (2006). Beberapa hal yang menjadi isu temuan Suhendra dan Hidayat Amir adalah kekuatan dan peranan perpajakan di tingkat lokal kabupaten/kota masih rendah karena pemerintah kabupaten/kota masih bergantung dari pemerintah pusat; penentuan formula dalam Dana Alokasi Umum (DAU) berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, peran DAU menjadi kurang signifikan karena kepentingan politik lebih berperan; tekanan transfer lokal membutuhkan pendekatan keseimbangan agar otonomi daerah menjadi lebih kuat dan menjadi insentif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang akuntabel; dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antarpemerintah provinsi, antara pemerintah kabupaten dan kota, antarpemerintah kabupaten, dan antarpemerintah kota.

#### 9. Akai, Yukihiro Nishimura, dan Masayo Sakata

Akai dkk meneliti tentang *Fiscal Decentralization and Economic Volatility: Evidence from State-level Cross-section Data of the United States* (2007). Studi ini membahas teori yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mengurangi varian dari pertumbuhan GDP. Untuk itu, Akai, Yukihiro Nishimura, dan Masayo Sakata menguji teori tersebut dengan menggunakan data panel dari 50 negara bagian di Amerika Serikat selama tahun 1992 s.d 1997. Hasil studi Akai dkk mendukung spesifikasi teori fungsi produksi dan ada hubungan negatif yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan kelabilan ekonomi. Oleh karena itu, apabila

desentralisasi fiskal meningkat maka kelabilan ekonomi akan menurun dan apabila desentralisasi fiskal menurun maka kelabilan ekonomi akan meningkat.

#### 10. Nasution

Nasution melakukan studi tentang Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam (2007). Studi ini menggunakan indikator-indikator sebagai ukuran variabel, yaitu variabel Kemampuan Pemerintah diukur dengan indikator PAD dan Belanja Modal, variabel Perkembangan Ekonomi diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Tingkat Daya Beli/Pendapatan, dan Angka Kriminalitas. Model analisis data adalah *Partial Least Square* (PLS) karena model analisisnya berjenjang dan model persamaan *structural* memenuhi model rekursif, variabelnya laten, dan *sample size* tidak memenuhi untuk menggunakan *Structural Equation Model* berbasis kovarian.

Kesimpulan hasil studi Nasution adalah kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan *p-value* = 0,00, artinya apabila tingkat kemampuan pemerintah meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan *p-value* = 0,00, artinya apabila perkembangan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; dan kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan ekonomi dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur

0,0997 dengan  $p\text{-value} = 0,0001$ , artinya apabila kemampuan pemerintah meningkat maka perkembangan ekonomi Kota Batam juga meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam ditunjukkan dengan peningkatan pada Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Tingkat Daya Beli/Pendapatan, dan penurunan pada Angka Kriminalitas.

#### 11. Widhiyanto

Widhiyanto melakukan studi tentang *Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity* berdasarkan data tahun 1994 s.d 2004 (2008). Hasil studi Widhiyanto menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis dan model regresi, desentralisasi fiskal di Indonesia selain mampu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi juga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan regional per kapita (PDRB per kapita). Hasil studi Widhiyanto ini bertentangan dengan hasil studi yang dilakukan di negara sedang berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi tetapi tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan regional per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita atau PDRB per kapita).

#### 12. Wibowo

Wibowo meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (2008). Studi dilakukan dengan populasi semua provinsi (kecuali Provinsi DKI) di Indonesia tahun 1999 s.d 2004 dengan analisis regresi. Kesimpulan hasil studi Wibowo adalah dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect*, studi Wibowo menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004.

Hasil studi Wibowo juga menunjukkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskal sebelumnya. Diperlukan analisis yang lebih cermat untuk mengamati hubungan antara otonomi fiskal yang diperlihatkan dengan indikator PAD sebagai proksi dengan performa pembangunan daerah yang diukur dengan PDRB. Hal ini karena studi ini memperlihatkan bahwa sebelum tahun 2001, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah negatif, sehingga bertolak belakang dengan hasil studi terdahulu.

Otonomi fiskal cenderung membaik pada era sesudah tahun 2001 yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah seiring dengan penerapan otonomi fiskal. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang *favourable* sebelum periode reformasi fiskal, yaitu kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah dan monitoring pemerintah pusat atas penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

### 13. Sasana

Sasana meneliti tentang Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2009). Studi dilakukan dengan populasi semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2005 dengan analisis jalur. Kesimpulan hasil studi Sasana adalah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap tenaga kerja terserap di



kabupaten/kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah, tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

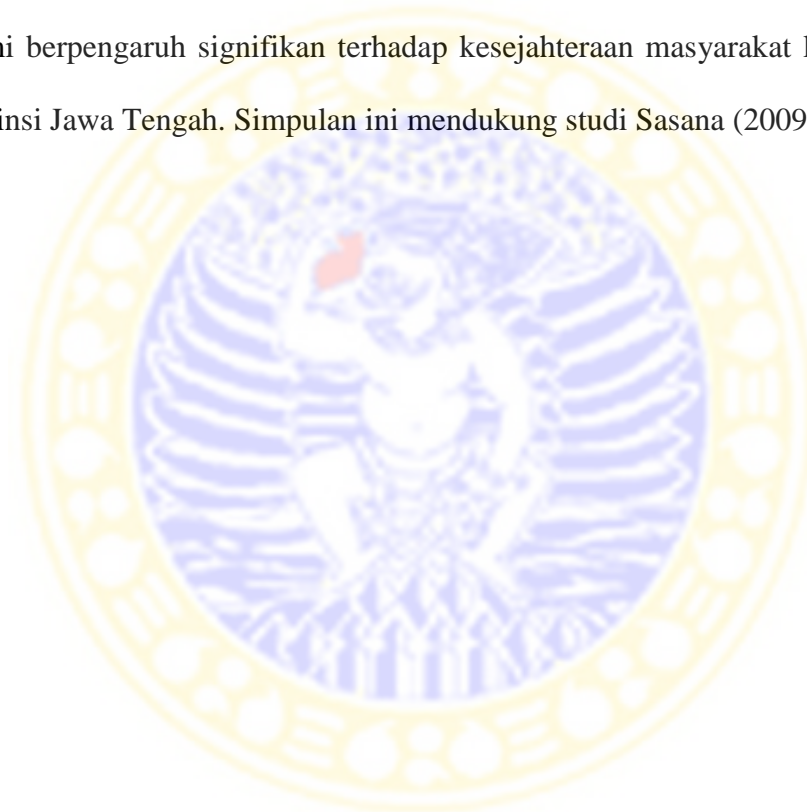
#### 14. Priyarsono, DS., Budi Asih, dan Neli Agustina

Priyarsono dkk meneliti tentang Desentralisasi Fiskal, *Tax Effort*, dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001 s.d 2008 (2010). Studi dilakukan dengan populasi semua kabupaten/kota, menggunakan model analisis regresi dengan *polled* data gabungan antara *time series* dan *cross section*. Kesimpulan hasil studi Priyarsono dkk adalah kinerja keuangan daerah di Indonesia masih rendah, baik ditinjau dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran, alokasi belanja rutin masih mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan, sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sehingga kemandirian daerah belum optimal, dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan *tax effort*, pengaruh DAU lebih besar daripada komponen dana perimbangan lainnya dalam mempengaruhi peningkatan *tax effort*, serta PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 15. Badrudin

Badrudin meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan

Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2011). Studi tersebut dilakukan menggunakan data tahun 2001 s.d 2008 dengan populasi semua kabupaten/kota, menggunakan model analisis regresi dengan *polled* data gabungan antara *time series* dan *cross section*. Kesimpulan hasil studi Badrudin adalah belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung studi Prud'Homme Remy (1994), Adi (2005b), Suryanto (2005), serta Suhendra dan Hidayat Amir (2006). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung studi Sasana (2009). Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung studi Sasana (2009).



### **BAB 3**

## **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

### **3.1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan alur pikir untuk memudahkan dalam memahami tujuan studi yang ingin dicapai. Kerangka konseptual disusun berdasarkan kerangka proses berpikir. Kerangka proses berpikir disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, dan tinjauan pustaka. Dalam melakukan analisis permasalahan dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan deduktif (studi teoritik) dan induktif (studi empirik). Pendekatan deduktif adalah pendekatan dalam menganalisis permasalahan dalam studi dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus untuk memperjelas wawasan dalam melakukan analisis melalui studi teoritik. Dalam pendekatan ini akan diperoleh kesimpulan dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus. Pendekatan induktif adalah pendekatan dalam menganalisis permasalahan dalam studi dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum untuk memperjelas wawasan dalam melakukan analisis melalui studi empirik. Dalam pendekatan ini akan diperoleh kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan pendekatan deduktif dan induktif yang saling berhubungan dan bersifat bolak-balik yang ditunjukkan dengan dua arah anak panah, diharapkan penulis akan memperoleh gambaran konsep berpikir yang sesuai dengan landasan teoritik dan empirik yang telah dibangun, sehingga penulis mampu berpikir sesuai dengan landasan teoritik dan empirik tersebut. Berdasarkan hasil sintesis dari

proses berpikir deduktif dan induktif, maka dirumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan penting yang menggambarkan suatu kondisi yang akan diteliti atau dikaji. Dalam pernyataan itu terkandung jawaban sementara yang akan diteliti atau dikaji kebenarannya melalui uji statistik. Disebut jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan uji statistik dengan menggunakan alat yang relevan, yaitu *Partial Least Square (PLS)*.

Uji statistik dengan PLS memberikan informasi tentang pembuktian hipotesis yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga diperoleh temuan teoritis yang akan memberikan kontribusi terhadap studi teoritik yang mendukung atau menolak dan/atau mengembangkan studi teoritik yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Teori Ekonomi Publik, Teori Desentralisasi Fiskal, Teori Pengeluaran Pemerintah, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dan Teori Kesejahteraan Masyarakat sebagai sebuah karya akademik disertasi (ditunjukkan oleh arah anak panah ke arah studi teoritik). Di samping itu, disertasi juga akan memberikan kontribusi terhadap studi empirik berupa temuan empiris sebagai acuan studi selanjutnya, sebagai saran/rekomendasi untuk pengambilan keputusan secara praktis, dan memperkaya studi-studi sebelumnya, seperti studi Vazques (1997 dan 2006), Parhah (2002), Mursinto (2004), Ismail dkk (2004), Adi (2005b), Suryanto dkk (2005), Suhendra (2006), Akai dkk (2007), Nasution (2007), Widhiyanto (2008), Wibowo (2008), Sasana (2009), Priyarsono dkk (2010), dan Badrudin (2011) (ditunjukkan oleh arah anak panah ke arah studi empirik). Berdasarkan uraian tersebut kiranya dapat menunjukkan bagaimana proses berpikir penulis, sehingga studi ini memiliki arah yang jelas

dengan dasar-dasar teoritik dan empirik yang ilmiah dan rasional.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, dan tinjauan pustaka sebagai dasar kerangka proses berpikir maka dirancang sebuah kerangka konseptual seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2 di halaman 117. Kerangka konseptual menjelaskan pengaruh antarvariabel, yaitu variabel eksogen terhadap variabel endogen, baik variabel endogen intervening maupun variabel endogen tergantung, yaitu pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dasar penyusunan kerangka konseptual pada studi ini diawali dari logika dan proses berpikir mengenai hubungan antarkonsep yang secara ringkas dijelaskan pada kerangka proses berpikir Gambar 3.1 di halaman 116.

#### 1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal

Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pengeluaran Total APBD. Pengeluaran Total APBD meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan. Belanja Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Belanja Langsung terdapat komponen Belanja Modal. Oleh karena tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat



**Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERPIKIR**



**Keterangan:**  
 ○ : Variabel Laten                                : Pengaruh Variabel  
 □ : Indikator                                         : Dimensi Pengukur

**Gambar 3.2 KERANGKA KONSEPTUAL**

maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran Belanja Langsung termasuk Belanja Modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Langsung yang di dalamnya terdapat komponen Belanja Modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

2. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak

dan Bukan Pajak dengan Pengeluaran Total APBD. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan, misalnya untuk membayar gaji pegawai negeri dan honorarium sebagai kompensasi bagi pegawai negeri terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan di daerah. Penerimaan gaji pegawai negeri dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

### 3. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat

Dimensi ekonomi dari suatu kebijakan keuangan publik adalah stabilitas makro ekonomi, keadilan (*equity*), dan efisiensi (Musgrave *and* Musgrave, 1989:6). Aspek efisiensi merupakan *raison d'etre* untuk desentralisasi fiskal. Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Usman, 2001:24). Argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para penduduk dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat (Hirawan,



2007:10), (Adi dkk, 2005a:16-22), dan (Susanto, 2004:4-16).

#### 4. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

#### 5. Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia.

#### 6. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke

waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, dan lebih berpendidikan yang menunjukkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta terjadi pula penurunan angka kriminalitas yang menunjukkan indikator Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) sebagai Indikator Sosial (Arsyad, 2004:38). IPM dan IKD merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

### 3.2. Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori, dan Studi Sebelumnya seperti yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB 4 METODE PENELITIAN**

### **4.1. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai rencana tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi arti terhadap data tersebut. Rancangan penelitian meliputi tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan, penentuan alat (instrumen) analisis yang digunakan, dan analisis terhadap data yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka tipologi studi ini adalah eksplanatori, yaitu studi yang dirancang melalui tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan, penentuan alat (instrumen) analisis yang digunakan, dan analisis terhadap data yang digunakan, serta tipologi studi kausalitas, yaitu studi yang menganalisis hubungan kausalitas antarvariabel penelitian (Singarimbun, 1995:51).

### **4.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel**

Menurut Cooper dan Emory (1996:214), ide dasar pengambilan sampel adalah menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi agar kesimpulan tentang karakteristik populasi dapat diperoleh. Kemudian dijelaskan bahwa sebuah elemen adalah subyek di mana pengukuran tersebut dilakukan. Hal ini disebut dengan unit penelitian (*the unit of study*). Keunggulan ekonomis pengambilan sampel dibandingkan dengan sensus sangat besar, terutama pertimbangan biaya dan waktu. Namun, karena mengabaikan pertimbangan biaya dan waktu, maka studi ini menggunakan sensus.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (<http://www.kppod.go.id>) jumlah kabupaten/kota sampai dengan tahun 2008 adalah 497 yang meliputi 399 kabupaten dan 98 kota. Sensus dalam studi ini adalah

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan studi yang hanya meneliti kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran wilayah sehingga akan terlihat originalitas atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan 1 Januari 2001.

Jumlah kabupaten/kota se Indonesia per provinsi berdasarkan data KPPOD sampai dengan tahun 2008 ditunjukkan pada Tabel 4.1 di halaman 123. Tampak provinsi yang sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Di antara keempat provinsi tersebut, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 1 kabupaten (Kabupaten Kepulauan Seribu) dan 5 kota (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat) tetapi tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota untuk masing-masing kabupaten/kota.

Provinsi DKI Jakarta hanya mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, anggaran pemerintah merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif, legislatif, dan rakyat. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai 1 kabupaten dan 5 kota tetapi tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tidak mencerminkan sistem pemerintahan yang demokratis sehingga Provinsi DKI Jakarta tidak layak untuk dipilih sebagai sampel dalam studi ini. Hal itu didasarkan pendapat Kohli (1987:220-221) yang menyatakan bahwa demokrasi-demokrasi Dunia Ketiga yang telah mapan dapat memudahkan pembangunan ekonomi. Berarti tanpa adanya

**Tabel 4.1**  
**RINCIAN PEMEKARAN WILAYAH UNTUK DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DI INDONESIA**  
**SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

NO	Provinsi	JUMLAH DAERAH OTONOM BARU			
		PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	TOTAL
1	Nangroe Aceh Darusalam	0	10	3	13
2	Sumatera Utara	0	12	2	14
3	Sumatera Barat	0	4	1	5
4	Riau	0	6	1	7
5	Jambi	0	4	1	5
6	Sumatera Selatan	0	5	3	8
7	Bengkulu	0	6	0	6
8	Lampung	0	6	1	7
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	0	5
10	Kep. Riau	1	4	2	7
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	4	5
13	Jawa Tengah	0	0	0	0
14	Banten	1	0	3	4
15	Jawa Timur	0	0	1	1
16	DI Yogyakarta	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	1	3
19	Nusa Tenggara Timur	0	8	0	8
20	Kalimantan Barat	0	6	1	7
21	Kalimantan Tengah	0	8	0	8
22	Kalimantan Selatan	0	2	1	3
23	Kalimantan Timur	0	6	1	7
24	Sulawesi Utara	0	8	2	10
25	Sulawesi Tengah	0	6	0	6
26	Sulawesi Selatan	0	3	1	4
27	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7
28	Gorontalo	1	4	0	5
29	Sulawesi Barat	1	2	0	3
30	Maluku	0	7	1	8
31	Maluku Utara	1	5	2	8
32	Papua	0	22	0	22
33	Papua Barat	1	7	1	9
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>164</b>	<b>34</b>	<b>205</b>

Sumber: <http://www.kppod.go.id>., download 19 Agustus 2010.

demokrasi yang ditunjukkan dengan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil

rakyat dalam anggota dewan (DPRD) maka pembangunan ekonomi menjadi lebih sulit dan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tinggal 3 provinsi yang sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Di antara ketiga provinsi tersebut, hanya Provinsi Jawa Tengah yang layak dipilih sebagai unit analisis dalam studi ini. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak layak dipilih sebagai unit analisis dalam studi ini karena wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga keragaman geografi obyek studi menjadi minimalis. Homogennya geografi antara kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian wilayah geografis Provinsi Jawa Tengah tetapi secara administratif pemerintahan merupakan daerah yang berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi dan menyandang Daerah Istimewa karena aspek historis. Dengan demikian, dengan tidak memilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit analisis dalam studi ini tidak akan mengurangi makna studi. Provinsi Bali tidak layak dipilih sebagai unit analisis dalam studi ini karena wilayah Provinsi Bali hanya terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota yang lebih sedikit unit analisisnya daripada jumlah unit analisis di Provinsi Jawa Tengah dengan 29 kabupaten dan 6 kota.

Tahapan dalam memilih unit analisis adalah dimulai dengan menyebutkan populasi (33 provinsi, 497 kabupaten/kota), kemudian memilih provinsi yang sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut (diperoleh 4 provinsi, 55 kabupaten/kota) kemudian memilih provinsi yang mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

untuk masing-masing kabupaten/kota (diperoleh 3 provinsi, 49 kabupaten/kota), kemudian memilih seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, jumlah unit analisis dalam studi ini 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan pengambilan data yang runtut dari tahun 2004 sampai dengan 2008, maka data berbentuk *time series*. Berdasarkan jumlah sampel kabupaten/kota sebanyak 35 kabupaten/kota maka data berbentuk *cross section*. Dengan demikian, data yang digunakan dalam studi ini merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section* (*pooled the data*). Pemenuhan kondisi data ini agar dalam menggunakan model analisis *Partial Least Square* (PLS) memenuhi persyaratan untuk dioperasionalkan.

Pembatasan dalam variabel mendasarkan pada topik studi tentang desentralisasi fiskal yang disebutkan sebagai alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi fiskal akan diwujudkan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya DPRD yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah; memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional; meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; memperbaiki keseimbangan fiskal antardaerah dan memastikan adanya layanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Sidik, 2002). Oleh

karena itu, variabel yang dipilih dalam studi ini berkaitan dengan desentralisasi fiskal sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan tersebut. Variabel tersebut adalah desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Studi ini menggunakan tahun awal 2004 agar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat perkembangannya setelah melaksanakan otonomi daerah selama 3 tahun dari tahun 2001. Akhir waktu data studi adalah tahun 2008 karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir terjadinya pemekaran wilayah provinsi/kabupaten/kota sebelum moratorium pemekaran wilayah pada tahun 2009. Dengan demikian, tergenapi 5 tahun sejak awal waktu studi tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Lima tahun adalah jumlah waktu studi yang berkaitan dengan data *time series* dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dan 35 kabupaten/kota adalah jumlah unit analisis yang berkaitan dengan data *cross section*. Dengan menggunakan *pooled data* sebagai gabungan antara data *times series* dan *cross section* maka diperoleh 175 jumlah n (data).

### **4.3. Variabel Penelitian**

#### **4.3.1. Klasifikasi Variabel**

Klasifikasi variabel didasarkan atas kajian teoritis dan empiris sebagai acuan kerangka berpikir yang terdiri dua variabel, yaitu:

1. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi operasi dalam suatu model ekonomi dan variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh setiap hubungan yang digambarkan dalam model tersebut. Variabel eksogen dalam studi ini adalah desentralisasi fiskal (X).



2. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen.

Variabel endogen dalam studi ini meliputi:

- a. Variabel endogen intervening adalah variabel yang ikut berpengaruh ketika variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen tergantung. Variabel endogen intervening dalam studi ini adalah belanja modal (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2).
- b. Variabel endogen tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen maupun variabel endogen intervening. Variabel endogen tergantung dalam studi ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y3).

#### 4.3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional setiap variabel yang berhubungan dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

##### 1. Desentralisasi Fiskal (X)

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang fiskal oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD yang dinyatakan dalam satuan persen. Pengertian PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Pengeluaran Total sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

##### 2. Belanja Modal (Y1)

Dalam studi ini, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Penggunaan variabel belanja modal dalam studi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) dan (2). Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan persen. Penggunaan data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Pengeluaran Total pada APBD kabupaten/kota dalam harga berlaku (Mursinto, 2004 dan Sasana, 2009). Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:  $\text{PDRB}_t$  adalah PDRB tahun ke t

$\text{PDRB}_{t-1}$  adalah PDRB tahun ke t-1

#### 4. Kesejahteraan Masyarakat (Y3)

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dinyatakan dalam satuan indeks. Variabel kesejahteraan masyarakat sebagai variabel laten dalam studi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD). Dalam studi ini, data IPM dan IKD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS. Jadi penulis menggunakan data IPM dan IKD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai data sekunder yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh BPS. Agar hasil olah data dengan alat analisis sesuai dengan tujuan penggunaan kedua indikator kesejahteraan masyarakat tersebut, maka dalam input data untuk data IPM yang semakin tinggi diberi skor yang semakin tinggi dan untuk data IKD yang semakin tinggi diberi skor yang semakin rendah.

#### 4.4. Lokasi dan Waktu Studi

Lokasi studi adalah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 s.d 2008, sedang waktu studi dilakukan pada tahun 2011. Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi studi karena Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran

wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Tahun 2004 dipilih agar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat perkembangannya setelah melaksanakan otonomi daerah selama 3 tahun dari tahun 2001 dan tahun 2008 dipilih karena merupakan tahun terakhir terjadinya pemekaran wilayah provinsi/kabupaten/kota sebelum moratorium pemekaran wilayah pada tahun 2009.

#### **4.5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam studi ini data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku teks dan berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait, seperti Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Badan Pusat Statistik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### **4.6. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan studi. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Data dan artikel pendukung studi dikumpulkan melalui *website* yang berupa referensi dari buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan studi. Dengan demikian, prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan metode dokumenter.

## 4.7. Model dan Teknik Analisis

### 4.7.1. Model Analisis

Model analisis *Partial Least Square* (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedang model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Perbedaan mendasar PLS sebagai SEM berbasis varian dengan AMOS dan LISREL sebagai SEM berbasis kovarian adalah SEM berbasis varian bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori, sedang SEM berbasis kovarian bertujuan untuk mengestimasi model untuk pengujian atau konfirmasi teori (Abdillah dan Jogiyanto, 2009:14-15).

Model prediksi adalah pengujian statistika yang bertujuan menguji efek prediksi antarvariabel laten untuk melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antarvariabel tersebut. Konsekuensi penggunaan model prediksi adalah pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi, dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Oleh karena itu, model prediksi sangat tepat dilakukan pada studi yang bertujuan mengembangkan teori. Model estimasi adalah pengujian statistika yang bertujuan mengestimasi model teoritikal yang dibangun dengan mengukur kelaikan model pada jenjang variabel laten dan parameter yang diestimasi atau indikatornya. Konsekuensi penggunaan model estimasi adalah pengujian menuntut basis teori yang kuat, berbagai asumsi yang rigid, dan kelaikan model menjadi ukuran utama (*goodness-of-fit model*). Oleh karena itu, model estimasi sangat tepat digunakan untuk menguji

teori dan mendapatkan justifikasi terhadap pengujian tersebut dengan serangkaian hasil statistika yang kompleks (Abdillah dan Jogiyanto, 2009:20).

Model analisis PLS dipilih sebagai model analisis dalam studi ini karena merupakan metode alternatif penyelesaian model berjenjang yang rumit yang tidak mensyaratkan jumlah sampel yang banyak, model struktural yang memenuhi persyaratan model rekursif atau model pengaruh satu arah, model yang mampu melibatkan penggunaan variabel terukur dan laten, dan mempunyai implikasi yang optimal dalam ketepatan prediksi karena kemampuannya dalam memprediksi model untuk pengembangan teori. Metode dalam model analisis PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak mengasumsikan skala pengukuran data yang digunakan untuk mengkonfirmasi teori.

Model PLS dibentuk dengan *inner model* dan *outer model* (Ghozali, 2006: 17-26). *Inner model* (*inner relation, structural model, substantive theory*) merupakan model dalam PLS yang menspesifikasi hubungan antarvariabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\eta = \beta_0 + \beta\eta + \Gamma\xi + \zeta \quad (\text{persamaan 4.1})$$

yang menunjukkan bahwa:

$\eta$  = vektor endogen (dependen) variabel laten

$\xi$  = vektor variabel laten eksogen

$\zeta$  = vektor variabel residual (*unexplained variance*)

Oleh karena PLS didesain untuk model *recursive* (sistem aliran kausal ke satu arah), maka hubungan antarvariabel laten sering disebut *causal chain system* dari variabel laten dan dispesifikasikan sebagai berikut:

$$\eta_j = \sum_i \beta_{ji} \eta_i + \sum_i \gamma_{ib} \xi_{ib} + \zeta_j \quad (\text{persamaan 4.2})$$

yang menunjukkan bahwa:

$\beta_{ji}$  dan  $\gamma_{ib}$  = koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten eksogen

$\eta$  dan  $\xi$  sepanjang range indeks  $i$  dan  $b$

$\zeta_j$  = *inner variabel residuals*

*Outer model (outer relation, measurement model)* merupakan model dalam PLS yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan setiap blok indikator atau variabel *manifest*. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$x = A_x \xi + \varepsilon_x \quad (\text{persamaan 4.3a})$$

$$y = A_y \eta + \varepsilon_y \quad (\text{persamaan 4.3b})$$

yang menunjukkan bahwa:

$x$  dan  $y$  = indikator atau variabel *manifest* untuk variabel laten eksogen dan endogen  $\xi$  dan  $\eta$

$A_x$  dan  $A_y$  = matriks *loading* yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya

$\varepsilon_x$  dan  $\varepsilon_y$  = residual yang dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran

Studi ini menggunakan indikator refleksif dalam variabel laten dimana *covariance* pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk laten. Pada model refleksif, konstruk unidimensional digambarkan dengan bentuk elips dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator.

Model ini menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk laten akan

mempengaruhi perubahan pada indikator. Model indikator refleksif harus memiliki internal konsistensi sehingga semua ukuran indikator yang mengukur suatu konstruk diasumsikan semuanya valid, sehingga dua ukuran indikator yang sama reliabilitasnya dapat saling dipertukarkan. Walaupun reliabilitas suatu konstruk rendah jika hanya ada sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan berubah jika satu indikator dihilangkan. Artinya, penghilangan satu indikator tidak akan mengubah nilai konstruk berdasarkan model indikator yang refleksif tersebut.

#### 4.7.2. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam pengujian hipotesis dalam studi ini menggunakan PLS. PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu (nominal, ordinal, interval, dan rasio) dan ukuran sampel tidak harus besar. Teknik analisis menggunakan PLS disusun berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merancang model struktural (*inner model*)

*Inner model* menggambarkan hubungan antarvariabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Perancangan model struktural hubungan antarvariabel laten didasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis. Pada PLS, perancangan *inner model* dapat menggunakan teori, hasil studi empiris, analogi (hubungan antarvariabel pada bidang ilmu lain), normatif (misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya).

2. Merancang model pengukuran (*outer model*)

*Outer model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Perancangan model pengukuran menentukan sifat



indikator dari masing-masing variabel laten (refleksif) dan berdasarkan teori, hasil studi empiris, rasional, dan definisi operasional variabel.

### 3. Mengkonstruksi diagram jalur

Konstruksi diagram jalur dalam studi ini disusun berdasarkan Kerangka Konseptual di halaman 117. Konstruksi diagram jalur disajikan pada Gambar 4.1.

**Keterangan:**

: Variabel Laten	: Pengaruh Variabel
: Indikator	: Dimensi Pengukur

**Gambar 4.1**  
**KONSTRUKSI DIAGRAM JALUR**

### 4. Mengkonversi diagram jalur ke persamaan

Konversi diagram jalur ke persamaan dilakukan dengan menyusun *inner*

*model* dan *outer model*. Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disusun 2 persamaan:

1. Persamaan *Inner Model*:

$$\eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \beta_1 \eta_1 + \gamma_2 \eta_1 + \zeta_2$$

$$\eta_3 = \beta_2 \eta_2 + \beta_1 \eta_1 + \gamma_3 \xi_1 + \zeta_3$$

2. Persamaan *Outer Model*:

Untuk variabel laten eksogen (formatif)

$$x_1 = \lambda_{x1} \xi_1 + \delta_1$$

Untuk variabel laten endogen intervening 1 (formatif)

$$\xi_1 = \lambda_{y1} \eta_1 + \varepsilon_1$$

Untuk variabel laten endogen intervening 2 (formatif)

$$\xi_2 = \lambda_{y2} \eta_2 + \varepsilon_2$$

Untuk variabel laten endogen tergantung (reflektif)

$$y_{31} = \lambda_{y31} \eta_3 + \varepsilon_3$$

$$y_{32} = \lambda_{y32} \eta_3 + \varepsilon_4$$

5. Melakukan estimasi

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi dan iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:

- a. *Weight estimate* digunakan untuk menghitung data variabel laten.
- b. *Path estimate* menghubungkan antarvariabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.
- c. *Means* dan parameter lokasi (intersep dan koefisien regresi) untuk indikator

dan variabel laten.

6. Melakukan evaluasi *goodness of fit model*

Evaluasi *goodness of fit model* terhadap *Inner Model* diukur dengan menggunakan *Q-Square predictive relevance*. Rumus *Q-Square predictive relevance* adalah:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

yang menunjukkan bahwa:

$R_1^2$ ,  $R_2^2$ , dan  $R_p^2$  adalah *Rsquare* variabel endogen dalam model.

Interpretasi  $Q^2$  sama dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur (mirip dengan  $R^2$  pada regresi).

Evaluasi *goodness of fit model* terhadap *Outer Model* diukur dengan menggunakan *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

*Convergent validity*: Nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup, untuk jumlah indikator dari variabel laten berkisar antara 3 sampai 7.

*Discriminant validity*. Direkomendasikan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,50.

*Composite reliability*. Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit ( $\rho_c$ ) adalah  $\geq 0,7$ , walaupun bukan merupakan standar absolut.

7. Melakukan pengujian terhadap hipotesis

Hipotesis statistik untuk *inner model*: variabel laten eksogen terhadap endogen:

$$H_0 : \gamma_i = 0$$

$$H_1 : \gamma_i \neq 0$$

Hipotesis statistik untuk *inner model*: variabel laten endogen terhadap endogen:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Hipotesis statistik untuk *outer model*:

$$H_0 : \lambda_i = 0$$

$$H_1 : \lambda_i \neq 0$$

Statistik uji: *t-test*; *p-value*  $\leq 0,05$  (alpha 5 %); signifikan.

*Inner model* signifikan berarti terdapat pengaruh signifikan.

*Outer model* signifikan berarti indikator bersifat valid.

Uji signifikansi koefisien jalur dalam model PLS berkaitan dengan pengujian hipotesis. Untuk meningkatkan signifikansi koefisien jalur ditempuh mekanisme *resampling*. Penerapan metode *resampling* memungkinkan data terdistribusi bebas (*distribution free*) sehingga uji statistik t atau uji-t tidak memerlukan asumsi distribusi normal serta tidak memerlukan ukuran sampel yang besar.

*Resampling* dapat dilakukan dalam dua pilihan cara, yaitu berdasarkan prosedur *jackknife* dan *bootstrapping*. Prosedur *jackknife* dilakukan dengan pengurangan sejumlah unit sampel tertentu dari sampel asli (N). Pilihan *default* yang direkomendasikan adalah penghilangan 1 unit sampel dan kemudian menjadi sub-sampel *jackknife* dengan ukuran N-1. Makin besar jumlah penghilangan unit sampel berpotensi mengurangi keteguhan uji statistik-t, dikarenakan jumlah yang sampel yang makin mengecil.

Prosedur *bootstrapping* merupakan cara lain untuk memperbaiki signifikansi estimasi parameter melalui pembangkitkan sampel menjadi ukuran yang lebih besar dari jumlah sampel aslinya. Dalam hal ini disarankan ukuran *bootstrap default* sebesar 500 agar menghasilkan angka estimasi *standard error* (SE) yang bersifat

stabil. Batasan tingkat signifikansi koefisien jalur dalam PLS dengan uji- t adalah dengan kriteria  $p\text{-value} \leq 0,05$ . Jika koefisien jalur yang menghubungkan dua variabel laten memiliki  $p\text{-value} \leq 0,05$ , disimpulkan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika  $p\text{-value} > 0.05$ , disimpulkan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh tidak signifikan. Dalam *running* data variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat digunakan data *time lag* 2 tahun berdasarkan kesenjangan waktu yang terjadi bahwa pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak langsung pada tahun yang sama.



## **BAB 5**

### **ANALISIS HASIL STUDI**

#### **5.1. Deskripsi Daerah Studi**

Unit analisis dalam studi ini adalah semua kabupaten/kota dalam 1 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pemekaran wilayah untuk daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan studi yang hanya meneliti kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran wilayah sehingga akan terlihat originalitas atau keaslian keutuhan wilayah kabupaten/kota sejak otonomi daerah diberlakukan 1 Januari 2001. Pada subbab 5.1 ini akan dijelaskan secara deskriptif daerah studi yang meliputi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mempertajam analisis hasil studi.

##### **5.1.1. Gambaran Geografis**

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 32.544,12 hektar. Luas tersebut sekitar 25% dari total luas pulau Jawa dan 1,7% dari luas wilayah Indonesia serta terbagi dalam 992 ribu hektar (30,50%) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,5%) lahan bukan sawah. Provinsi Jawa Tengah sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan 566 kecamatan, 7.804 desa, dan 764 kelurahan. Daerah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 213.851 hektar atau sekitar 6,57% dari luas total

Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu seluas 1.812 hektar atau sekitar 0,06% dari luas total Provinsi Jawa Tengah.

Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut, ketinggian antara 0–100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%, ketinggian 100–500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%, ketinggian 500–1.000 m dari permukaan laut seluas 14,7%, ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut seluas 4,6%. Topografi wilayah akan mempengaruhi potensi ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

### **5.1.2. Pembangunan Wilayah**

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2008:50-51), pembangunan perhubungan darat selama tahun 2004 s.d 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kinerja layanan transportasi jalan dilihat dari jaringan layanan angkutan penumpang umum tahun 2006 dan 2007 cenderung tetap, karena telah diterapkan kebijakan pembatasan ijin trayek guna menjaga keseimbangan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi jalur rel kereta api (KA) yang ada di jalur utara, selatan, dan tengah (Semarang-Solo) dilayani oleh jalur ganda (kecuali jalur tengah) dan digunakan dua arah lintasan untuk angkutan penumpang dan barang. Frekuensi perjalanan KA di jalur utara dan selatan sudah cukup padat, sedangkan pada jalur tengah frekuensi lintasan belum padat.

Pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah di bagian utara adalah Pelabuhan Tanjung

Mas. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama sekunder yang mampu disandari kapal kontainer dengan kapasitas dermaga cukup padat. Pelabuhan antarpulau di pantai utara meliputi pelabuhan Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Jepara, Juwana, Karimunjawa, dan Rembang. Pelabuhan-pelabuhan ini melayani kapal niaga dan kapal nelayan. Pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan adalah Pelabuhan Tanjung Intan, sebagai pelabuhan utama tersier yang mampu didarati kapal kontainer dan sebagai alternatif keluar masuknya barang melalui laut selatan yang perkembangannya belum seperti Pelabuhan Tanjung Mas.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2008:56-60), meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam mengakibatkan fungsi ruang dan lahan menjadi sangat penting. Pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan harus diimbangi dengan konsistensi dan komitmen dalam pengendalian serta penegakan hukum. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan layanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 17 kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan 57 kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang belum optimal berperan seperti fungsi yang telah ditetapkan. Pertumbuhannya relatif lambat dibanding dengan kecepatan perkembangan dinamika kebutuhan layanan kepada masyarakat, terutama permasalahan infrastruktur dan penyediaan lapangan



pekerjaan.

Wilayah perdesaan masih berperan sebagai daerah penyangga (*hinterland*) perkotaan, dengan kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih rendah daripada perkotaan terutama pada wilayah perbatasan baik antarkabupaten atau kota maupun antarprovinsi dan berpotensi sebagai kantung-kantung kemiskinan. Upaya pembangunan perdesaan mendasarkan pada kewenangan provinsi yang banyak dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang terutama infrastruktur dan pendekatan pembangunan kawasan agropolitan yang telah mulai berjalan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi urbanisasi dan peningkatan sinergitas pembangunan desa-kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Upaya peningkatan daya jual, daya saing, dan daya dukung potensi wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks wilayah dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan strategis dengan operasional melalui kerja sama pembangunan wilayah/kawasan antarkabupaten/kota dan antarprovinsi mendasarkan pada kerjasama kawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Perda Nomor 21 Tahun 2003. Terdapat tiga hal pokok yang menjadi kendala dalam pembangunan kawasan strategis, yaitu pembangunan kawasan strategis belum berjalan secara optimal, kerjasama antardaerah masih dalam tahap awal, dan dukungan dari sistem sarana dan prasarana wilayah juga belum maksimal, seperti jalan tol Semarang-Surakarta dan Transjawa; peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang; peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel; pembukaan kembali jalur kereta api komuter dan pariwisata; pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi di Cilacap dan

Kendal; pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas, Batang, dan Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta; peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi, dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan antardaerah belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di dalam bumi maupun sebagai sumber daya yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD 1945. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah dengan rentang waktu rencana selama 15 tahun dimulai dari tahun 2003 s.d 2018.

Tigapuluh lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai dan menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK) dengan rentang waktu rencana 10 tahun serta rencana tata ruang penjabarannya, meskipun disadari bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terjadi terutama karena rencana tata ruang sebagai matra ruang dari pembangunan daerah belum optimal saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, daya dukung/daya tampung lingkungan terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bencana belum mendapat perhatian yang cukup, aspek keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan sektoral. Hal tersebut ditambah dengan masih rendahnya peran serta dan

pemahaman pelaku pembangunan dalam penataan ruang, perkembangan peraturan terkait serta tingginya dinamika perubahan pemanfaatan ruang yang berakibat pada alih fungsi lahan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut sebagai titik tolak dasar kesinambungannya dan konsistensi terhadap pemanfaatan ruang ke depan, maka beberapa aspek penataan keruangan perlu diperhatikan. Penataan keruangan tersebut antara lain peningkatan dan pengembangan fungsi kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, kawasan budi daya, kawasan prioritas konservasi, kawasan pariwisata Solo-Selo-Borobudur dan Kepulauan Karimunjawa, kawasan kerja sama antardaerah dan perbatasan antarprovinsi, kawasan selatan-selatan, dan pengembangan infrastruktur.

### 5.1.3. Gambaran Perekonomian

Perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan melalui PDRB dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada Tabel 5.1 ditunjukkan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000. Tampak, PDRB Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

**Tabel 5.1**  
**PDRB PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000, TAHUN 2004 s.d 2008 (jutaan Rupiah)**

No.	Tahun	PDRB Menurut Harga Berlaku	PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2000
1	2004	167.584.220,46	118.574.724,49
2	2005	190.584.257,73	123.765.649,17
3	2006	216.731.463,32	129.111.684,55
4	2007	243.666.646,56	135.317.845,14
5	2008	278.681.823,80	141.116.605,91

**Sumber:** BPS (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*.

Pada periode tahun 2004 s.d 2008, kontribusi terbesar PDRB Provinsi Jawa Tengah disumbang oleh tiga daerah yaitu Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus. Berdasarkan kontribusi terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang rata-rata menyumbang 12,79%, Kabupaten Cilacap rata-rata menyumbang 10,65%, dan Kabupaten Kudus rata-rata menyumbang 9,37%. Ketiga kabupaten/kota tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 32,81% dari PDRB Provinsi Jawa Tengah karena Kota Semarang adalah ibukota Provinsi yang dominan dengan perdagangan dan jasa-jasa, Kabupaten Kudus terkenal dengan industri rokok yang menjadi sektor dominan, dan Kabupaten Cilacap yang didominasi oleh sektor migas (Tamtomo, 2010:29).

Berdasarkan PDRB menurut sektor atau lapangan usaha dengan klasifikasi 9 sektor, ada tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah, yaitu sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pertanian. Rata-rata kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 s.d 2008 adalah sebesar 32,9%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian masing-masing menyumbang sekitar 19,8%. Dengan demikian, ketiga sektor tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,5%.

Berdasarkan Tabel 5.2 di halaman 147, tampak industri pengolahan mempunyai kontribusi terbesar, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor lain seperti sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor pertambangan dan penggalian relatif tidak begitu dominan dengan kontribusi sekitar 5% ke bawah.

**Tabel 5.2**  
**DISTRIBUSI PDRB PER SEKTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH,**  
**TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	19,90	19,11	20,34	20,43	19,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,97	1,02	1,00	0,97
3	Industri Pengolahan	32,64	33,71	32,85	32,14	33,08
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,22	1,20	1,12	1,09	1,03
5	Bangunan	5,63	5,77	5,66	5,80	5,84
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	20,09	19,92	19,63	19,93	19,73
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,67	5,91	5,96	5,88	6,03
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3,73	3,56	3,40	3,46	3,48
9	Jasa-jasa	10,16	9,85	10,02	10,27	10,25

**Sumber:** BPS (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Data diolah.

Berdasarkan kontribusi sektor dominan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, maka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dibagi ke dalam 4 golongan menurut sektor utama seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3 di halaman 148. Tampak 19 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah PDRBnya masih didominasi sektor pertanian. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di sebagian besar daerah meskipun bukan sebagai kontribusi terbesar dari PDRB Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kabupaten mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan sedang daerah perkotaan umumnya mengandalkan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan lahan pertanian di daerah perkotaan semakin berkurang dan kegiatan perekonomian lebih mengandalkan pada sektor non pertanian. Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sedang sektor jasa-jasa lebih dominan di Kota Magelang dan Kota Salatiga (Tamtomo, 2010:31).

**Tabel 5.3**  
**PENGGOLONGAN DAERAH MENURUT SEKTOR DOMINAN**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2007**

No.	Sektor	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Pertanian	Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Pemasang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, dan Kab. Temanggung	19 kabupaten
2	Industri Pengolahan	Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Kendal, Kab. Kudus, Kab. Pekalongan, Kab. Semarang, dan Kab. Sukoharjo	7 kabupaten
3	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Kab. Cilacap, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal	3 kabupaten dan 4 kota
4	Jasa-Jasa	Kota Magelang dan Kota Salatiga	2 kota

**Sumber:** Tamtomo (2010:31).

PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan rata-rata pendapatan setiap penduduk, walaupun indikator tersebut mempunyai beberapa kelemahan, baik kelemahan subyektif maupun kelemahan metodologis. Perkembangan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 5.4 di halaman 149. Tampak perbandingan antara PDRB berdasarkan harga konstan dengan PDRB per kapita dan perbandingan persentase kenaikan masing-masing setiap tahun. Kenaikan PDRB cenderung konstan di angka 4%, sedang perkembangan PDRB per kapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi perkembangan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar mengakibatkan penurunan tingkat perubahan PDRB per kapita atau bahkan penurunan PDRB per kapita itu sendiri.

**Tabel 5.4**  
**PERBANDINGAN PDRB MENURUT HARGA KONSTAN, PDRB PER KAPITA, DAN LAJU PERTUMBUHANNYA DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (jutaan Rupiah dan %)**

No.	Tahun	PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (Rupiah)	Persentase Kenaikan (%)	PDRB Per Kapita (Rupiah)	Persentase Kenaikan (%)
1	2004	118.574.724,49	—	13,60	—
2	2005	123.765.649,17	4,38	13,88	2,06
3	2006	129.111.684,55	4,32	14,72	6,05
4	2007	135.317.845,14	4,81	15,29	3,87
5	2008	141.116.605,91	4,29	15,61	2,09

**Sumber:** Tamtomo (2010:32).

Menurut Tamtomo (2010:32), hanya ada beberapa daerah yang mempunyai PDRB per kapita yang tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta sedang kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah. Kabupaten/kota yang mengandalkan sektor non pertanian seperti sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa memiliki PDRB dan PBRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, daerah kota cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten. Dengan demikian, PDRB dan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang lebih tinggi dipengaruhi oleh sektor non pertanian yang mendominasi dalam penghitungan PDRB seperti sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa dan terjadi di daerah perkotaan.

Kontribusi sektor-sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah yang berbeda disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor-sektor yang berbeda pula dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan Tabel 5.5 tentang laju pertumbuhan sektor-sektor PDRB di halaman 150. Tampak, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi daripada laju

**Tabel 5.5**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTORAL DI PROVINSI JAWA TENGAH,**  
**TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pertanian	5,33	4,61	3,60	2,78	5,09
2	Pertambangan danPenggalian	2,73	9,28	15,41	6,23	3,83
3	Industri Pengolahan	6,41	4,80	4,52	5,56	4,50
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	8,65	10,78	6,49	6,72	4,76
5	Bangunan	7,84	6,88	6,10	7,21	6,54
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2,45	6,05	5,85	6,54	5,10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,67	7,34	6,63	8,07	7,52
8	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	3,78	5,00	6,55	6,81	7,81
9	Jasa-jasa	5,58	4,75	7,89	6,71	7,66
10	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>5,13</b>	<b>5,35</b>	<b>5,33</b>	<b>5,59</b>	<b>5,46</b>
11	<b>Indonesia</b>	<b>5,03</b>	<b>5,69</b>	<b>5,50</b>	<b>6,28</b>	<b>6,06</b>

Sumber: Bank Indonesia (2009:41).

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 tetapi mulai tahun 2005 s.d 2008 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah daripada kecepatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor di PDRB Provinsi Jawa Tengah yang paling cepat laju pertumbuhannya dari tahun 2004 s.d 2008 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,5% per tahun, kemudian sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 7,48% per tahun, dan sektor bangunan sebesar 6,91% per tahun. Sektor di PDRB Provinsi Jawa Tengah yang paling lambat laju pertumbuhannya dari tahun 2004 s.d 2008 adalah sektor pertanian sebesar 4,28% per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 dapat juga dilihat menurut jenis penggunaan seperti yang disajikan pada Tabel 5.6 di halaman 151. Tampak, jenis penggunaan pada PDRB Provinsi Jawa Tengah yang paling cepat laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 s.d 2008 adalah penggunaan konsumsi pemerintah sebesar 10,77% per tahun, kemudian penggunaan konsumsi rumah tangga non makanan sebesar 7,82% per tahun, dan penggunaan pembentukan modal tetap



bruto (investas) sebesar 7,31% per tahun. Jenis penggunaan pada PDRB Provinsi Jawa Tengah yang paling lambat laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 s.d 2008 adalah penggunaan ekspor neto sebesar -3,87% per tahun.

**Tabel 5.6**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB JENIS PENGGUNAAN DI PROVINSI**  
**JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Jenis Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,55	5,14	4,80	5,13	5,42
2	a. Makanan	1,49	2,84	2,85	2,60	2,62
3	b. Non Makanan	3,89	8,98	7,88	8,93	9,40
4	Konsumsi Lembaga Non Profit	0,85	-1,58	1,46	5,50	5,48
5	Konsumsi Pemerintah	3,68	15,20	12,51	12,39	10,08
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,24	9,07	12,90	5,67	6,69
7	Ekspor Neto	-41,83	31,63	-72,11	71,09	-8,12
8	a. Ekspor	0,90	-0,72	6,90	5,54	0,16
9	b. Impor	0,28	-7,56	31,23	0,89	1,06
10	Provinsi Jawa Tengah	5,13	5,35	5,33	5,59	5,46
11	Indonesia	5,03	5,69	5,50	6,28	6,06

Sumber: Bank Indonesia (2009:41).

#### 5.1.4. Karakteristik Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan teknik analisis Tipologi Klassen tersebut maka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan sebagai daerah prima apabila tumbuh cepat dan kontribusi besar, daerah potensial apabila tumbuh lambat tetapi kontribusi besar, daerah terbelakang apabila tumbuh lambat dan kontribusi kecil, dan daerah berkembang apabila tumbuh cepat tetapi kontribusi kecil (Widodo, 2006:120-122). Pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi 4 kelompok berdasarkan posisi kabupaten/kota yang dibagi menjadi diagram 4 kuadran searah putaran jarum jam, yaitu kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah) seperti yang terlihat pada Gambar 2.4 di halaman 86.

Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen dapat dikaitkan dengan kegiatan karakteristik dan perencanaan pembangunan untuk pengembangan ekonomi

kabupaten/kota di masa mendatang dalam era otonomi daerah sehingga tujuan desentralisasi fiskal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat lebih mampu dan cepat tercapai. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 kelompok daerah seperti yang ditunjukkan pada Tabel L.3.1 di halaman 319. Tabel L.3.1 artinya tabel yang disajikan pada halaman lampiran, pada lampiran ke 3 urutan 1.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran I (daerah berkembang) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai *share* rendah, tetapi laju pertumbuhan sektor tinggi. Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran I memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kabupaten/kota ini. Dengan demikian, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran I berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kabupaten/kota ini adalah dengan menambah investasi untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran II (daerah prima) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi berkembang, karena kabupaten/kota tersebut berada pada daerah yang memiliki laju pertumbuhan tinggi. Selain itu, kabupaten/kota itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kabupaten/kota tersebut memiliki rata-rata kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran II adalah memperbesar investasi untuk melayani permintaan dari laju pertumbuhan daerah yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran III (daerah potensial) merupakan kabupaten/kota yang berhasil, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan relatif rendah. Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran III tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan daerah juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota harus berusaha menciptakan daerah baru bagi pasar produk-produk di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran IV (daerah terbelakang) dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kabupaten/kota tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kabupaten/kota tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan. Investasi pada kabupaten/kota tersebut tidak memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut rendah. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran IV adalah dengan melakukan diversifikasi hasil produksi untuk menciptakan daerah baru bagi pasar produk-produk kabupaten/kota tersebut.

Karakteristik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen seperti yang ditunjukkan pada Tabel L.3.1 di halaman 319 dapat dilihat juga pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 di halaman 154, serta Tabel 5.7 di halaman 155. Tampak karakteristik wilayah kabupaten/kota menunjukkan 10 kabupaten pada karakteristik Daerah Berkembang, 5 kabupaten pada karakteristik Daerah Prima, 1 kabupaten dan 2 kota pada karakteristik Daerah Potensial, serta 13 kabupaten dan 4 kota pada karakteristik Daerah Terbelakang.



**Sumber:** Widodo, 2006:120-122.

**Gambar 5.1**  
**KARAKTERISTIK WILAYAH BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN**



**Sumber:** Tabel L.3.1 di halaman 319 dan Gambar 5.1. Data diolah.

**Gambar 5.2**  
**KARAKTERISTIK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN TIPOLOGI KLASSEN**

**Tabel 5.7**  
**KARAKTERISTIK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI**  
**JAWA TENGAH MENURUT TIPOLOGI KLASSEN, TAHUN 2004 s.d 2008**

No.	Karakteristik Daerah	Jumlah	Persentase
1	Daerah Berkembang	10	28,57
2	Daerah Prima	5	14,29
3	Daerah Potensial	3	8,57
4	Daerah Terbelakang	17	48,57

**Sumber:** Tabel L.3.1 di halaman 319 dan dan Gambar 5.2. Data diolah.

## 5.2. Deskripsi Variabel

### 5.2.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerimaan negara sebagian besar dikuasai pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proksi desentralisasi fiskal ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156.

Tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%. Apabila diperhatikan lebih lanjut, 5 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20% hampir semuanya kota kecuali 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus. Besarnya rata-rata nilai desentralisasi fiskal Kabupaten

**Tabel 5.8**  
**PROKSI DESENTRALISASI FISKAL PADA APBD KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	14,04	15,63	14,34	13,43	12,12	13,91
2	Kabupaten Banyumas	16,67	18,66	17,74	16,96	17,01	17,41
3	Kabupaten Batang	12,73	14,45	13,77	12,20	13,09	13,25
4	Kabupaten Blora	14,97	19,63	21,14	22,89	18,07	19,34
5	Kabupaten Boyolali	14,24	17,07	16,30	13,52	12,44	14,71
6	Kabupaten Brebes	11,60	14,50	15,17	13,18	12,61	13,41
7	Kabupaten Cilacap	18,39	20,19	17,01	14,11	16,61	17,26
8	Kabupaten Demak	11,31	11,73	12,23	11,50	11,35	11,63
9	Kabupaten Grobogan	13,83	14,90	14,20	14,96	13,08	14,19
10	Kabupaten Jepara	18,30	19,23	16,93	15,73	16,71	17,38
11	Kabupaten Karanganyar	14,55	15,36	14,48	15,73	13,97	14,82
12	Kabupaten Kebumen	11,45	13,47	19,88	10,77	11,10	13,33
13	Kabupaten Kendal	13,78	17,03	16,53	18,24	14,04	15,92
14	Kabupaten Klaten	10,54	10,93	08,65	08,84	09,37	9,67
15	Kabupaten Kudus	21,62	18,35	20,32	19,46	21,29	20,21
16	Kabupaten Magelang	16,31	17,65	14,80	14,59	14,18	15,51
17	Kabupaten Pati	17,79	18,18	17,05	14,24	13,98	16,25
18	Kabupaten Pekalongan	14,15	14,15	12,20	13,67	14,72	13,78
19	Kabupaten Pemasang	12,20	17,48	15,35	14,64	14,34	14,80
20	Kabupaten Purbalingga	13,39	17,82	15,45	14,19	14,24	15,02
21	Kabupaten Purworejo	12,97	13,52	12,51	12,93	12,60	12,90
22	Kabupaten Rembang	12,54	18,12	16,09	14,21	14,76	15,15
23	Kabupaten Semarang	18,27	21,40	18,98	16,34	16,89	18,38
24	Kabupaten Sragen	16,34	15,80	13,08	13,75	12,24	14,24
25	Kabupaten Sukoharjo	14,29	17,64	15,52	11,77	11,28	14,10
26	Kabupaten Tegal	20,28	15,81	13,95	14,34	11,47	15,17
27	Kabupaten Temanggung	11,87	16,65	12,48	9,33	10,84	12,24
28	Kabupaten Wonogiri	10,86	12,85	12,46	13,74	10,68	12,12
29	Kabupaten Wonosobo	12,44	13,19	12,79	13,16	11,34	12,58
30	Kota Magelang	20,14	24,19	20,90	16,93	15,06	19,45
31	Kota Pekalongan	17,45	18,26	15,18	15,43	14,10	16,08
32	Kota Salatiga	20,22	25,08	20,88	21,55	17,87	21,12
33	Kota Semarang	53,49	59,49	53,77	23,45	37,56	45,55
34	Kota Surakarta	28,77	30,41	24,84	23,85	21,64	25,90
35	Kota Tegal	24,00	28,05	29,27	25,47	23,74	26,11

**Sumber:** Tabel L.3.4, Tabel L.3.6, dan Tabel L.3.8. Data diolah.

Kudus di atas 20% disebabkan faktor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus

yang relatif besar karena kontribusi dari industri rokok.

Berdasarkan Tabel L.3.2 di halaman 320 tampak Total Pendapatan Daerah pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang nilainya bervariasi antarkabupaten/kota. Variasi tersebut menunjukkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai rata-rata Total Pendapatan Daerah terbesar Kota Semarang (Rp1.011.255.69 juta) dan terkecil Kota Salatiga (Rp263.890,64 juta).

Berdasarkan Tabel L.3.3 di halaman 321 tampak pertumbuhan Total Pendapatan Daerah pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan kabupaten/kota dalam menggali Pendapatan Daerah berbeda. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah terbesar Kabupaten Salatiga (24,53%) dan terkecil Kota Tegal (10,75%).

Berdasarkan Tabel L.3.4 di halaman 322 tampak Total Pengeluaran Daerah pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Perbedaan Total Pengeluaran Daerah tersebut menunjukkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menggunakan sumber-sumber Pengeluaran Daerah untuk Belanja Tidak Langsung (belanja aparatur daerah) dan Belanja Langsung (belanja publik) berbeda. Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai rata-rata Total Pengeluaran Daerah

terbesar Kota Semarang (Rp950.869,13 juta) dan terkecil Kota Salatiga (Rp237.785,17 juta).

Berdasarkan Tabel L.3.5 di halaman 323 tampak pertumbuhan Total Pengeluaran Daerah pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam menggunakan sumber Pengeluaran Daerah. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Daerah terbesar Kabupaten Cilacap (23,56%) dan terkecil Kabupaten Tegal (13,52%).

Dalam studi ini, variabel desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD yang dinyatakan dalam satuan persen. Berdasarkan Tabel L.3.6 di halaman 324 tampak PAD pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. PAD yang berbeda menunjukkan perbedaan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-Lain PAD yang sah. Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai rata-rata PAD terbesar Kota Semarang (Rp215.396,86 juta) dan terkecil Kota Pekalongan (Rp21.466,21 juta).

Berdasarkan Tabel L.3.7 di halaman 325 tampak pertumbuhan PAD pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Pertumbuhan PAD yang bervariasi menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber PAD. Kabupaten/kota di



Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan PAD terbesar Kabupaten Kebumen (43,22%) dan terkecil Kabupaten Pati (11,87%), sedang Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah mampu tumbuh 15,38% dan Kota Surakarta sebagai kota besar di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang tumbuh 15,02%.

Berdasarkan Tabel L.3.8 di halaman 326 tampak Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Perbedaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tersebut menunjukkan kemampuan yang berbeda masing-masing kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, serta Bagi Hasil Bukan Pajak yang meliputi sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terbesar Kota Semarang (Rp192.301,85 juta) dan terkecil Kota Magelang (Rp14.989,99 juta).

Berdasarkan Tabel L.3.9 di halaman 327 tampak pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Pertumbuhan yang bervariasi ini menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terbesar Kota Semarang (169,75%) dan Kota Tegal (8,72%). Sebagian besar

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang relatif besar.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam satuan Rupiah. Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, belanja modal sebagai salah satu sumber belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar dapat dinikmati masyarakat, khususnya dalam pemberian layanan umum. Perencanaan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan Tabel 5.9 di halaman 161, tampak Belanja Modal pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Variasi Belanja Modal tersebut menunjukkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam mengalokasikan Belanja Modal pada masing-masing APBD kabupaten/kota. Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupate/kota di Provinsi Jawa Tengah yang

**Tabel 5.9**  
**TOTAL BELANJA MODAL PADA APBD KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (jutaan Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	37.516,10	59.073,41	109.443,49	128.769,81	172.528,46	101.466,25
2	Kabupaten Banyumas	35.169,22	59.630,66	122.919,46	141.468,69	154.241,12	102.685,83
3	Kabupaten Batang	46.311,29	42.057,44	63.852,34	108.532,90	75.703,23	67.291,44
4	Kabupaten Blora	45.782,48	31.474,17	58.383,86	112.130,94	141.456,78	77.845,65
5	Kabupaten Boyolali	49.428,77	57.414,55	74.010,25	158.187,03	116.399,64	91.088,05
6	Kabupaten Brebes	84.037,70	63.104,98	118.285,29	195.849,76	195.181,84	131.291,91
7	Kabupaten Cilacap	66.943,06	72.907,38	226.107,79	323.355,80	233.223,95	184.507,60
8	Kabupaten Demak	22.524,87	22.725,65	36.437,17	162.757,87	79.354,75	64.760,06
9	Kabupaten Grobogan	89.614,01	70.325,98	80.695,69	160.408,65	164.898,30	113.188,53
10	Kabupaten Jepara	54.454,78	56.650,37	121.083,13	172.895,53	156.369,60	112.290,68
11	Kabupaten Karanganyar	42.525,06	63.466,26	79.250,65	107.531,63	149.886,54	88.532,03
12	Kabupaten Kebumen	56.618,26	41.117,01	100.448,42	239.840,27	160.041,45	119.613,08
13	Kabupaten Kendal	93.194,41	70.714,54	175.510,96	118.589,67	116.591,45	114.920,21
14	Kabupaten Klaten	29.841,86	31.048,53	83.645,56	138.749,67	69.267,40	70.510,60
15	Kabupaten Kudus	47.786,47	104.825,90	66.295,05	121.783,97	55.348,34	79.207,95
16	Kabupaten Magelang	46.276,78	48.151,04	157.427,46	128.210,81	121.809,61	100.375,14
17	Kabupaten Pati	46.762,80	51.851,41	78.067,96	159.112,78	162.415,38	99.642,07
18	Kabupaten Pekalongan	38.485,29	37.682,48	50.847,72	89.261,52	96.600,86	62.575,57
19	Kabupaten Pemasang	78.771,95	31.937,84	115.895,38	148.413,02	133.260,12	101.655,66
20	Kabupaten Purbalingga	41.652,90	38.162,56	89.777,54	120.332,56	117.266,66	81.438,45
21	Kabupaten Purworejo	38.944,82	32.664,49	52.597,87	118.004,76	106.615,08	69.765,40
22	Kabupaten Rembang	22.130,72	15.857,61	56.876,69	164.919,16	123.254,54	76.607,74
23	Kabupaten Semarang	37.747,59	32.435,79	113.977,62	139.346,03	164.116,61	97.524,73
24	Kabupaten Sragen	43.164,37	57.196,31	113.623,24	174.442,69	108.546,42	99.394,61
25	Kabupaten Sukoharjo	29.516,31	31.152,65	75.652,00	123.087,29	112.595,42	74.400,74
26	Kabupaten Tegal	76.669,72	72.208,00	149.519,15	159.746,28	191.884,27	130.005,48
27	Kabupaten Temanggung	36.267,08	21.025,35	77.192,84	101.958,27	76.347,05	62.558,12
28	Kabupaten Wonogiri	70.184,96	112.348,6	154.512,19	92.138,57	353.570,28	156.550,92
29	Kabupaten Wonosobo	82.295,40	72.702,21	112.715,25	137.532,56	68.448,11	94.738,71
30	Kota Magelang	32.335,73	22.200,07	49.953,72	74.579,05	111.459,35	58.105,58
31	Kota Pekalongan	42.961,88	29.859,78	57.223,43	78.157,38	104.148,89	62.470,27
32	Kota Salatiga	43.174,17	35.315,94	54.435,16	55.449,24	126.481,27	62.971,16
33	Kota Semarang	35.459,18	32.978,04	90.437,05	159.469,84	155.065,66	94.681,95
34	Kota Surakarta	13.492,01	10.175,44	63.883,25	127.254,38	163.614,68	75.683,95
35	Kota Tegal	73.630,66	50.129,09	71.082,04	85.665,21	94.109,84	74.923,37

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>.

mempunyai rata-rata Belanja Modal terkecil Kota Magelang (Rp58.105,58 juta). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata Belanja Modal relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp94.681,95 juta dan Kota Surakarta dengan nilai sebesar Rp75.683,95 juta karena kedua kota tersebut merupakan kota terbesar urutan 1 dan 2 di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Tabel L.3.10 di halaman 328 tampak pertumbuhan Belanja Modal pada masing-masing APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Perbedaan pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam mengalokasikan Belanja Modal. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Belanja Modal terbesar Kota Surakarta (143,51%) dan terkecil Kabupaten Wonosobo (14,8%). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Belanja Modal relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota yaitu Kota Semarang (54,92%) dan Kota Salatiga (52,1%).

Perencanaan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang besar diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang besar pula. Di samping itu, pertumbuhan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang besar akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kemampuan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi pula oleh proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin besar pula kemampuan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, semakin kecil proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin kecil pula kemampuan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 ditunjukkan pada Tabel L.3.12 di halaman 330. Tampak proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berbeda. Proporsi yang berbeda ini menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam merencanakan dan mengalokasikan Belanja Modal. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD terbesar adalah Kota Salatiga (25,27%) dan terkecil adalah Kota Semarang (9,12%). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d

2008 yang mempunyai rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota, yaitu Kota Tegal (24,71%), Kota Pekalongan (22,71%), dan Kota Magelang (20,87%).

Kemampuan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi pula oleh proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin kecil kemampuan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, semakin kecil proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin besar kemampuan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 ditunjukkan pada Tabel L.3.13 di halaman 331. Tampak proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berbeda. Proporsi yang berbeda ini menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam merencanakan dan mengalokasikan APBD. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total

Pengeluaran Daerah pada APBD terbesar Kabupaten Klaten (82,42%) dan terkecil Kota Tegal (64,75%). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota, yaitu Kota Surakarta (79,46%) dan Kota Semarang (78,76%).

Apabila dibandingkan antara proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008, tampak ada korelasi negatif seperti yang ditunjukkan pada Tabel L.3.13 di halaman 331. Artinya, apabila proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah kecil, maka proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah besar. Sebaliknya, apabila proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah besar, maka proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah kecil.

Berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331, tampak dari 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20%, kecuali Kota Semarang (9,12%) dan Kota Surakarta (12,77%), sedang 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%, kecuali Kabupaten Cilacap (20,79%), Kabupaten Kendal (21,96%), Kabupaten Tegal (20,69%), Kabupaten Wonogiri (25,01%), dan

Kabupaten Wonosobo (21,77%). Berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331, tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20% pasti mempunyai proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%, dan sebaliknya.

### 5.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan persen. Penggunaan data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Pengeluaran Total pada APBD kabupaten/kota dalam harga berlaku (Mursinto, 2004 dan Sasana, 2009). Berdasarkan Tabel L.3.14 di halaman 332 tampak perbedaan PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Perbedaan tersebut menunjukkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menghasilkan produk barang dan jasa dari sektor-sektor produktif selama 1 tahun di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Selama tahun 2004 s.d 2008, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai rata-rata PDRB terbesar Kota Semarang (Rp27.038.804,05 juta) dan terkecil Kota Salatiga (Rp1.247.428,84 juta). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata PDRB relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota selain Kota Semarang, yaitu Kota Surakarta dengan nilai sebesar Rp6.268.685,91 juta. Berdasarkan Tabel 5.10 di



halaman 168 tampak pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berbeda. Pertumbuhan yang berbeda ini menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan produk dari sektor-sektor produktif selama 1 tahun. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan PDRB terbesar Kabupaten Brebes (15,98%) dan terkecil Kabupaten Magelang (10,25%), sedang Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah hanya mampu tumbuh 13,47%. Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata pertumbuhan PDRB relatif besar adalah daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota selain Kota Semarang, yaitu Kota Surakarta (13,32%) dan Kota Tegal (13,31%).

Apabila dibandingkan rata-rata pertumbuhan Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 terjadi ketidakkonsistenan. Hal ini tampak pada Tabel L.3.15 di halaman 333. Kota Surakarta yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 143,51% mampu mencapai rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,32% selama tahun 2004 s.d 2008. Capaian rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku itu hampir sama dengan Kota Tegal (13,31%) tetapi dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Modal yang hanya sebesar 19,01% saja. Kota Salatiga yang mempunyai rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 52,1% mampu mencapai rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,07% selama tahun 2004 s.d 2008. Capaian rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku itu hampir sama dengan Kabupaten Kendal (11,08%) tetapi dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Modal yang hanya sebesar 33,54% saja. Dengan demikian,

**Tabel 5.10**  
**PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**  
**ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	15,64	11,76	13,20	17,43	9,00	13,41
2	Kabupaten Banyumas	15,42	15,18	13,07	14,80	10,14	13,72
3	Kabupaten Batang	16,89	12,65	10,71	12,32	7,54	12,02
4	Kabupaten Blora	12,55	11,83	9,78	15,56	9,97	11,94
5	Kabupaten Boyolali	9,16	10,84	11,00	12,94	10,80	10,95
6	Kabupaten Brebes	22,37	14,70	13,67	16,58	12,56	15,98
7	Kabupaten Cilacap	2,41	17,45	10,49	18,81	14,52	12,74
8	Kabupaten Demak	12,18	12,57	9,05	13,70	8,17	11,13
9	Kabupaten Grobogan	12,65	12,89	13,40	13,75	11,17	12,77
10	Kabupaten Jepara	14,47	13,35	13,72	15,26	10,06	13,37
11	Kabupaten Karanganyar	11,37	10,27	11,59	11,22	9,10	10,71
12	Kabupaten Kebumen	14,45	16,54	11,92	16,10	10,38	13,88
13	Kabupaten Kendal	9,91	14,05	11,45	13,12	6,89	11,08
14	Kabupaten Klaten	19,08	15,09	11,26	13,68	9,13	13,65
15	Kabupaten Kudus	20,47	7,78	12,06	13,01	6,51	11,97
16	Kabupaten Magelang	12,65	13,20	11,54	12,44	8,55	11,67
17	Kabupaten Pati	11,88	16,01	11,35	14,70	8,84	12,56
18	Kabupaten Pekalongan	18,52	14,50	11,51	15,12	9,70	13,87
19	Kabupaten Pemasang	21,69	14,91	11,56	13,83	9,04	14,21
20	Kabupaten Purbalingga	13,59	17,02	14,06	14,32	15,24	14,85
21	Kabupaten Purworejo	16,65	18,91	13,84	14,32	9,78	14,70
22	Kabupaten Rembang	14,27	16,01	12,19	12,69	9,60	12,95
23	Kabupaten Semarang	14,09	13,19	11,39	13,56	8,45	12,14
24	Kabupaten Sragen	14,30	15,59	11,62	14,60	13,54	13,93
25	Kabupaten Sukoharjo	15,38	13,20	12,37	13,99	10,94	13,18
26	Kabupaten Tegal	12,12	15,17	25,28	15,74	10,64	15,79
27	Kabupaten Temanggung	10,82	13,99	13,54	13,18	9,13	12,13
28	Kabupaten Wonogiri	10,39	16,97	12,65	15,75	8,84	12,92
29	Kabupaten Wonosobo	11,94	13,88	12,66	12,46	7,65	11,72
30	Kota Magelang	12,49	5,54	8,69	12,97	11,55	10,25
31	Kota Pekalongan	16,62	13,61	9,78	8,59	6,65	11,05
32	Kota Salatiga	12,29	12,12	10,68	12,52	7,73	11,07
33	Kota Semarang	14,30	14,72	14,62	13,19	10,52	13,47
34	Kota Surakarta	17,43	10,82	11,62	14,37	12,39	13,32
35	Kota Tegal	13,38	14,54	12,61	14,37	11,62	13,31

**Sumber:** Tabel L.3.14. Data diolah.

rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (pertumbuhan ekonomi) suatu kabupaten/kota yang hampir sama dapat dicapai dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Modal yang tidak harus sama. Berarti, karakteristik kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan Tabel L.3.14 di halaman 332 tentang PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008, dapat dihitung proporsi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada Tabel L.3.16 di halaman 334. Tampak proporsi PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 bervariasi. Proporsi yang bervariasi ini menunjukkan kemampuan yang berbeda antarkabupaten/kota dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata proporsi PDRB terbesar Kota Semarang (12,30%) dan terkecil Kota Salatiga (0,57%). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata proporsi PDRB relatif besar daerah kabupaten, sedang untuk daerah kota, yaitu Kota Surakarta (2,86%). Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus mempunyai rata-rata proporsi PDRB terbesar kedua setelah Kota Semarang, yaitu masing-masing sebesar 10,73% dan 9,95%, karena Kabupaten Cilacap merupakan daerah penghasil migas, sedang Kabupaten Kudus merupakan daerah industri rokok.

#### **5.2.4. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dinyatakan dalam satuan indeks. Variabel kesejahteraan masyarakat sebagai variabel laten dalam studi ini diukur dengan indikator tingkat komposisi Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Perkembangan pemikiran mengenai kesejahteraan masyarakat muncul karena standar kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto per kapita (GDP per kapita atau PDB per kapita) menuai kritikan karena adanya kelemahan metodologis dan kelemahan subyektif.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan *United Nations Development Program* (UNDP) yang mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 dan indikator kesejahteraan sosial (non moneter) lainnya yang berupa Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) sebagai rasio banyaknya kejahatan per 1.000 penduduk.

Berdasarkan Tabel 5.11 di halaman 171, tampak angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengalami kenaikan. Apabila dikaitkan dengan awal pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001 sebagai awal desentralisasi fiskal maka dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap indikator kesejahteraan masyarakat yang

**Tabel 5.11**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d. 2008**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	66,90	67,30	68,25	68,54	68,99	68,00
2	Kabupaten Banyumas	70,30	70,70	70,81	71,23	71,77	70,96
3	Kabupaten Batang	67,00	67,60	68,40	68,64	69,23	68,17
4	Kabupaten Blora	66,50	67,90	68,42	69,11	69,63	68,31
5	Kabupaten Boyolali	68,50	69,00	69,37	69,63	69,99	69,30
6	Kabupaten Brebes	63,40	64,30	65,89	66,57	67,08	65,45
7	Kabupaten Cilacap	68,80	69,50	69,78	70,25	70,91	69,85
8	Kabupaten Demak	69,00	69,40	70,34	71,05	71,56	70,27
9	Kabupaten Grobogan	67,30	68,20	69,22	69,75	70,22	68,94
10	Kabupaten Jepara	69,10	69,60	69,95	71,45	71,94	70,41
11	Kabupaten Karanganyar	70,50	70,70	71,09	71,59	72,21	71,22
12	Kabupaten Kebumen	68,00	68,90	69,50	69,96	70,19	69,31
13	Kabupaten Kendal	67,30	67,50	68,30	68,91	69,40	68,28
14	Kabupaten Klaten	71,00	71,40	71,82	72,46	72,93	71,92
15	Kabupaten Kudus	69,40	70,00	71,31	71,66	72,02	70,88
16	Kabupaten Magelang	69,10	69,90	70,65	71,03	71,43	70,42
17	Kabupaten Pati	70,60	70,90	71,78	71,87	72,26	71,48
18	Kabupaten Pekalongan	67,60	68,20	69,36	69,69	70,31	69,03
19	Kabupaten Pemasang	65,60	66,30	67,36	67,89	68,38	67,11
20	Kabupaten Purbalingga	68,70	69,30	69,87	70,38	70,89	69,83
21	Kabupaten Purworejo	68,70	69,10	70,22	70,68	71,29	70,00
22	Kabupaten Rembang	67,50	69,00	69,70	70,54	71,12	69,57
23	Kabupaten Semarang	71,40	71,90	72,17	72,93	73,34	72,35
24	Kabupaten Sragen	66,10	66,60	67,76	68,98	69,57	67,80
25	Kabupaten Sukoharjo	70,70	71,20	71,72	72,46	73,01	71,82
26	Kabupaten Tegal	66,80	67,50	67,83	68,83	69,54	68,10
27	Kabupaten Temanggung	71,40	71,80	72,74	73,08	73,43	72,49
28	Kabupaten Wonogiri	68,40	69,00	69,89	70,11	70,47	69,57
29	Kabupaten Wonosobo	66,90	67,60	68,75	69,22	69,55	68,40
30	Kota Magelang	74,50	74,70	75,49	75,69	76,09	75,29
31	Kota Pekalongan	71,40	71,90	72,54	73,10	73,49	72,49
32	Kota Salatiga	74,40	74,80	75,06	75,37	75,81	75,09
33	Kota Semarang	74,90	75,30	75,94	76,11	76,54	75,76
34	Kota Surakarta	75,80	76,00	76,36	76,58	77,16	76,38
35	Kota Tegal	71,20	71,40	72,39	72,72	73,20	72,18

**Sumber:** BPS (2009d). *Indeks Pembangunan Manusia*.

diproksi dengan IPM (Soesilowati, 2005:112-115). Hal lain yang dapat dilihat dari Tabel 5.11 di halaman 171 adalah angka IPM untuk kota cenderung lebih besar daripada angka IPM untuk kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan Tabel 5.11 di halaman 171, tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata IPM terbesar, yaitu Kota Surakarta (76,38), disusul Kota Semarang (75,76), Kota Magelang (75,29), dan Kota Salatiga (75,09), sedang rata-rata IPM terkecil ada di Kabupaten Brebes (65,45). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata IPM relatif besar adalah daerah kota, sedang untuk daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung (72,49) dan Kabupaten Semarang (72,35).

Komponen dalam IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita Riil Disesuaikan per kabupaten/kota bervariasi antarkabupaten/kota dan antartahun. Berdasarkan Tabel L.3.17 di halaman 335 tampak angka harapan hidup masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata angka harapan hidup terbesar tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Pati (72,6 tahun) kemudian Kabupaten Semarang (72,2 tahun), sedang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata angka harapan hidup terkecil tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Brebes (66,4 tahun).

Berdasarkan Tabel L.3.18 di halaman 336 tampak angka melek huruf masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung

naik. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata angka melek huruf terbesar tahun 2004 s.d 2008 adalah Kota Magelang dan Kota Surakarta masing-masing sebesar (96,1%) kemudian Kota Salatiga (95,7%), sedang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata angka melek huruf terkecil tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Sragen (76,8%).

Berdasarkan Tabel L.3.19 di halaman 337 tampak rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata lama sekolah terbesar tahun 2004 s.d 2008 adalah Kota Magelang (9,96 tahun) kemudian Kota Surakarta (9,92 tahun), sedang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rata-rata lama sekolah terkecil tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Brebes (5,24 tahun).

Berdasarkan Tabel L.3.20 di halaman 338 tampak pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengeluaran per kapita riil disesuaikan terbesar tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Pekalongan (Rp651.800,-) kemudian Kota Tegal (Rp641.300,-), sedang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengeluaran per kapita riil disesuaikan terkecil tahun 2004 s.d 2008 adalah Kabupaten Gobrogan (Rp619.000,-).

Berdasarkan Tabel L.3.21 di halaman 339 tampak rangking nasional IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar cenderung turun, kecuali Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Jepara yang cenderung naik. Apabila dikaitkan dengan angka IPM kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 pada Tabel 5.11 di halaman 171 yang cenderung mengalami kenaikan untuk semua kabupaten/kota, maka kondisi pada Tabel L.3.21 di halaman 339 menunjukkan bahwa walaupun IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 naik yang berarti masyarakat semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah semakin sejahtera, namun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi lain tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah relatif masih lebih rendah.

Berdasarkan Tabel 5.12 di halaman 175, tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata IKD terbesar, yaitu Kota Magelang (1,1448), disusul Kota Surakarta (0,921), Kota Salatiga (0,7629), dan Kota Pekalongan (0,6327), sedang rata-rata IKD terkecil ada di Kabupaten Brebes (0,1308). Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata IKD relatif besar adalah daerah kota, kecuali untuk daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang (0,5794). Besarnya angka IKD di daerah kota didominasi oleh kejahatan jenis pencurian kendaraan bermotor per 1.000 penduduk.

Secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum atau perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut BPS (2006b), jenis kejahatan adalah perampokan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pengrusakan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, kebakaran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu, pengeroyokan, dan narkotik. Dengan demikian, jenis kejahatan



**Tabel 5.12**  
**INDEKS KRIMINALITAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	0,1167	0,1477	0,1417	0,2152	0,2710	0,1784
2	Kabupaten Banyumas	0,2284	0,2228	0,0749	0,0930	0,1213	0,1481
3	Kabupaten Batang	0,2523	0,2233	0,3388	0,4022	0,4500	0,3333
4	Kabupaten Blora	0,2690	0,2034	0,3487	0,2833	0,3578	0,2924
5	Kabupaten Boyolali	0,1268	0,1859	0,3018	0,3112	0,3489	0,2549
6	Kabupaten Brebes	0,1194	0,0624	0,1326	0,1683	0,1716	0,1308
7	Kabupaten Cilacap	0,0832	0,0628	0,2519	0,2957	0,3778	0,2143
8	Kabupaten Demak	0,2233	0,2412	0,1741	0,1820	0,2344	0,2110
9	Kabupaten Grobogan	0,0890	0,1447	0,2067	0,1979	0,1938	0,1664
10	Kabupaten Jepara	0,1928	0,2061	0,2529	0,2801	0,3358	0,2536
11	Kabupaten Karanganyar	0,2588	0,2814	0,1930	0,2264	0,2941	0,2507
12	Kabupaten Kebumen	0,2279	0,2341	0,2814	0,3625	0,3873	0,2986
13	Kabupaten Kendal	0,1694	0,2153	0,2613	0,3234	0,3548	0,2648
14	Kabupaten Klaten	0,2063	0,2298	0,2158	0,2754	0,2914	0,2437
15	Kabupaten Kudus	0,3087	0,3707	0,3337	0,3758	0,3495	0,3477
16	Kabupaten Magelang	0,1351	0,5294	0,2853	0,2612	0,3667	0,3155
17	Kabupaten Pati	0,2163	0,2516	0,2855	0,3001	0,3393	0,2786
18	Kabupaten Pekalongan	0,1392	0,1421	0,3643	0,4699	0,3591	0,2949
19	Kabupaten Pemasang	0,1344	0,2095	0,1387	0,1795	0,2051	0,1734
20	Kabupaten Purbalingga	0,1125	0,1825	0,1579	0,1813	0,3042	0,1877
21	Kabupaten Purworejo	0,0941	0,1974	0,4516	0,6618	0,6970	0,4204
22	Kabupaten Rembang	0,3970	0,4921	0,2019	0,2665	0,2822	0,3279
23	Kabupaten Semarang	0,5670	1,3002	0,3410	0,3474	0,3414	0,5794
24	Kabupaten Sragen	0,0915	0,1483	0,1955	0,3200	0,3625	0,2236
25	Kabupaten Sukoharjo	0,3068	0,3342	0,2564	0,3551	0,4214	0,3348
26	Kabupaten Tegal	0,1320	0,1032	0,0287	0,1881	0,2400	0,1384
27	Kabupaten Temanggung	0,3905	0,2627	0,2477	0,2586	0,3459	0,3011
28	Kabupaten Wonogiri	0,0837	0,1431	0,1415	0,1962	0,2446	0,1618
29	Kabupaten Wonosobo	0,2071	0,2807	0,2745	0,3186	0,3213	0,2804
30	Kota Magelang	1,3193	0,9883	0,9850	1,3142	1,1172	1,1448
31	Kota Pekalongan	0,4105	0,4442	0,5881	0,8555	0,8651	0,6327
32	Kota Salatiga	0,8118	0,7413	0,6110	0,6899	0,9607	0,7629
33	Kota Semarang	0,1839	0,2093	0,7235	0,8096	0,8247	0,5502
34	Kota Surakarta	0,9455	1,0428	0,7792	0,9466	0,8907	0,9210
35	Kota Tegal	0,1670	0,1612	0,2771	0,3740	0,3290	0,2617

**Sumber:** BPS (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Data diolah.

menurut BPS dan yang digunakan dalam studi ini tidak termasuk jenis kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dalam APBD kabupaten/kota.

Menurut Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Provinsi Jawa Tengah (<http://kp2kknjateng.org>), penyalahgunaan anggaran dalam APBD kabupaten/kota berakibat kepada berkurangnya anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan berpengaruh pada tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebanyak 23 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2001 s.d 2009 memiliki bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang terlibat korupsi. Berdasarkan jumlah 23 bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, 12 di antaranya sudah berstatus narapidana (napi), sedangkan 11 bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota masih dalam proses hukum di pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian terkait kasus korupsi dana APBD masing-masing kabupaten/kota. Kerugian negara akibat korupsi anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2009 ditunjukkan pada Tabel L.3.23 di halaman 341.

Kasus korupsi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terjadi pada APBD kabupaten/kota sebanyak 43 kasus, penyediaan infrastruktur 40 kasus, bantuan sosial 39 kasus, pendidikan 16 kasus, dan perbankan 13 kasus. Untuk wilayah korupsi, jumlah kasus korupsi di Kota Semarang 23 kasus, Kabupaten Kendal 20 kasus, Kota Surakarta 19 kasus, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri masing-masing 18 kasus korupsi, dan Kabupaten Sukoharjo 17 kasus. Secara umum, jumlah kasus korupsi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 mengalami peningkatan 17,6% dibandingkan tahun 2008 dan melibatkan berbagai unsur dalam eksekutif dan legislatif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kasus

korupsi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun akan menurunkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Kompas, 2 Agustus 2010).

#### **5.2.5. Deskripsi Variabel Menurut Kabupaten/Kota**

Deskripsi variabel menurut kabupaten/kota dilakukan untuk membandingkan desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Dengan melakukan perbandingan masing-masing variabel per kabupaten/kota dapat diperoleh gambaran nilai masing-masing variabel per kabupaten/kota sehingga dapat memenuhi tujuan studi dan dapat digunakan untuk menambah kualitas hasil studi. Perbandingan nilai masing-masing variabel per kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel L.3.22 di halaman 340.

Tampak gambaran proksi desentralisasi fiskal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.1 di halaman 347. Histogram desentralisasi fiskal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram desentralisasi fiskal untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih mampu melaksanakan desentralisasi fiskal daripada daerah kabupaten karena desentralisasi fiskal sebagai proksi antara PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah menunjukkan kemampuan seberapa besar Total Pengeluaran Daerah mampu dibiayai dari Total Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Semakin besar nilai desentralisasi fiskal kabupaten/ kota

semakin mampu kabupaten/kota tersebut melaksanakan otonomi daerah. Dengan demikian, berdasarkan Gambar L.3.1 di halaman 347, daerah kota di Provinsi Jawa Tengah lebih mampu melaksanakan desentralisasi fiskal daripada daerah kabupaten.

Berdasarkan Tabel L.3.22 di halaman 340, tampak gambaran belanja modal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.2 di halaman 348. Histogram belanja modal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kabupaten lebih tinggi daripada histogram belanja modal untuk daerah kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih besar mengalokasikan dan merealisasikan anggaran belanja modal dalam APBD daripada daerah kota karena cakupan daerah kabupaten yang lebih luas daripada kota. Semakin besar belanja modal kabupaten/kota semakin besar kabupaten/kota tersebut mengalokasikan dan merealisasikan anggaran APBD untuk kebutuhan belanja modal dalam pembangunan yang berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya.

Berdasarkan Tabel L.3.22 di halaman 340, tampak gambaran pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.3 di halaman 349. Histogram pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kabupaten lebih tinggi daripada histogram pertumbuhan ekonomi untuk daerah kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi daripada daerah kota. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi kabupaten daripada kota menunjukkan bahwa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

lebih mampu dalam mencapai perubahan relatif produk yang dihasilkan dari sektor-sektor produktif selama 1 tahun daripada kota.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi kabupaten daripada kota di Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan histogram Gambar L.3.2 di halaman 348 yang menunjukkan bahwa histogram belanja modal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kabupaten lebih tinggi daripada histogram belanja modal untuk daerah kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang lebih besar mengalokasikan dan merealisasikan anggaran belanja modal dalam APBD daripada daerah kota karena cakupan daerah kabupaten yang lebih luas daripada kota dan kebutuhan belanja modal dalam pembangunan yang berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya yang lebih besar daripada kota akan lebih mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah kota.

Berdasarkan Tabel L.3.22 di halaman 340, tampak gambaran IPM per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.4 di halaman 350. Histogram IPM per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram IPM untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih sejahtera masyarakatnya daripada daerah kabupaten. Pencapaian IPM yang lebih tinggi kota daripada kabupaten menunjukkan bahwa kota di Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya daripada kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas

kesehatan lebih menjamin pencapaian IPM yang lebih tinggi sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel L.3.22 di halaman 340, tampak gambaran IKD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.5 di halaman 351. Histogram IKD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram IKD untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih tinggi tingkat kejahatan terhadap masyarakatnya daripada daerah kabupaten per 1.000 penduduk.

### **5.3. Hasil Pengujian Asumsi Analisis *Partial Least Square* (PLS)**

Asumsi analisis PLS yang harus dipenuhi adalah hubungan linier antarvariabel. Pengujian asumsi linier antarvariabel dilakukan dengan metode *Curve Fit* yang dihitung dengan bantuan *software Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS) 16.0. Rujukan yang digunakan adalah prinsip *parsimony*, yaitu apabila seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, inverse, logaritmik, *power*, *compound*, *growth*, dan eksponensial.

Hasil pengujian linieritas hubungan antarvariabel disajikan secara lengkap pada Lampiran 4 di halaman 352 s.d 360, sedang secara ringkas disajikan pada Tabel 5.13 di halaman 181. Tampak seluruh hubungan antarvariabel adalah linier, sehingga asumsi linieritas dalam analisis PLS terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi linieritas antarvariabel, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya.

**Tabel 5.13**  
**HASIL PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS**

No.	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Hasil Pengujian ( $\alpha=5\%$ )	Keputusan
1	Desentralisasi Fiskal (X)	Belanja Modal (Y1)	Model Linier Non Signifikan	Linier
2	Desentralisasi Fiskal (X)	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	Model Linier Signifikan	Linier
3	Desentralisasi Fiskal (X)	Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	Model Linier Signifikan	Linier
4	Belanja Modal (Y1)	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	Model Linier Non Signifikan	Linier
5	Belanja Modal (Y1)	Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	Model Linier Non Signifikan	Linier
6	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	Model Linier Signifikan	Linier

**Sumber:** Lampiran 4. Data diolah.

#### 5.4. Hasil Evaluasi *Goodness of Fit Model*

Evaluasi *goodness of fit model* dilakukan terhadap *Outer Model* yang diukur dengan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity* untuk uji validitas dan *composite reliability* untuk uji reliabilitas serta evaluasi *goodness of fit model* terhadap *Inner Model* yang diukur dengan menggunakan *Q-Square predictive Relevance*.

##### 5.4.1. Evaluasi *Goodness of Fit Model* terhadap *Outer Model*

Variabel-variabel yang digunakan dalam studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi variabel desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di antara keempat variabel tersebut, variabel desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel terukur, sedang variabel kesejahteraan

masyarakat merupakan variabel laten. Sebagai variabel laten, variabel kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD).

Penggunaan kedua indikator kesejahteraan masyarakat (IPM dan IKD) untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi positif (indikator IPM) dan sisi negatif (indikator IKD). Sisi positif indikator IPM menunjukkan bahwa semakin tinggi angka IPM maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah angka IPM maka kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Sisi negatif indikator IKD menunjukkan bahwa semakin tinggi angka IKD maka kesejahteraan masyarakat semakin menurun, sebaliknya semakin rendah angka IKD maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, IPM dan IKD sebagai indikator variabel kesejahteraan masyarakat mempunyai kontribusi.

Besarnya kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel laten dapat dilihat dari koefisien *outer loading*. Semakin tinggi koefisien *outer loading* dalam angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin besar kontribusinya dalam menentukan variabel laten, sebaliknya semakin rendah koefisien *outer loading* dalam angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin kecil kontribusinya dalam menentukan variabel laten.

Tanda positif (+) atau tanda negatif (-) pada koefisien *outer loading* menunjukkan arah kontribusi. Hasil *running data* untuk *outer loading* ditunjukkan pada Tabel 5.14 di halaman 183. Tampak kontribusi indikator IPM lebih daripada indikator IKD, karena koefisien *loading factor* IPM (0,903) lebih besar daripada koefisien *loading factor* IKD (0,881). Dengan demikian, indikator IPM lebih kuat



sebagai pengukur variabel kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan indikator IKD.

**Tabel 5.14**  
**OUTER FACTOR VARIABEL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

No.	Lambang	Indikator	Loading Factor
1	Y3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,903
2	Y3.2	Indeks Kriminalitas Daerah (IKD)	-0,881

Sumber: Tabel L.5.1 di halaman 361.

Tanda positif (+) pada koefisien *loading factor* IPM menunjukkan bahwa kontribusi IPM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat bersamaan arah, artinya apabila kontribusi IPM meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat, sebaliknya apabila kontribusi IPM menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun. Tanda negatif (-) pada koefisien *loading factor* IKD menunjukkan bahwa kontribusi IKD terhadap variabel kesejahteraan masyarakat berbeda arah, artinya apabila kontribusi IKD meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun, sebaliknya apabila kontribusi IKD menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat.

Evaluasi *goodness of fit model* dilakukan terhadap *Outer Model* yang diukur dengan menggunakan *convergent validity* untuk uji validitas menunjukkan bahwa *outer loading* dalam angka mutlak, yaitu *outer loading* IPM (0,903) dan *outer loading* IKD (0,881) lebih besar daripada 0,7. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 1, variabel Belanja Modal sebesar 1, variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,7954 yang semuanya lebih besar daripada 0,5. Ini berarti, model pengukuran untuk menguji validitas konstruk dalam rangka mengetahui

kemampuan instrumen studi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan *convergent validity* dan *Average Variance Extracted (AVE)* adalah valid (Abdillah, 2009:61).

Validitas IPM dan IKD sebagai indikator untuk mengukur variabel kesejahteraan masyarakat ditunjukkan juga dengan hasil *outer weights* pada Tabel 5.15 di halaman 185. Tampak nilai *p-value* untuk indikator IPM dan IKD masing-masing sebesar 2,57014E-79 dan 2,28922E-47 yang lebih kecil atau sama dengan 5%. Dengan demikian, indikator IPM dan IKD valid untuk mengukur variabel kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi *goodness of fit model* dilakukan terhadap *Outer Model* yang diukur dengan menggunakan *composite reliability* untuk uji reliabilitas. Berarti model pengukuran yang dapat mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep adalah reliabel. Namun sesungguhnya, uji konsistensi internal tersebut tidak mutlak dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah konstruk yang reliabel. Sebaliknya, konstruk yang reliabel belum tentu valid (Abdillah, 2009:62).

Berdasarkan evaluasi *goodness of fit model* yang dilakukan terhadap *Outer Model* memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk memperjelas hasil evaluasi *goodness of fit model* yang dilakukan terhadap *Outer Model*, maka pada Gambar L.5 di halaman 361 disajikan hasil *outer loading* dari pengujian PLS dalam bentuk diagram jalur. Pada Gambar L.5 di halaman 361, keempat variabel digambarkan dengan tanda lingkaran karena *setting* dari program *Partial Least Square*. Variabel desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi tetap sebagai variabel terukur, sedang variabel kesejahteraan masyarakat tetap sebagai variabel laten.

**Tabel 5.15**  
**HASIL OUTER WEIGHTS VARIABEL**

No.	Variabel	Loading Factor	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	p-value
1	Desentralisasi Fiskal	1,000000	1,000000	0,000000		
2	Belanja Modal	1,000000	1,000000	0,000000		
3	Pertumbuhan Ekonomi	1,000000	1,000000	0,000000		
4	IPM <-Kesejahteraan Masyarakat	0,902733	0,901393	0,026016	34,698540 *)	2,57014E-79 *)
5	IKD <-Kesejahteraan Masyarakat	-0,880798	-0,875692	0,043430	-20,280768 *)	2,28922E-47 *)

**Sumber:** Tabel L.5.2 di halaman 361.

**Keterangan:** \*) signifikan karena nilai  $p\text{-value} \leq 5\%$ .

#### 5.4.2. Evaluasi *Goodness of Fit Model* terhadap *Inner Model*

Model struktural atau *inner model* pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi teori dan konsep disebut *fit* apabila didukung oleh data empirik. Perhitungan nilai *Goodness of Fit Inner Model* didasarkan pada hasil analisis PLS pada Gambar L.5 di halaman 361.

*Goodness of Fit Inner Model* pada analisis PLS menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q-Square test* yang berupa nilai *Q-Square predictive relevance* dihitung berdasarkan nilai  $R^2$  masing-masing variabel endogen, yaitu 1) variabel Belanja Modal diperoleh nilai  $R_1^2$  sebesar 0,006; 2) variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai  $R_2^2$  sebesar 0,044; dan 3) variabel Kesejahteraan Masyarakat diperoleh nilai  $R_3^2$  sebesar 0,303. Dengan demikian, nilai *Q-Square predictive relevance* sebesar:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) (1 - R_3^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,006) (1 - 0,044) (1 - 0,303) \\
 &= 1 - (0,994) (0,956) (0,697) \\
 &= 0,3377
 \end{aligned}$$

Diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance* sebesar 0,3377 atau 33,77%

sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang agak lemah karena variasi variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi hanya mampu menjelaskan variasi variabel Kesejahteraan Masyarakat sebesar 33,77%, sedang yang sebesar 66,33% merupakan variasi variabel lain di luar model. Menurut Abdillah (2009:63), nilai *Q-Square predictive relevance* yang rendah karena faktor nilai  $R^2$  yang rendah bukanlah menjadi sesuatu yang utama sebagai parameter absolut dalam mengukur ketepatan model. Dasar hubungan teoritikal adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas tersebut. Dengan demikian, model hasil analisis tetap layak dilakukan inferensi untuk pembuktian hipotesis. Stabilitas estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh melalui *bootstrapping process*. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t pada masing-masing jalur secara parsial diperoleh hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.16 dan Gambar 5.3 di halaman 188 yang menunjukkan hasil pengujian model struktural yang dikonversi dalam diagram jalur yang disesuaikan dengan tujuan studi.

**Tabel 5.16**  
**HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

No.	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	Standard Deviation	T-Statistics	p-value	Keterangan
1	DesFisk -> BljMod	0,074286	0,068899	1,078180	0,2824720	Non signifikan
2	DesFisk -> PertEk	-0,175335	0,081039	-2,163590	0,03188366 *)	Signifikan
3	DesFisk -> KesMasy	0,488138	0,083317	5,858783	0,0000000233792 *)	Signifikan
4	BljMod -> PertEk	-0,101261	0,071682	-1,412646	0,159577282	Non signifikan
5	BljMod -> KesMasy	0,069339	0,071100	0,975242	0,33081783	Non signifikan
6	PertEk -> KesMasy	-0,156687	0,078798	-1,988465	0,04835568 *)	Signifikan

**Sumber:** Tabel L.5.3 di halaman 362.

**Keterangan:** \*) signifikan karena nilai  $p\text{-value} \leq 5\%$ .

### 5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,074286, t-statistik sebesar 1,078180, dan *p-value* sebesar 0,2824720 yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar 0,074286 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat belanja modal, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti. Artinya, rendahnya proksi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan tingginya porsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengakibatkan kemampuan desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat kecil sekali.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar -0,175335, t-statistik sebesar -2,163590, dan *p-value* sebesar 0,03188366 yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar -0,175335 (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin

menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti. Ini bermakna bahwa dalam era otonomi daerah, adanya desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang berdampak pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana, aktivitas belanja dari pegawai negeri dari luar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, adanya belanja modal yang tidak produktif, dan investasi pemerintah yang bersifat jangka panjang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurun.



**Sumber:** Tabel L.5.3 di halaman 362. Data diolah.

**Gambar 5.3**  
**DIAGRAM JALUR HASIL PENGUJIAN *INNER WEIGHT***

3. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,488138, t-statistik sebesar 5,858783, dan p-value sebesar 0,0000000233792 yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar 0,488138 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti. Ini bermakna bahwa aspek efisiensi merupakan *raison d'etre* untuk desentralisasi fiskal. Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar -0,101261, t-statistik sebesar -1,412646, dan p-value sebesar 0,159577282 yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar -0,101261 (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat, yaitu belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti. Ini bermakna bahwa porsi APBD yang besar untuk Belanja Tidak Langsung, belanja modal tidak produktif, belanja modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, penyimpangan anggaran, dan pengaruh investasi swasta yang justru lebih berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga kesemuanya tersebut menjadi kontraksi bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,069339, t-statistik sebesar 0,975242, dan *p-value* sebesar 0,33081783 yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar 0,069339 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima, yaitu belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti. Ini bermakna bahwa Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah yang akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi terkendala. Hal ini disebabkan karena adanya enam karakteristik belanja modal sehingga belanja modal menjadi terbatas



kemampuannya dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, faktor belanja modal yang tidak produktif dan alokasi belanja modal untuk investasi jangka panjang menjadi kontraksi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar  $-0,156687$ , t-statistik sebesar  $-1,988465$ , dan *p-value* sebesar  $0,04835568$  yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Koefisien jalur sebesar  $-0,156687$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam, yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terbukti. Ini bermakna bahwa semua pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ketika menyusun target-target hasil pembangunan ekonomi selalu menggunakan salah satu asumsi, yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam persentase tertentu. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi tidak berarti ketika IPM meningkat tetapi di sisi lain IKD juga meningkat.

## BAB 6 PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini berdasarkan analisis hasil studi yang telah dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan melihat hubungan antarvariabel yang terjadi sebagai pembuktian hipotesis yang diajukan. Berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan berbagai hasil studi empirik yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu akan digunakan dalam pembahasan hasil studi.

Berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut akankah mendukung, menolak, atau mengembangkan studi teori yang sudah ada khususnya di bidang Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Berbagai hasil studi empirik yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu akankah memberikan kontribusi berupa temuan studi yang akan menjadi acuan studi selanjutnya, sebagai saran/rekomendasi untuk pengambilan keputusan secara praktis, atau memperkaya studi-studi sebelumnya. Dalam pembahasan akan dikemukakan berbagai data pendukung studi sehingga pembahasan hasil studi menjadi lebih berkualitas.

### **6.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,074286, t-statistik sebesar 1,078180, dan *p-value* sebesar 0,2824720 yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan ada penolakan terhadap hipotesis pertama. Dengan demikian, hipotesis pertama tidak

terbukti. Koefisien jalur sebesar 0,074286 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat belanja modal, dan sebaliknya.

Total Pengeluaran Daerah pada APBD meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen pada Total Pengeluaran Daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan. Belanja Langsung merupakan komponen pada Total Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Belanja Langsung terdapat komponen Belanja Modal. Oleh karena tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran Belanja Langsung termasuk komponen Belanja Modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Langsung yang di dalamnya terdapat komponen Belanja Modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Total Pendapatan Daerah di antaranya melalui peningkatan PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Oleh karena itu, apabila PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak rendah maka Total Pendapatan Daerah juga rendah sehingga kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan anggaran Belanja Langsung yang didalamnya terdapat Belanja Modal juga rendah. Bahkan apabila porsi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah sangat rendah maka desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal karena keterbatasan sumber pendapatan untuk anggaran belanja modal.

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran

yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana termasuk belanja modal sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Saragih, 2003:40).

Desentralisasi fiskal adalah sisi lain dari otonomi daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar otonomi daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten/kota, maka harus ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom yang disebut dengan desentralisasi yang meliputi desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Dengan demikian, dalam otonomi daerah ada kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. Menurut Priyarsono dkk (2010), Saragih (2003:40), Mardiasmo (2002:1-7), dan Reksohadiprodjo (2001:153-158), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai dari daerah otonom.

Desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan persen dalam tahun 2004 s.d 2008 tampak pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340. Berdasarkan kedua tabel tersebut tampak selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%. Apabila diperhatikan lebih lanjut, 5 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20% hampir semuanya kota kecuali 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus. Besarnya rata-rata nilai desentralisasi fiskal Kabupaten Kudus di atas 20% disebabkan faktor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus yang relatif besar karena kontribusi dari industri rokok.

Apabila dibandingkan dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan persen dalam tahun 1998 s.d 2000 sebagai tahun sebelum dilaksanakannya otonomi daerah dengan sesudah tahun 2000 sebagai tahun awal dilaksanakannya otonomi daerah maka tampak ada perbedaan nilai walaupun relatif kecil. Tampak pada Tabel 6.1 di halaman 196, rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 untuk daerah kabupaten relatif lebih rendah daripada daerah kota. Kondisi ini sama dengan rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2008 di mana untuk daerah kabupaten relatif lebih rendah daripada daerah kota.

Rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 lebih tinggi daripada tahun 2001 s.d 2008, kecuali untuk Kabupaten Kudus

**Tabel 6.1**  
**PROKSI DESENTRALISASI FISKAL PADA APBD KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 1998 s.d 2000 dan 2001 s.d 2008 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	1998/1999	1999/2000	2000	Rata-Rata 1998 s.d 2000	Rata-Rata 2001 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	53,22	12,82	15,03	27,03	13,02
2	Kabupaten Banyumas	16,04	17,52	18,93	17,50	16,43
3	Kabupaten Batang	20,33	14,93	92,51	42,59	13,55
4	Kabupaten Blora	19,11	17,38	14,48	16,99	17,10
5	Kabupaten Boyolali	32,60	15,59	13,31	20,50	14,51
6	Kabupaten Brebes	18,85	15,42	17,82	17,36	12,30
7	Kabupaten Cilacap	17,22	23,91	21,10	20,74	16,90
8	Kabupaten Demak	17,85	17,21	75,93	37,00	12,11
9	Kabupaten Grobogan	19,34	16,27	24,98	20,20	14,35
10	Kabupaten Jepara	25,94	20,28	21,01	22,41	17,71
11	Kabupaten Karanganyar	30,75	18,83	21,06	23,55	14,59
12	Kabupaten Kebumen	21,32	12,04	7,53	13,63	12,38
13	Kabupaten Kendal	12,70	20,72	17,93	17,11	15,76
14	Kabupaten Klaten	25,08	10,70	11,22	15,66	9,15
15	Kabupaten Kudus	25,54	21,94	10,86	19,45	21,55
16	Kabupaten Magelang	26,05	16,19	10,64	17,63	15,34
17	Kabupaten Pati	15,12	37,74	21,88	24,91	16,67
18	Kabupaten Pekalongan	23,11	19,73	16,40	19,75	13,91
19	Kabupaten Pemasang	18,60	14,84	14,84	16,09	14,08
20	Kabupaten Purbalingga	18,95	14,44	14,44	15,94	13,75
21	Kabupaten Purworejo	11,30	13,54	14,23	13,02	12,59
22	Kabupaten Rembang	15,64	16,86	22,71	18,40	14,57
23	Kabupaten Semarang	22,43	21,36	40,65	28,14	18,03
24	Kabupaten Sragen	25,17	15,35	14,29	18,27	13,64
25	Kabupaten Sukoharjo	16,35	16,48	13,35	15,40	13,62
26	Kabupaten Tegal	18,57	16,61	16,67	17,28	15,09
27	Kabupaten Temanggung	19,19	17,89	17,87	18,31	11,85
28	Kabupaten Wonogiri	18,85	15,99	16,18	17,01	11,62
29	Kabupaten Wonosobo	17,27	15,92	13,23	15,48	13,31
30	Kota Magelang	18,56	32,86	32,86	28,09	19,65
31	Kota Pekalongan	40,25	19,95	10,72	23,64	16,77
32	Kota Salatiga	39,53	36,56	32,94	36,34	22,69
33	Kota Semarang	42,60	43,86	40,65	42,37	47,79
34	Kota Surakarta	46,88	27,77	32,66	35,77	25,08
35	Kota Tegal	43,08	27,41	29,76	33,42	24,99

**Sumber:** <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

dan Kota Semarang. Lebih tingginya rasio antara PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 daripada tahun 2001 s.d 2008 karena pertumbuhan Total Pengeluaran Daerah yang lebih cepat daripada pertumbuhan PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Hal ini terjadi karena desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah.

Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Ketentuan mengenai belanja modal baru ada mulai APBD kabupaten/kota tahun 2001 sebagai bagian dari Belanja Pembangunan atau Belanja Publik. Sebelum tahun 2001, data belanja modal berada dalam pos Pengeluaran Pembangunan yang berujud pengeluaran untuk Sektor Industri; Sektor Pertanian dan Kehutanan; Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi; Sektor Tenaga Kerja; Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah, dan Koperasi; Sektor Transportasi; Sektor Pertambangan dan Energi; Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah; Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman; Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan, Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah Raga; Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja; Sektor

Perumahan dan Pemukiman; Sektor Agama; Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Sektor Hukum; Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa; Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahannya; Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum; dan Pembayaran Kembali Pinjaman. Oleh karena itu, untuk melihat perbandingan pengeluaran Belanja Modal antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah digunakan data Belanja Publik atau Belanja Pembangunan atau Belanja Langsung.

KONVERSI BELANJA NEGARA MENURUT JENIS BELANJA DALAM I-ACCOUNT	
FORMAT LAMA	FORMAT BARU
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b> <b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b> 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak <b>II. Penerimaan Hibah</b> <b>B. BELANJA NEGARA</b> <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b> 1. Pengeluaran Rutin a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang d. Subsidi e. Pengeluaran Rutin Lainnya 2. Pengeluaran pembangunan <b>II. Belanja Untuk Daerah</b> 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian <b>C. Keseimbangan Primer</b> <b>D. Surplus/Defisit Anggaran</b> <b>E. Pembiayaan</b>	<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b> <b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b> 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak <b>II. Penerimaan Hibah</b> <b>B. BELANJA NEGARA</b> <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain <b>II. Belanja Untuk Daerah</b> 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian <b>C. Keseimbangan Primer</b> <b>D. Surplus/Defisit Anggaran</b> <b>E. Pembiayaan</b>

Sumber: Suminto (2004:28).

**Gambar 6.1**  
**KONVERSI BELANJA NEGARA MENURUT JENIS BELANJA**  
**DI INDONESIA, TAHUN 2001**

Berdasarkan Tabel 5.9 di halaman 161, sebagian besar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai rata-rata Belanja Modal relatif besar, sedang untuk daerah kota, yaitu Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp94.681,95



juta dan Kota Surakarta dengan nilai sebesar Rp75.683,95 juta. Berdasarkan Tabel L.3.10 di halaman 328, sebagian besar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai rata-rata pertumbuhan Belanja Modal relatif besar, sedang untuk daerah kota, yaitu Kota Semarang (54,92%) dan Kota Salatiga (52,1%).

Berdasarkan Tabel L.3.12 di halaman 330, tampak dari 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20%, sedang 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%. Berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331 tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20% pasti mempunyai proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20% dan sebaliknya. Hal ini nampak pada Tabel 6.2 di halaman 201 yang menunjukkan perkembangan dan rata-rata Belanja Langsung yang didalamnya terdapat Belanja Modal sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 2001.

Berdasarkan data pada Tabel 6.2 di halaman 201, tampak perkembangan proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 pada sebagian besar kabupaten/kota cenderung menurun. Artinya, apabila proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah cenderung menurun maka proporsi Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung juga akan menurun. Hal ini tampak pada rata-rata proporsi Belanja Langsung tahun 1998 s.d 2000 yang nilainya berkisar antara 15,63% (Kabupaten Magelang) s.d 33,9% (Kota Surakarta). Apabila

dibandingkan dengan proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 sebagai tahun sebelum dilaksanakannya otonomi daerah dengan sesudah tahun 2000 sebagai tahun awal dilaksanakannya otonomi daerah maka tampak tidak ada perbedaan nilai. Hal ini tampak pada rata-rata proporsi Belanja Langsung tahun 2001 s.d 2008 yang nilainya berkisar antara 17,58% (Kabupaten Klaten) s.d 35,25% (Kota Tegal). Dengan demikian, proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah relatif tetap.

Berdasarkan Tabel 6.2 di halaman 201, tampak proporsi Belanja Langsung yang didalamnya terdapat Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah relatif tetap. Artinya, pelaksanaan otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal mulai 1 Januari 2001 berpengaruh kecil terhadap Belanja Langsung pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan pendapat Smith dalam Pressman (2000:34-36) karena pengenaan pajak terhadap pihak yang merugikan pihak lain atau pemberian subsidi kepada pihak yang dirugikan masih relatif rendah seperti yang ditunjukkan pada rendahnya proporsi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang tampak pada Tabel 6.1 di halaman 196.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama khususnya yang berkaitan dengan analisis besarnya proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah sesuai dengan pendapat Oates (1993) yang menjelaskan bahwa proporsi anggaran pengeluaran publik di 43 negara industri sebesar 65% s.d 90%. Artinya, kontribusi anggaran Belanja Langsung terhadap total

**Tabel 6.2**  
**PROPORSI BELANJA LANGSUNG TERHADAP TOTAL**  
**PENGELUARAN DAERAH PADA APBD KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 1998 s.d 2000 dan 2001 s.d 2008 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	1998/1999	1999/2000	2000	Rata-Rata 1998 s.d 2000	Rata-Rata 2001 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	46,34	20,65	18,18	28,39	33,16
2	Kabupaten Banyumas	22,74	19,26	19,70	20,57	20,82
3	Kabupaten Batang	16,38	26,31	32,30	25,00	35,15
4	Kabupaten Blora	21,42	22,38	14,12	19,31	21,38
5	Kabupaten Boyolali	39,43	19,51	19,24	26,06	28,29
6	Kabupaten Brebes	15,96	18,40	21,20	18,52	28,91
7	Kabupaten Cilacap	22,65	29,99	27,15	26,60	33,35
8	Kabupaten Demak	23,44	23,09	15,88	20,80	24,85
9	Kabupaten Grobogan	24,01	20,28	17,03	20,44	34,77
10	Kabupaten Jepara	20,54	24,35	24,76	23,22	30,82
11	Kabupaten Karanganyar	46,96	20,71	18,74	28,80	24,15
12	Kabupaten Kebumen	20,89	20,90	12,84	18,21	22,91
13	Kabupaten Kendal	21,32	25,13	21,93	22,79	29,74
14	Kabupaten Klaten	26,04	15,58	16,36	19,33	17,58
15	Kabupaten Kudus	36,27	18,93	17,92	24,37	32,21
16	Kabupaten Magelang	18,07	14,65	14,15	15,63	22,48
17	Kabupaten Pati	22,73	43,63	18,40	28,25	27,01
18	Kabupaten Pekalongan	18,79	15,96	20,03	18,26	23,52
19	Kabupaten Pemasang	22,17	23,02	23,02	22,74	31,20
20	Kabupaten Purbalingga	21,56	22,63	22,63	22,27	31,24
21	Kabupaten Purworejo	37,80	17,96	18,49	24,75	20,10
22	Kabupaten Rembang	15,07	24,33	23,55	20,98	21,64
23	Kabupaten Semarang	21,45	23,69	30,88	25,34	27,40
24	Kabupaten Sragen	25,20	15,13	17,45	19,26	30,00
25	Kabupaten Sukoharjo	27,15	20,89	18,05	22,03	26,46
26	Kabupaten Tegal	22,98	27,66	27,28	25,97	29,27
27	Kabupaten Temanggung	17,25	16,01	22,07	18,44	25,94
28	Kabupaten Wonogiri	19,58	21,53	18,17	19,76	25,01
29	Kabupaten Wonosobo	22,81	24,93	19,94	22,56	32,59
30	Kota Magelang	20,90	25,72	25,72	24,11	34,78
31	Kota Pekalongan	18,33	28,26	28,36	24,98	32,96
32	Kota Salatiga	38,96	19,24	25,70	27,97	34,09
33	Kota Semarang	16,23	21,20	30,88	22,77	21,24
34	Kota Surakarta	20,92	43,34	37,42	33,90	20,54
35	Kota Tegal	16,17	26,92	25,85	22,98	35,25

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

anggaran belanja relatif besar untuk negara industri (65% s.d 90%) dan relatif kecil untuk negara sedang berkembang seperti Indonesia (15% s.d 35%).

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan pendapat Bhal (1999) yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan oleh 12 ketentuan peraturan. Berdasarkan 12 ketentuan peraturan tersebut, desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum berhasil karena belum mampu memenuhi ketentuan peraturan, seperti pemerintah pusat tidak mempunyai kekuatan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan terjadinya penyimpangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti ditunjukkan pada Tabel L.3.23 di halaman 341; kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai proporsi PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah yang rendah seperti ditunjukkan pada Tabel 6.1 di halaman 196; pemerintah pusat belum mampu menjadi kendali dari desentralisasi fiskal yang disusunnya khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan terjadinya penyimpangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti ditunjukkan pada Tabel L.3.23 di halaman 341; dan belum adanya paksaan yang ekstra keras dalam memperhatikan kendala anggaran.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama tidak sesuai dengan pendapat Fuad dkk (2005:245) tentang *The Tiebout Model* karena masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai keterbatasan untuk memilih tempat tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara layanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kesesuaian antara

pilihan lokasi tempat tinggal dan lokasi pekerjaan, sehingga masyarakat tidak memungkinkan meninggalkan wilayahnya, walaupun layanan publik yang diperolehnya tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkannya. Pilihan untuk mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD kabupaten/kota dari masyarakat relatif sulit dilakukan karena kondisi politik yang menunjukkan bahwa status keanggotaan DPRD sebagai wakil partai politik bukan sebagai wakil rakyat sehingga keawatiran anggota DPRD untuk memperjuangkan tuntutan rakyat menjadi tinggi karena faktor *re-call* keanggotaan di DPRD. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama juga tidak sesuai dengan pendapat Mangkoesubroto (1994:3-23) yang menjelaskan bahwa apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusinya terhadap pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah satu hasil studi Vazques dan Robert M. McNab (1997) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan ketidakefisienan pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota atau pemerintahan yang berada pada tingkat yang lebih rendah di daerah. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat anggaran Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang rendah berkisar antara 15% s.d 35%. Rendahnya proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat anggaran Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan ketidakefisienan APBD karena besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap

Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 65% s.d 85%. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 6.3 di halaman 205. Tampak proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 rata-rata berkisar antara 44% s.d 66%. Artinya, dari proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 65% s.d 85%, sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah satu hasil studi Mursinto (2004), yaitu kontribusi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Pengeluaran Total Daerah berkisar antara 10,86% s.d 59,96% sehingga sesuai juga dengan salah satu kesimpulan studi Mursinto yang menunjukkan bahwa berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal inilah yang menurut Green disebut sebagai desentralisasi administratif (Green, 2005: 4-6). Hal ini ditunjukkan dengan Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340. Selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/ kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah

**Tabel 6.3**  
**PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL**  
**PENGELUARAN DAERAH PADA APBD KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata 2004 s.d 2008
1	Kabupaten Banjarnegara	61,65	56,79	50,39	50,18	53,58	54,52
2	Kabupaten Banyumas	73,57	67,88	58,81	57,04	60,95	63,65
3	Kabupaten Batang	48,71	53,99	52,46	43,78	48,70	49,53
4	Kabupaten Blora	53,10	57,01	56,88	62,77	58,81	57,71
5	Kabupaten Boyolali	69,42	65,27	61,93	49,98	58,34	60,99
6	Kabupaten Brebes	62,63	63,91	59,36	46,35	56,17	57,68
7	Kabupaten Cilacap	69,04	64,88	49,97	41,55	50,11	55,11
8	Kabupaten Demak	56,22	52,79	47,93	48,71	48,84	50,90
9	Kabupaten Grobogan	53,02	56,73	55,57	50,29	51,44	53,41
10	Kabupaten Jepara	57,13	55,01	47,64	40,10	54,25	50,82
11	Kabupaten Karanganyar	67,84	60,89	57,44	60,33	61,97	61,69
12	Kabupaten Kebumen	67,22	67,66	54,91	50,43	61,17	60,28
13	Kabupaten Kendal	52,85	56,38	43,92	51,05	53,07	51,45
14	Kabupaten Klaten	75,53	70,82	59,66	58,78	62,06	65,37
15	Kabupaten Kudus	59,35	46,82	53,23	48,81	47,82	51,21
16	Kabupaten Magelang	67,80	63,82	55,47	54,47	58,58	60,03
17	Kabupaten Pati	63,33	63,60	57,66	48,48	56,59	57,93
18	Kabupaten Pekalongan	54,05	51,37	51,87	55,40	57,89	54,12
19	Kabupaten Pemasang	57,08	59,77	46,67	55,52	53,53	54,52
20	Kabupaten Purbalingga	55,80	55,55	49,63	56,04	47,63	52,93
21	Kabupaten Purworejo	66,44	65,77	60,87	58,86	64,00	63,19
22	Kabupaten Rembang	60,50	63,01	51,22	46,72	54,67	55,22
23	Kabupaten Semarang	62,87	64,15	57,18	52,99	58,27	59,09
24	Kabupaten Sragen	71,55	68,48	56,27	50,68	56,51	60,70
25	Kabupaten Sukoharjo	69,05	67,21	52,15	47,93	61,05	59,48
26	Kabupaten Tegal	57,13	58,59	50,87	55,01	55,18	55,36
27	Kabupaten Temanggung	66,26	75,56	55,46	48,66	50,69	59,33
28	Kabupaten Wonogiri	71,48	72,26	55,59	65,93	56,05	64,26
29	Kabupaten Wonosobo	54,54	54,15	51,73	50,50	49,30	52,04
30	Kota Magelang	55,07	58,70	54,55	51,20	45,59	53,02
31	Kota Pekalongan	47,71	48,31	41,00	41,07	43,60	44,34
32	Kota Salatiga	51,91	54,29	49,73	56,46	49,32	52,34
33	Kota Semarang	61,69	58,70	59,92	43,18	53,86	55,47
34	Kota Surakarta	67,25	63,29	54,64	56,12	54,62	59,18
35	Kota Tegal	41,91	42,99	46,38	48,90	53,07	46,65

**Sumber:** <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

satu hasil studi Adi (2005b) yang menjelaskan bahwa tidak semua daerah benar-

benar siap memasuki desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340, di mana selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%. Di samping itu, rendahnya proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat anggaran Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang rendah berkisar antara 15% s.d 35% sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah kesulitan untuk memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah satu hasil studi Vazques dan Mark Rider (2006) yang menjelaskan bahwa pemerintah China dan India mempunyai kesamaan dalam hal desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan implementasi yang secara simpel dan bertahap tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara *big-bang* dan rumit. Artinya, Desentralisasi Fiskal yang berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 disebabkan karena pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *big-bang*, tidak bertahap seperti China dan India. Hal ini dapat dimengerti karena tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kondisi yang sama pada



1 Januari 2001 termasuk perkembangan pada tahun berikutnya sebagai awal pelaksanaan dan monitoring otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kondisi yang tidak sama itu ditunjukkan dari analisis Tipologi Klassen yang membagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi 4 kelompok daerah seperti yang ditunjukkan pada Tabel L.3.1 di halaman 319 dan Gambar 5.2 di halaman 154 sehingga di Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 kabupaten yang berada pada karakteristik Daerah Berkembang, 5 kabupaten yang berada pada karakteristik Daerah Prima, 1 kabupaten dan 2 kota yang berada pada karakteristik Daerah Potensial, serta 13 kabupaten dan 4 kota yang berada pada karakteristik Daerah Terbelakang. Berdasarkan Tabel 5.7 di halaman 155, tampak sebanyak 28,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Berkembang, sebanyak 14,29% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Prima, sebanyak 8,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Potensial, dan sebanyak 48,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Terbelakang. Karakteristik ini akan mempengaruhi kemampuan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah satu hasil studi Suhendra dan Hidayat Amir (2006) yang menjelaskan bahwa kekuatan dan peranan perpajakan di tingkat lokal kabupaten/kota masih rendah karena pemerintah kabupaten/kota masih bergantung dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya proporsi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti ditunjukkan pada Tabel 6.1 di halaman 196.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis pertama sesuai dengan salah satu hasil studi Priyarsono dkk (2010) yang menjelaskan bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung masih mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung seperti ditunjukkan pada Tabel L.3.13 di halaman 331 bahwa besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 65% s.d 85% sedang proporsi Belanja Langsung atau (didalamnya terdapat Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 15% s.d 35%; sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sehingga kemandirian daerah belum optimal seperti ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340 bahwa selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai kemandirian daerah di bawah 20% dan dana perimbangan di atas 80%. Koefisien jalur bertanda positif mendukung penjelasan tersebut bahwa semakin besar nilai proksi desentralisasi fiskal, maka pengeluaran belanja modal juga semakin besar, dan sebaliknya. Tetapi karena nilai proksi desentralisasi fiskal terlalu rendah, maka kemampuannya mempengaruhi pengeluaran belanja modal menjadi terbatas kecil sekali.

## **6.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar  $-0,175335$ ,  $t$ -statistik sebesar  $-2,163590$ , dan  $p$ -value sebesar  $0,03188366$  yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu  $5\%$ . Hal ini menunjukkan ada penerimaan terhadap hipotesis kedua. Dengan demikian, hipotesis kedua terbukti. Koefisien jalur sebesar  $-0,175335$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.

Belanja Tidak Langsung merupakan komponen pada Pengeluaran Daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan, misalnya untuk membayar gaji pegawai negeri dan honorarium sebagai kompensasi bagi pegawai negeri terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan di daerah. Penerimaan gaji pegawai negeri dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Koefisien jalur yang bertanda negatif menunjukkan bahwa penerimaan gaji pegawai negeri dan honorarium di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut tetapi

dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari kabupaten/kota lain provinsi lain sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang tampak pada Tabel 5.10 di halaman 168. Hal ini diperkuat dengan data pada Tabel 5.6 di halaman 151 yang menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak membeli barang dan jasa dari kabupaten/kota/provinsi lain bahkan impor dari negara lain sehingga ekspor neto rata-rata selama tahun 2004 s.d 2008 bertanda negatif. Dengan demikian, alokasi Belanja Tidak Langsung yang sebagian besar berupa Belanja Pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak digunakan untuk berkonsumsi membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari luar Provinsi Jawa Tengah sehingga kenaikan anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurunkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

Berdasarkan Tabel 5.3 di halaman 148, tampak 19 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah PDRBnya masih didominasi sektor pertanian. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di sebagian besar daerah meskipun bukan sebagai kontribusi terbesar dari PDRB Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kabupaten mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan sedang daerah perkotaan umumnya mengandalkan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan lahan pertanian di daerah perkotaan semakin berkurang dan kegiatan perekonomian lebih mengandalkan pada sektor non pertanian. Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sedang sektor jasa-jasa lebih dominan di Kota Magelang dan Kota Salatiga.

Menurut Mahi (2005c), peningkatan pengeluaran daerah pada APBD kabupaten/kota di Indonesia merupakan bentuk desentralisasi fiskal dalam pengeluaran APBD kabupaten/kota. Prioritas pembangunan sektoral dari pengeluaran daerah banyak pada sektor transportasi, tetapi tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan sektor transportasi memerlukan proses investasi jangka panjang dan pemanfaatannya terkait ada tidaknya produk unggulan untuk diproduksi dan dijual dengan menggunakan sarana transportasi tersebut.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan pendapat Musgrave *and* Musgrave (1989:6) yang menjelaskan bahwa pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk melaksanakan fungsinya mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak dan Petty dalam Pressman (2000:8-9) yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris bukan melalui perdagangan internasional tetapi melalui keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan pendapat Smith dalam Pressman (2000:34-36) yang menjelaskan bahwa pengenaan pajak dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi maksimum dan Suparmoko (2002:15-22) yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan layanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua tidak sesuai dengan pendapat Oates (1993) yang menjelaskan bahwa sentralisasi fiskal berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat pendapatan per kapita dan sesuai pendapat Mulyana dkk (2006:277-285) yang menjelaskan bahwa dalam model federalisme fiskal, kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah bersifat *top down* dan

berpola dekonsentrasi atau maksimalnya berpola delegasi. Pola delegasi ini menuntut kemampuan keuangan yang tinggi dengan dengan kemandirian antara 75% s.d 100% (Halim dalam Mursinto, 2004:37). Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua juga tidak sesuai dengan pendapat Halder (2007) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal secara umum mempunyai korelasi positif dengan *economic outcome* yang menguntungkan.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan pendapat Prud'Homme (1994) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal membuat kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah kabupaten/kota dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) sehingga desentralisasi fiskal dari pusat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih rendah. Hal ini dalam faktanya sering terjadi ketika situasi ekonomi makro pusat dan daerah tidak sama dan ketika bupati/walikota tidak berasal dari partai politik yang sama dengan partai politik yang mengusung presiden terpilih. Hal ini nampak sekali dengan bupati dan walikota atau wakilnya di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang sebanyak 71,43% berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Kompas, 26 Mei 2011).

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan pendapat Bhal (1999) yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan oleh 12 ketentuan peraturan. Desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum berhasil dengan ditunjukkannya penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum mampu memenuhi ketentuan peraturan, seperti pemerintah pusat tidak mempunyai kekuatan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan terjadinya penyimpangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; karena kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai proporsi PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah yang rendah seperti ditunjukkan pada Tabel 6.1 di halaman 196; karena pemerintah pusat belum mampu menjadi kendali dari desentralisasi fiskal yang disusunnya khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan terjadinya penyimpangan APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti ditunjukkan pada Tabel L.3.23 di halaman 341; dan karena belum adanya paksaan yang ekstra keras dalam memperhatikan kendala anggaran.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Vazques dan Robert M. McNab (1997) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Adi (2005b) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan daerah menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan salah satu hasil studi Parhah (2002) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa berdasarkan penggunaan indikator-indikator sebagai ukuran variabel, yaitu variabel Kemampuan Pemerintah diukur dengan indikator PAD dan Belanja Modal dan variabel

Perkembangan Ekonomi diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja maka kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan ekonomi sehingga apabila kemampuan pemerintah meningkat maka perkembangan ekonomi Kota Batam juga meningkat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Widhiyanto (2008) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia mampu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan Wibowo (2008) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999 s.d 2004. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua juga tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Sasana (2009) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Priyarsono dkk (2010) yang menjelaskan bahwa PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan salah satu hasil studi Parhah (2002) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta Ismail dkk (2004) yang menjelaskan bahwa desentralisasi penerimaan yang lebih besar daripada desentralisasi pengeluaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal yang berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama



melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana termasuk Belanja Modal sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan studi Mursinto (2004) yang menjelaskan bahwa berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal inilah yang menurut Green disebut sebagai desentralisasi administratif (Green, 2005: 4-6). Hal ini ditunjukkan dengan Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel 6.1 di halaman 196. Selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan salah satu hasil studi Vazques dan Mark Rider (2006) yang menjelaskan bahwa pemerintah China dan India mempunyai kesamaan dalam hal desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan implementasi yang secara simpel dan bertahap tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara *big-bang* dan rumit. Artinya, Desentralisasi Fiskal yang berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 karena pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah untuk semua

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *big-bang*, tidak bertahap seperti China dan India. Hal ini dapat dimengerti karena tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kondisi yang sama pada 1 Januari 2001 termasuk perkembangan pada tahun berikutnya sebagai awal pelaksanaan dan monitoring otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kondisi yang tidak sama itu ditunjukkan dari analisis Tipologi Klassen yang membagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi 4 kelompok daerah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.2 di halaman 154 dan Tabel 5.7 di halaman 155 sehingga di Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 kabupaten yang berada pada karakteristik Daerah Berkembang, 5 kabupaten yang berada pada karakteristik Daerah Prima, 1 kabupaten dan 2 kota yang berada pada karakteristik Daerah Potensial, serta 13 kabupaten dan 4 kota yang berada pada karakteristik Daerah Terbelakang. Berdasarkan Tabel 5.8 di halaman 156, tampak sebanyak 28,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Berkembang, sebanyak 14,29% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Prima, sebanyak 8,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Potensial, dan sebanyak 48,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Terbelakang. Posisi ini akan mempengaruhi kemampuan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan salah satu hasil studi Suhendra dan Hidayat Amir (2006) yang menjelaskan bahwa

kekuatan dan peranan perpajakan di tingkat lokal kabupaten/kota masih rendah karena pemerintah kabupaten/kota masih bergantung dari pemerintah pusat sehingga desentralisasi fiskal mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya proporsi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti ditunjukkan pada Tabel 6.1 di halaman 196.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan salah satu hasil studi Priyarsono dkk (2010) yang menjelaskan bahwa sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sehingga kemandirian daerah belum optimal sehingga desentralisasi fiskal mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156 bahwa selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai kemandirian daerah di bawah 20% dan dana perimbangan di atas 80%.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kedua sesuai dengan hasil studi Akai dkk (2007) yang menjelaskan bahwa apabila desentralisasi fiskal meningkat maka kelabilan ekonomi akan menurun dan apabila desentralisasi fiskal menurun maka kelabilan ekonomi akan meningkat. Berdasarkan proksi desentralisasi fiskal seperti ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156, nilainya berfluktuasi cenderung menurun sehingga berdampak pada peningkatan kelabilan ekonomi seperti ditunjukkan pada pada Tabel 5.10 di halaman 168 dengan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang

bervariatif antarkabupaten/kota dan antartahun dengan kecenderungan menurun.

Kedua studi teoritis dan ketujuh studi empiris bertentangan dengan temuan hasil studi yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya proksi kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti yang ditunjukkan pada pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel 5.10 di halaman 168 bahwa selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai kemandirian daerah di bawah 20%.

Berdasarkan Tipologi Klassen seperti ditunjukkan pada Gambar 5.2 di halaman 154 dan Tabel 5.7 di halaman 155, karakteristik pembangunan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa sebanyak 28,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Berkembang, sebanyak 14,29% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Prima, sebanyak 8,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Potensial, dan sebanyak 48,57% wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam karakteristik Daerah Terbelakang. Karakteristik pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini akan mempengaruhi kemampuan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Karakteristik pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tipologi Klassen tersebut didukung oleh Tabel 5.3 di halaman 148 yang

menunjukkan bahwa PDRB 19 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah masih didominasi sektor pertanian yang mempunyai nilai tambah rendah. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di sebagian besar daerah meskipun bukan sebagai kontribusi terbesar dari PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Sepertiga PDRB Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh kontribusi dari PDRB Kota Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Cilacap yang sebesar 32,81%. Ketiga PDRB kabupaten/kota tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yang besar karena Kota Semarang adalah ibukota Provinsi yang dominan dengan perdagangan dan jasa-jasa, Kabupaten Kudus terkenal dengan industri rokok yang menjadi sektor dominan, dan Kabupaten Cilacap yang didominasi oleh sektor migas, walaupun ketiganya rentan terhadap stabilitas perekonomian makro Indonesia dan internasional (Tamtomo, 2010:29).

Pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan memberikan kontribusi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga hal pokok yang menjadi kendala dalam pembangunan kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pembangunan kawasan strategis belum berjalan secara optimal, kerjasama antardaerah masih dalam tahap awal, dan dukungan dari sistem sarana dan prasarana wilayah juga belum maksimal.

Hal ini tampak pada pengembangan jalan tol Semarang-Surakarta dan Transjawa; peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang; peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel; pembukaan kembali jalur kereta api komuter dan pariwisata; pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi di Cilacap dan Kendal; pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas,

Batang, dan Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta; peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi, dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora yang belum optimal dalam pelaksanaannya.

Menurut Bappenas (2008:7), keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian desentralisasi fiskal dalam mendorong pembangunan kabupaten/kota secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban desentralisasi fiskal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan desentralisasi fiskal perlu dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja keuangan yang tidak saja merefleksikan kinerja keuangan dari sisi keuangan pemerintah daerah secara mikro tetapi juga secara makro, sehingga diperoleh indikator yang terukur, berimbang dan komprehensif. Indikator tersebut adalah Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP) yang menunjukkan proporsi PAD terhadap PDRB kabupaten/kota dalam satuan persen.

Indikator KPP untuk menunjukkan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*) masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan Tabel L.3.26 di halaman 344, tampak rata-rata KPP kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 relatif rendah sekali dengan kisaran nilai antara 0,24% (Kabupaten Kudus) s.d 3,44% (Kota Tegal). Kabupaten/kota lain yang mempunyai KPP relatif besar daripada 2% hanya Kota Magelang (2,35%) dan Kota Salatiga (2,58%).

Pencapaian KPP kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008

yang rendah memberikan kontribusi terhadap kegagalan desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Dengan demikian, berbagai kondisi tersebut di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga berpengaruh negatif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah seperti yang terjadi dengan hasil studi ini.

### 6.3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,488138, t-statistik sebesar 5,858783, dan p-value sebesar 0,0000000233792 yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan ada penerimaan terhadap hipotesis ketiga. Dengan demikian, hipotesis ketiga terbukti. Koefisien jalur sebesar 0,488138 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai proksi desentralisasi fiskal, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya.

Variabel kesejahteraan masyarakat merupakan variabel laten. Sebagai variabel laten, variabel kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD). Penggunaan kedua indikator kesejahteraan masyarakat (IPM dan IKD) untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dari sisi positif (IPM) dan sisi negatif (IKD). Hal ini sesuai dengan tanda positif (+) atau tanda negatif (-) pada koefisien *outer loading* yang menunjukkan arah kontribusi seperti yang tampak pada Tabel 5.14 di halaman 183,

yaitu *loading factor* IPM sebesar 0,903 dan IKD -0,881. Dengan demikian, tanda positif (+) pada koefisien *factors loading* IPM menunjukkan bahwa kontribusi IPM terhadap variabel kesejahteraan masyarakat bersamaan arah, artinya apabila kontribusi IPM meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat, sebaliknya apabila kontribusi IPM menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun. Tanda negatif (-) pada koefisien *factors loading* IKD menunjukkan bahwa kontribusi IKD terhadap variabel kesejahteraan masyarakat berbeda arah, artinya apabila kontribusi IKD meningkat maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat menurun, sebaliknya apabila kontribusi IKD menurun maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat meningkat.

Besarnya kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel laten dapat dilihat dari koefisien *outer loading*. Semakin tinggi koefisien *outer loading* dalam angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin besar kontribusinya dalam menentukan variabel laten, sebaliknya semakin rendah koefisien *outer loading* dalam angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin kecil kontribusinya dalam menentukan variabel laten. Berdasarkan Tabel 5.14 di halaman 183, tampak kontribusi indikator IPM lebih daripada indikator IKD, karena koefisien *loading factor* IPM (0,903) lebih besar daripada koefisien *loading factor* IKD (0,881). Dengan demikian, indikator IPM lebih kuat sebagai pengukur variabel kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan indikator IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sejahtera tetapi kriminalitas tetap ada.

Dimensi ekonomi dari suatu kebijakan keuangan publik adalah stabilitas makro ekonomi, keadilan (*equity*), dan efisiensi (Musgrave *and* Musgrave, 1989:6). Aspek



efisiensi merupakan *raison d'etre* untuk desentralisasi fiskal. Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Usman, 2001:24). Argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para penduduk dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat (Hirawan, 2007:10), (Adi dkk, 2005a:16-22), dan (Susanto, 2004:4-16).

Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibandingkan pemerintah pusat (Erfanie, 2004:117-134). Menurut Solihin dan Niken Ajeng Lestari (2010), desentralisasi fiskal akan mengarahkan program pembangunan pemerintah pada kepentingan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat.

Berdasarkan Tabel 5.8 di halaman 156, tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%. Apabila diperhatikan lebih lanjut, 5 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20% hampir semuanya kota kecuali 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus.

Berdasarkan nilai desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti pada Tabel 5.8 di halaman 156, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan *loading factor* IPM sebesar 0,903 dan IKD -0,881. Berdasarkan Tabel 5.11 di halaman 171, tampak angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengalami kenaikan. Hal lain yang dapat dilihat dari Tabel 5.11 di halaman 171 adalah angka IPM untuk kota cenderung lebih besar daripada angka IPM untuk kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Komponen dalam IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita Riil Disesuaikan per kabupaten/kota bervariasi antarkabupaten/kota dan antartahun. Berdasarkan Tabel L.3.17 di halaman 335, tampak angka harapan hidup masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Berdasarkan Tabel L.3.18 di halaman 336, tampak angka melek huruf masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Berdasarkan Tabel L.3.19 di halaman 337, tampak rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik. Berdasarkan Tabel L.3.20 di halaman 338, tampak pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik.

Berdasarkan Tabel 5.12 di halaman 175, tampak angka IKD yang cenderung semakin besar adalah angka IKD di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Boyolali, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Pekalongan,

Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, serta Kota Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Tegal, sedang angka IKD yang cenderung semakin kecil adalah angka IKD di Kabupaten Banyumas, Blora, Brebes, Demak, Grobogan, Kudus, Magelang, Rembang, Semarang, Temanggung, serta Kota Magelang dan Salatiga. Sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai rata-rata IKD relatif besar adalah daerah kota, sedang untuk daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang (0,5794). Besarnya angka IKD di daerah kota didominasi oleh kejahatan jenis pencurian kendaraan bermotor per 1.000 penduduk.

Desentralisasi fiskal mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi semakin baik tetapi ada aspek lain dari peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, turunnya IKD, dan naiknya IKD di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tetapi tidak merata sehingga tampak pada peningkatan angka kejahatan per 1.000 penduduk untuk kabupaten/kota tertentu.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Mangkoesubroto (1994:6) yang menjelaskan bahwa pemerintah melalui desentralisasi fiskal mempunyai peran penting dalam memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti prasarana jalan dan bendungan yang kesemuanya berkaitan dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat

Musgrave *and* Musgrave (1989:6) yang menjelaskan bahwa pemerintah melalui desentralisasi fiskal sangat diperlukan dalam perekonomian terutama untuk melaksanakan fungsinya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat yang layak. Fungsi pemerintah tersebut adalah fungsi alokasi, yaitu fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan, fungsi distribusi yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan, dan fungsi stabilisasi, yaitu penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Petty dalam Pressman (2000:8-9) yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi (kesejahteraan masyarakat) Inggris bukan melalui perdagangan internasional tetapi melalui keuangan publik atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Halder (2007) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai korelasi positif dengan *economic outcome* yang meliputi *Human Development Index (HDI)*, *life expectancy*, GDP, dan angka kematian bayi.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Sen dalam Pressman (2000:272), yang menjelaskan bahwa ekonomi kesejahteraan tidak hanya mencakup tentang konsumsi tetapi juga pengembangan potensi manusia karena ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan

yang melekat dalam diri manusia dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk manusia daripada berusaha memproduksi lebih banyak barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas atau memahami bagaimana cara masyarakat memaksimalkan kepuasan secara rasional. Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya tetapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi karena makanan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik (demokrasi). Kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki orang dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti ketika konsumen membeli barang tetapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi lebih banyak pilihan.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat *World Bank* (2000) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dirumuskan sebagai pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang meliputi delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Menurut *World Bank*, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan

hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*). Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat secara lebih merata.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Arsyad (2004:32) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh faktor-faktor lain.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan pendapat Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai dengan hasil studi Suryanto dkk (2005) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal belum

banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Artinya, desentralisasi fiskal berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 dengan indikator naiknya IPM untuk semua kabupaten/kota, bersamaan dengan turunnya IKD untuk beberapa kabupaten/kota, dan naiknya IKD untuk beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai salah satu hasil studi Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam dilakukan dengan meningkatkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat daya beli/pendapatan, dan penurunan pada angka kriminalitas.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis ketiga sesuai salah satu hasil studi Wibowo (2008) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999 s.d 2004; desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 telah memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskal sebelumnya. Hal ini tampak dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan naiknya angka IPM untuk semua kabupaten/kota dan turunnya angka IKD untuk sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 s.d 2008. Angka IKD di kota didominasi oleh jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

#### 6.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar  $-0,101261$ , t-statistik sebesar  $-1,412646$ , dan p-value sebesar  $0,159577282$  yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan ada penolakan terhadap hipotesis keempat. Dengan demikian, hipotesis keempat tidak terbukti. Koefisien jalur sebesar  $-0,101261$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya.

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



Berdasarkan Tabel L.3.12 di halaman 330, tampak dari 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20%, sedang 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%. Berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331 tampak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20% pasti mempunyai proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20% dan sebaliknya.

Menurut Mahi (2005a), salah satu faktor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan cenderung turun dalam era otonomi daerah adalah munculnya Peraturan Daerah (perda) yang bermasalah di kabupaten/kota. Investor dan pelaku bisnis telah menganggap otonomi daerah dengan desentralisasi fiskalnya mengganggu kelancaran usaha mengingat adanya berbagai pungutan melalui perda yang memberatkan investor dan pengusaha. Perda-Perda yang bermasalah ini akan berdampak pada kemampuan belanja modal pada APBD kabupaten/kota dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Mahi, 2005b). Bahkan cenderung menjadi tidak mampu karena belanja modalnya secara nyata menjadi relatif kecil.

Berdasarkan data pada Tabel 6.2 di halaman 201, tampak perkembangan proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1998 s.d 2000 pada sebagian besar kabupaten/kota cenderung menurun. Artinya, apabila proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah cenderung menurun maka proporsi Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung juga akan menurun. Hal ini tampak

pada rata-rata proporsi Belanja Langsung tahun 1998 s.d 2000 yang berkisar antara 15,63% (Kabupaten Magelang) s.d 33,9% (Kota Surakarta).

APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan meningkatnya lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi rakyat daerah juga turut berkembang.

Seiring dengan perkembangan ekonomi swasta, maka APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran Belanja Langsung lebih besar daripada anggaran Belanja Tidak Langsung, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintah daerah jika benar-benar pemerintah daerah menjalankan fungsi APBD secara konsekuen sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi distribusi pendapatan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendesain kebijakan anggaran daerah dengan kebijakan anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar daripada anggaran Belanja Langsung, maka kebijakan anggaran pemerintah daerah yang bersifat kontraksi ini tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331 tampak besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 65% s.d 85%, sedang proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah yang berkisar antara 15% s.d 35%. Artinya, kebijakan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang bersifat kontraksi tersebut tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Kompas (15 Juni 2011), kontraksi tersebut terjadi karena kabupaten/kota menggunakan dana APBD untuk menutupi gaji pegawai dan dana insentif daerah karena dana alokasi umum dari pemerintah pusat lebih rendah daripada gaji pegawai. Hal ini terjadi di 11 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan tersebut diperkuat dengan data pada Tabel L.3.15 di halaman 333 yang menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berkisar antara 14,8% sd. 143,51%, namun hanya mampu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berkisar antara 10,25% s.d 15,98%.

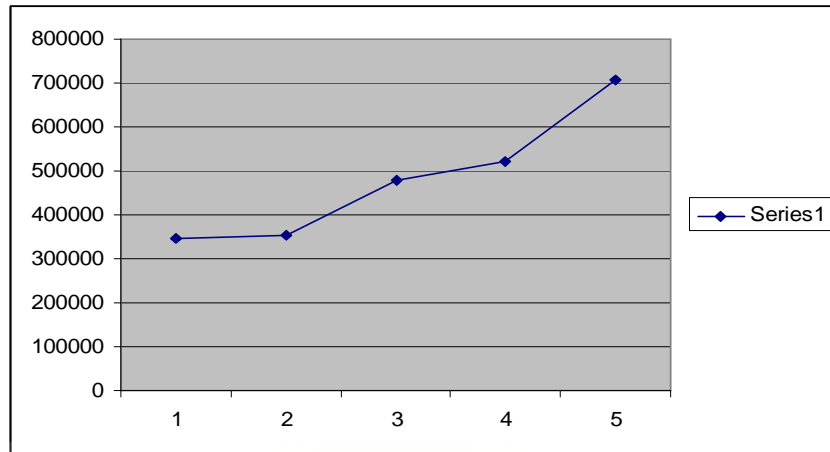
Di samping itu, Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 karena faktor-faktor seperti Belanja Modal yang tidak produktif, Belanja Modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, dan pengaruh investasi swasta yang justru lebih berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Provinsi Jawa Tengah penyalahgunaan anggaran dalam APBD kabupaten/kota berakibat kepada berkurangnya anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan berpengaruh pada tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kasus korupsi telah menyebabkan

inefisiensi dan semakin tidak sejahteranya masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2009 ditunjukkan pada Tabel L.3.23 di halaman 341. Temuan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Provinsi Jawa Tengah diperkuat dengan data laporan yang diterima Kementerian Dalam Negeri bahwa terdapat lebih dari 2.000 rekening mencurigakan milik kepala daerah dan pejabat daerah lainnya se Indonesia, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Kompas, 15 Juni 2011 dan 2 Agustus 2010).

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan pendapat Adolf Wagner dalam Soepangat (1991:42-44) dan Peacock-Wiseman dalam Soepangat (1991:45-50) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Adolf Wagner menyebut dengan *The Law of Ever Increasing State Activities* atau hukum makin meningkatnya kegiatan negara atau hukum makin meningkatnya kebutuhan negara atau hukum makin meningkatnya pengeluaran negara. Hal ini ditunjukkan pada Tabel L.3.4 di halaman 322 tentang Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

Peacock-Wiseman menyebut perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berpola seperti tangga rumah yang disebut dengan *steplike* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2 di halaman 235. Pola *steplike* tersebut terjadi karena adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain.



**Gambar 6.2**  
**POLA STEPLIKE PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 s.d 2008**

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan pendapat Fuad dkk (2005:224-228) dan Mulyana dkk (2006:365-366). Fuad menjelaskan bahwa perlu memahami faktor penyebab pertumbuhan belanja publik, yaitu faktor belanja barang dan jasa atau belanja transfer karena mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain dan tentu akan berdampak berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Mulyana menjelaskan bahwa jika suatu negara mendesentralisasikan tanggungjawab pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat layanan akan menurun atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan kucuran dana dan atau pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, maka mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makro ekonomi dapat kembali muncul (*Fly Paper Effect*). Hal

ini tampak pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340 yang menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 menggantungkan anggaran belanja total rata-rata sebesar 80% dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan pendapat Halim (2008:4) yang menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun tetapi harus memperhatikan aspek tujuan dan arah yang terkait dengan aspek ekonomis dan di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik. Sebagai generator pertumbuhan kawasan, keberhasilan investasi tidak dapat diukur dengan pengembalian dana yang secara langsung diperoleh dari obyek investasi semata, tetapi dengan mengukur seberapa jauh aktivitas ikutan atau lingkungan kawasan mampu menciptakan kegiatan ekonomi ikutan yang dikelola kemudian hari sehingga mampu dikembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Kriteria ini penting karena fungsi belanja modal sebagai investasi sektor publik dalam pengembangan kawasan justru pada seberapa besar keberhasilan menciptakan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 belum mampu memenuhi kriteria tersebut sehingga Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan

pendapat Smith dalam Pressman (2000:34-36) dan Kuznets dalam Pressman (2000:177) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah yang tepat dalam mengembangkan perekonomian khususnya dalam upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara terbaik, yaitu melalui sistem pajak untuk membiayai Belanja Langsung. Hal ini tampak pada Tabel 5.8 di halaman 156 yang menunjukkan turunnya rasio komponen Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 sehingga sistem pajak yang digunakan belum tepat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Handoyo (2010), Model Leviathan menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa sehingga dicapai total penerimaan pajak maksimum.

Sistem pajak yang digunakan belum berhasil untuk membiayai Belanja Langsung di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 karena masih menggunakan ketentuan pajak dan retribusi lama. Oleh karena itu, mulai 1 Januari 2010 diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 4 jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang

Burung Walet dan 4 jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan pendapat Kaldor dalam Pressman (2000:216-217) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung terutama pada pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan Tabel 5.3 di halaman 148 tampak hanya 7 kabupaten saja dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai sektor dominan, yaitu sektor industri pengolahan pada PDRBnya, sedangkan sebanyak 19 kabupaten mempunyai sektor dominan, yaitu sektor pertanian. Oleh karena itu, Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 karena hanya didukung oleh 7 kabupaten saja yang mempunyai sektor dominan pada sektor industri.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keempat sesuai dengan salah satu hasil studi Priyarsono dkk (2010) yang menjelaskan bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung masih mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Hal ini ditunjukkan pada Tabel L.3.13 di halaman 331 bahwa besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 65% s.d 85% sedang proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 15% s.d 35%; sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan



sehingga kemandirian daerah belum optimal seperti ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340 bahwa selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai kemandirian daerah di bawah 20% sehingga Dana Perimbangan di atas 80%.

Berbagai temuan tersebut, sesuai dengan koefisien jalur yang bertanda negatif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya proyek di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum optimal dalam menunjang kegiatan perekonomian sehingga asas pengeluaran Belanja Modal yang disebut asas fungsionalita belum sepenuhnya digunakan. Hal ini tampak dari berbagai proyek seperti jalan tol Semarang-Surakarta dan Transjawa; peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang; peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel; pembukaan kembali jalur kereta api komuter dan pariwisata; pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi di Cilacap dan Kendal; pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas, Batang, dan Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta; peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi, dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora yang belum optimal.

#### **6.5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,069339, t-statistik sebesar 0,975242, dan *p-value* sebesar 0,33081783 yang lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu

5%. Hal ini menunjukkan ada penolakan terhadap hipotesis kelima. Dengan demikian, hipotesis kelima tidak terbukti. Koefisien jalur sebesar 0,069339 (bertanda positif) menunjukkan bahwa semakin meningkat Belanja Modal, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya.

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soepangat (1991:52), peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antargolongan dalam masyarakat karena perbedaan pemilikan dan kesempatan penggunaan sumberdaya ekonomi pada sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban pemerintah. Demikian pula dengan penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat akan bermanfaat bagi yang membutuhkannya sehingga penyediaan berbagai barang dan jasa publik yang

dianggarkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang disebutkan pada penjelasan subbab 6.4, belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai karakteristik sebagai berikut: berdasarkan Tabel L.3.12 di halaman 330 sebagian besar kota mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20%, sedang sebagian besar kabupaten mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%; berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331, tampak kabupaten/kota yang mempunyai proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah di atas 20%, mempunyai proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah di bawah 20%, dan sebaliknya; berdasarkan Tabel 6.2 di halaman 201, tampak perkembangan proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada sebagian besar kabupaten/kota cenderung menurun; berdasarkan Tabel L.3.13 di halaman 331, tampak besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah berkisar antara 65% s.d 85%, sedang proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah berkisar antara 15% s.d 35%; berdasarkan Tabel L.3.15 di halaman 333 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Belanja Modal berkisar antara 14,8% sd. 143,51%, namun hanya mampu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 10,25% s.d 15,98%; dan berdasarkan Tabel L.3.23 di halaman 341, tampak nilai kerugian negara akibat korupsi anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2009.

APBD merupakan gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah

mengalami pertumbuhan, maka akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan meningkatnya lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi rakyat daerah juga turut berkembang. Berdasarkan 6 karakteristik belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 tersebut mengakibatkan adanya keterbatasan Belanja Modal dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal tidak produktif, Belanja Modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, dan pengaruh investasi swasta yang justru lebih berperan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kebijakan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang bersifat kontraksi tersebut ini tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan data pada Tabel 5.11 di halaman 171 yang menunjukkan bahwa angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengalami kenaikan tetapi berdasarkan Tabel 5.12 di halaman 175 menunjukkan bahwa angka IKD juga cenderung semakin besar khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Boyolali, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, serta Kota Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Tegal. Besarnya angka IKD di daerah kota didominasi oleh kejahatan jenis pencurian kendaraan bermotor per 1.000 penduduk.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kelima sesuai dengan

pendapat Halim (2008:4) yang menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun tetapi harus memperhatikan aspek tujuan dan arah yang terkait dengan aspek ekonomis dan di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik. Berdasarkan 6 karakteristik belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008, Belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 belum mampu memenuhi kriteria tersebut.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kelima sesuai dengan pendapat Smith dalam Pressman (2000:34-36), Wicksell dalam Pressman (2000:125-126), dan Kuznets dalam Pressman (2000:177) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah yang tepat dalam mengembangkan perekonomian khususnya dalam upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara terbaik, yaitu melalui sistem pajak untuk membiayai Belanja Langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak pada Tabel 5.8 di halaman 156 yang menunjukkan turunnya rasio komponen Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Turunnya rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mensejahterakan masyarakatnya juga menurun.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kelima sesuai dengan salah satu hasil studi Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila

tingkat tingkat kemampuan pemerintah meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam ditunjukkan dengan peningkatan pada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat daya beli/pendapatan, dan penurunan pada angka kriminalitas. Oleh karena itu, apabila kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Modal rendah berdasarkan 6 karakteristik Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga rendah, sehingga Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kelima sesuai dengan salah satu hasil studi Priyarsono dkk (2010) yang menjelaskan bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung masih mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Hal ini ditunjukkan pada Tabel L.3.13 di halaman 331 bahwa besarnya proporsi Belanja Tidak Langsung (didalamnya terdapat Belanja Pegawai) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 65% s.d 85% sedang proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar antara 15% s.d 35%; sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan sehingga kemandirian daerah belum optimal seperti ditunjukkan pada Tabel 5.8 di halaman 156 dan Tabel L.3.22 di halaman 340 bahwa selama tahun 2004 s.d 2008 sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) mempunyai rata-rata nilai kemandirian daerah di bawah

20% sehingga Dana Perimbangan di atas 80%.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis kelima sesuai dengan salah satu hasil studi Badrudin (2011) yang menjelaskan bahwa Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2008. Hal ini terjadi karena tidak cermatnya pengalokasian Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung. Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung hendaknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah tetapi juga digunakan untuk memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **6.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan Tabel 5.16 di halaman 186, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar  $-0,156687$ , t-statistik sebesar  $-1,988465$ , dan p-value sebesar  $0,04835568$  yang lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan ada penerimaan terhadap hipotesis keenam. Dengan demikian, hipotesis keenam terbukti. Koefisien jalur sebesar  $-0,156687$  (bertanda negatif) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, semakin meningkat pertumbuhan

ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 semakin menurun, dan sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan terjadi pula penurunan angka Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) sebagai Indikator Sosial (Arsyad, 2004:38).

Semua pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya dan kabupaten/kota lain di Indonesia umumnya ketika menyusun target-target hasil pembangunan ekonomi menggunakan salah satu asumsi, yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam persentase tertentu. Apabila target pertumbuhan ekonomi tersebut mampu dicapai bahkan terlewati, maka dikatakan pemerintahan kabupaten/kota berhasil dalam mengelola pemerintahan, sebaliknya apabila target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu dicapai, maka dikatakan pemerintahan kabupaten/kota belum berhasil dalam mengelola pemerintahan bahkan dikatakan gagal.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Hal ini dijelaskan oleh Kuncoro (2010:40-41) yang sependapat dengan Djojohadikusumo (1994:1) dan Sen dalam Pressman (2000:274) yang menyatakan bahwa sebaiknya perlu membedakan pengertian antara pertumbuhan



ekonomi dengan pembangunan ekonomi karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara definisi juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara atau daerah. Menurut Sen dalam Pressman (2000:274), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut, sedang pembangunan (perkembangan) ekonomi adalah pengembangan kemampuan manusia yang berupa peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Standar kehidupan masyarakat yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto menuai kritikan karena merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan terus menerus sehingga memunculkan ukuran-ukuran yang baru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Akhirnya muncul pendapat *United Nations Development Program* (UNDP) yang mengenalkan formula *Human Development Index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan memperluas

skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tentang model pengembangan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi berubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diartikan sebagai pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat secara lebih merata.

Berdasarkan Tabel 5.10 di halaman 168, tampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung mengalami penurunan. Turunnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah akan berdampak terhadap kemampuan ekonomi kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga menjadi lebih miskin, kurang sehat, dan kurang berpendidikan. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih mengandalkan pembentukan PDRB dari sektor yang bernilai tambah rendah. Berdasarkan Tabel 5.3 di halaman 148, tampak 19 kabupaten mengandalkan dari sektor pertanian, 7 kabupaten mengandalkan dari sektor industri pengolahan, 3 kabupaten dan 4 kota mengandalkan dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan 2 kota mengandalkan dari sektor jasa. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembentukan PDRB masing-masing kabupaten/kota sehingga berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Tabel 5.11 di halaman 171, tampak angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengalami kenaikan. Berdasarkan komponen dalam IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita Riil Disesuaikan per

kabupaten/kota angkanya cenderung naik. Hal ini berdasarkan Tabel L.3.17 di halaman 333 tampak angka harapan hidup masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik, berdasarkan Tabel L.3.18 di halaman 334 tampak angka melek huruf masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik, berdasarkan Tabel L.3.19 di halaman 335 tampak rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik, berdasarkan Tabel L.3.20 di halaman 336 tampak pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung naik, dan berdasarkan Tabel L.3.21 di halaman 337 tampak rangking nasional IPM sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 cenderung turun. Kenaikan angka IPM di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 dibarengi juga dengan kenaikan angka IKD pada 23 kabupaten/kota dan penurunan IKD pada 12 kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tetapi kejahatan masyarakat tetap ada dan sekalipun kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tetapi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi lain meningkat jauh lebih tinggi.

Apabila dilihat pada Tabel L.3.27 di halaman 343 tampak rasio penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berkisar antara 3,44% s.d 30,4% dengan rata-rata sebesar 18,27%. Artinya, hampir 20% penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan penduduk miskin. Apabila dilihat pada Tabel L.3.28 di halaman 344 tampak angka *Index Gini* (*Gini Ratio*) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berkisar antara 0,2194

s.d. 0,2988 dengan rata-rata sebesar 0,2527. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori rendah karena angka *Index Gini (Gini Ratio)* lebih kecil daripada 0,3. Sebagian besar kota mengalami kenaikan dan sebagian besar kabupaten mengalami penurunan angka *Index Gini (Gini Ratio)*. Dengan demikian, berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang cenderung turun, rasio penduduk miskin kabupaten/kota yang rata-rata sebesar 20%, dan angka *Index Gini (Gini Ratio)* kabupaten/kota yang cenderung naik maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keenam sesuai dengan pendapat Kuznets dalam Pressman (2000:177) yang menjelaskan bahwa faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu pasti akan memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 6 karakteristik belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008, belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keenam sesuai dengan pendapat Sen dalam Pressman (2000:274), Arsyad (2004), dan Todaro (2006) yang menjelaskan bahwa perlu membedakan antara pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara definisi juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian kabupaten/kota. Hal ini tampak pada penggunaan target pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan keberhasilan pembangunan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah yang menimbulkan dampak pada kenaikan IKD, penurunan IPM dalam ranking nasional, rasio penduduk miskin, dan kenaikan angka *Index Gini* (*Gini Ratio*) pada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keenam tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, artinya apabila perkembangan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat. Berkebalikan dengan temuan Nasution (2007), pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keenam tidak sesuai dengan hasil studi Sasana (2009) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah karena berdasarkan Tabel 5.10 di halaman 168 tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 dan Tabel L.3.27 di halaman 343 tentang penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mengindikasikan kecenderungan penurunan nilai.

Temuan hasil studi pada pembuktian hipotesis keenam tidak sesuai dengan salah satu hasil studi Badrudin (2011) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2008. Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

### **6.7. Analisis Tipologi Klassen dan Implementasi Desentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**

Pada pembahasan pembuktian hipotesis dijelaskan bahwa salah satu penyebab belum berhasilnya implementasi desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah karena desentralisasi fiskal yang diberlakukan per 1 Januari 2001 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah maupun di kabupaten/kota provinsi lainnya dilaksanakan secara *big-bang* dan tidak bertahap. Artinya, semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di provinsi lainnya di seluruh Indonesia tanpa kecuali melaksanakan desentralisasi fiskal secara bersama-sama dan menyeluruh. Menurut hasil studi Vazques dan Mark Rider (2006), desentralisasi fiskal di China dan India terbukti sukses karena implementasinya dijalankan secara simpel dan bertahap, tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara *big-bang* dan rumit. Dengan demikian, kesiapan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan penjelasan pada analisis hasil studi dan pembahasan pembuktian hipotesis ditunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Berdasarkan kontribusi sektor dominan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, maka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dibagi ke dalam 4 golongan menurut sektor utama seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3 di halaman 148. Tampak 19 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah PDRBnya masih

didominasi sektor pertanian. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di sebagian besar daerah meskipun bukan sebagai kontribusi terbesar dari PDRB Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kabupaten/kota (3 kabupaten dan 4 kota) mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 7 kabupaten mengandalkan sektor industri pengolahan, serta 2 kota mengandalkan sektor jasa-jasa. Empat kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sedang 2 kota, yaitu Magelang dan Salatiga didominasi sektor jasa-jasa (Tamtomo, 2010:31). Dengan demikian, hampir separuh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah (19 kabupaten) mengandalkan sektor pertanian.

2. Menurut Tamtomo (2010:32), kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai PDRB per kapita tinggi hanya ada beberapa daerah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta sedang kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah. Kabupaten/kota yang mengandalkan sektor non pertanian seperti sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa memiliki PDRB dan PBRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, daerah kota cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten. Dengan demikian, PDRB dan PBRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang lebih tinggi dipengaruhi oleh sektor non pertanian yang mendominasi dalam penghitungan PDRB seperti sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa dan terjadi di daerah

perkotaan.

3. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dikelompokkan sebagai daerah berkembang apabila tumbuh cepat tetapi kontribusi kecil, daerah prima apabila tumbuh cepat dan kontribusi besar, daerah potensial apabila tumbuh lambat tetapi kontribusi besar, dan daerah terbelakang apabila tumbuh lambat dan kontribusi kecil (Widodo, 2006:120-122). Pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi 4 kelompok berdasarkan posisi kabupaten/kota yang dibagi dalam diagram empat kuadran searah dengan putaran jarum jam, yaitu kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah) (Dariwardani dan Amani, 2008:9).

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 kelompok daerah seperti yang ditunjukkan pada Tabel L.3.1 di halaman 317, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 di halaman 154, serta Tabel 5.7 di halaman 155. Tampak karakteristik wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 10 kabupaten berada pada karakteristik Daerah Berkembang, 5 kabupaten berada pada karakteristik Daerah Prima, 1 kabupaten dan 2 kota berada pada karakteristik Daerah Potensial, serta 13 kabupaten dan 4 kota berada pada karakteristik Daerah Terbelakang.

4. Berdasarkan deskripsi variabel menurut kabupaten/kota yang dilakukan untuk membandingkan desentralisasi fiskal, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah



tahun 2004 s.d 2008, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Gambaran proksi desentralisasi fiskal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.1 di halaman 345 menunjukkan bahwa histogram desentralisasi fiskal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram desentralisasi fiskal untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih mampu melaksanakan desentralisasi fiskal daripada daerah kabupaten karena desentralisasi fiskal sebagai proksi antara PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pengeluaran Daerah menunjukkan kemampuan seberapa besar Total Pengeluaran Daerah mampu dibiayai dari Total Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Semakin besar nilai desentralisasi fiskal kabupaten/kota semakin mampu kabupaten/kota tersebut melaksanakan otonomi daerah.
- b. Gambaran belanja modal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.2 di halaman 346, menunjukkan bahwa histogram belanja modal per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kabupaten lebih tinggi daripada histogram belanja modal untuk daerah kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih besar mengalokasikan dan merealisasikan anggaran belanja modal dalam APBD daripada daerah kota karena cakupan daerah kabupaten yang lebih luas daripada kota. Semakin

besar belanja modal kabupaten/kota semakin besar kabupaten/kota tersebut mengalokasikan dan merealisasikan anggaran APBD untuk kebutuhan belanja modal dalam pembangunan yang berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya.

- c. Gambaran pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.3 di halaman 347, menunjukkan bahwa histogram pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kabupaten lebih tinggi daripada histogram pertumbuhan ekonomi untuk daerah kota. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi daripada daerah kota. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi kabupaten daripada kota menunjukkan bahwa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah lebih mampu dalam mencapai perubahan relatif produk yang dihasilkan dari sektor-sektor produktif selama 1 tahun daripada kota.
- d. Gambaran IPM per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.4 di halaman 348, menunjukkan bahwa histogram IPM per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram IPM untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih sejahtera masyarakatnya daripada daerah kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas

pendidikan, dan fasilitas kesehatan lebih menjamin pencapaian IPM yang lebih tinggi sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

- e. Gambaran IKD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 seperti yang disajikan pada histogram Gambar L.3.5 di halaman 349, menunjukkan bahwa histogram IKD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 untuk daerah kota lebih tinggi daripada histogram IKD untuk daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 lebih tinggi tingkat kejahatan terhadap masyarakatnya daripada daerah kabupaten per 1.000 penduduk.

Penjelasan pada subbab 6.7 dapat diringkas dan disajikan pada Tabel 6.4 berikut ini:

**Tabel 6.4**  
**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK WILAYAH BERDASARKAN ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN DENGAN SEKTOR DOMINAN, PDRB PER KAPITA, DESENTRALISASI FISKAL, BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, TAHUN 2004 S.D 2008**

No.	Karakteristik Wilayah	Jumlah Wilayah	Sektor Dominan	PDRB Per Kapita	Desentralisasi Fiskal (Pola Hubungan)	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Masyarakat	
								IPM	IKD
1	Terbelakang	13 kabupaten dan 4 kota	Pertanian	Rendah	Instruktif	Moderat	Moderat	Rendah	Rendah
2	Berkembang	10 kabupaten	Pertanian	Rendah	Instruktif	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
3	Potensial	1 kabupaten dan 2 kota	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Tinggi	Konsultatif	Moderat	Moderat	Moderat	Tinggi
4	Prima	5 kabupaten	Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Tinggi	Instruktif	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah

**Sumber:** Ringkasan subbab 6.7.

Berdasarkan Tipologi Klassen, kondisi wilayah yang ideal adalah wilayah dengan karakteristik prima (Widodo, 2006:122). Oleh karena itu, pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hendaknya mempunyai arah kebijakan mengembangkan wilayahnya menuju wilayah dengan karakteristik prima. Dalam mengembangkan wilayahnya menuju wilayah dengan karakteristik prima, setiap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hendaknya mengembangkan sektor yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pengelompokan sektor ini berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor (BPS, 2008:33).

Sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat tergantung pada alam. Sektor primer meliputi sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder apabila inputnya berasal langsung dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor bangunan. Sektor tersier apabila inputnya berasal langsung dari sektor sekunder. Sektor sekunder meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Pengembangan sektor primer, sekunder, dan tersier berdasarkan pada Teori Sektor dengan dasar teori pengembangan semua sektor primer, sekunder, dan tersier; dengan dasar pengembangan aneka ragam sektor dan peningkatan produktivitas sektor; dan dengan sasaran pengembangan peningkatan sektor akan meningkatkan kebutuhan dan pendapatan sektor (Malizia, 1999).

Berikut ini disajikan matriks strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurut periode waktu yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu prioritas pengembangan wilayah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti yang terlihat pada Tabel 6.5 di halaman 259.

**Tabel 6.5**  
**MATRIKS STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SEKTOR PER**  
**PERIODE WAKTU DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH,**  
**PER TAHUN 2009**

Nomor	Karakteristik Wilayah	Sasaran Pengembangan	Sektor	Periode Waktu	Tahun
1	Terbelakang	Berkembang	Primer ke Sekunder	Jangka Menengah	5 s.d 10
2	Berkembang	Potensial	Sekunder ke Tersier	Jangka Menengah	5 s.d 10
3	Berkembang	Prima	Sekunder ke Tersier	Jangka Panjang	10 s.d 25
4	Prima	Prima	Tersier	Jangka Pendek	1 s.d 5

**Sumber:** Malizia (1999) dan Widodo (2006:122).

Dalam menyusun strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan wilayah disusun dalam koridor otonomi daerah, artinya strategi yang disusun harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan, keduanya pada dasarnya bertujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Apabila ketentuan pelaksanaan otonomi daerah dipatuhi maka desentralisasi fiskal akan berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1993; Prud'Homme, 1994; Bhal, 1999).
2. Dalam mengalokasikan Belanja Modal sebagai bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* yang memberi manfaat lebih dari satu tahun harus memperhatikan aspek tujuan dan arah yang terkait dengan aspek ekonomis dan di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik (Halim, 2008:4). Hal ini berdasarkan hasil pembahasan pada pembuktian hipotesis, bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal pada APBD

kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ini menunjukkan bahwa 6 enam karakteristik Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan Belanja Modal tidak produktif, Belanja Modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, dan pengaruh investasi swasta yang justru lebih berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kebijakan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang bersifat kontraksi tersebut ini tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus mampu menggali sumber dana pembangunan yang berasal dari swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR) yang dialokasikan oleh perusahaan dengan *triple helix, private public partnership* melalui pembiayaan barang publik oleh swasta dengan sistem *build operate transfer* (BOT) yang banyak dilakukan di Indonesia, dan penerbitan obligasi daerah.

3. Dalam menyusun strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi tertentu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah harus berlandaskan pada pencapaian program MDGs dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi sehingga capaian IPM semakin tinggi, IKD semakin rendah, *Gini Ratio* semakin rendah, persentase penduduk miskin semakin menurun, dan lingkungan hidup tetap sehat.

4. Dalam menyusun strategi pengembangan wilayah perlu melakukan kerjasama antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau dengan kabupaten/kota di provinsi lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang kerjasama antarwilayah.

## **6.8. Temuan-Temuan**

### **6.8.1. Temuan Teoritis**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh temuan teoritis yang akan memberikan kontribusi terhadap studi teoritik yang mendukung atau menolak dan/atau mengembangkan studi teoritik yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Teori Ekonomi Publik, Teori Desentralisasi Fiskal, Teori Pengeluaran Pemerintah, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dan Teori Kesejahteraan Masyarakat. Temuan teoritis tersebut adalah:

1. Temuan teoritis bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tampak pada tanda koefisien jalur positif dan terbesar. Temuan teoritis ini mendukung pendapat Mangkoesubroto (1994:6), Musgrave *and* Musgrave (1989:6), Suparmoko (2002:15-22), Halder (2007), Sen dalam Pressman (2000:272), *World Bank* (2000), Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22) yang menjelaskan bahwa pemerintah melalui desentralisasi fiskal mempunyai peran penting dalam menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti prasarana jalan dan bendungan yang akan meningkatkan standar kehidupan penduduk pada tingkat

yang layak karena desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi berdasarkan pemilikan informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat dan desentralisasi fiskal akan mengarahkan program pembangunan pemerintah pada kepentingan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat.

2. Temuan teoritis bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tampak pada tanda koefisien jalur negatif dan terkecil. Temuan teoritis ini mendukung pendapat Fuad dkk (2005:224-228), Mulyana dkk (2006:365-366), Halim (2008:4), Smith dalam Pressman (2000:34-36), dan Kuznets dalam Pressman (2000:177) yang menjelaskan bahwa perlu memahami faktor penyebab pertumbuhan belanja publik, yaitu faktor belanja barang dan jasa atau belanja transfer karena mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain dan tentu akan berdampak berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Temuan teoritis bahwa proporsi Belanja Langsung terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang rendah mendukung pendapat Oates (1993) karena kontribusi anggaran pengeluaran publik terhadap total anggaran belanja relatif besar untuk negara industri (65% s.d 90%) dan relatif kecil untuk negara sedang berkembang seperti Indonesia (15% s.d 35%).
4. Temuan teoritis belum berhasilnya desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mendukung pendapat Bhal (1999)



karena belum dapat dipenuhinya beberapa ketentuan peraturan dari 12 ketentuan peraturan yang menjamin keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah, antara lain kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai proporsi PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah yang rendah.

5. Temuan teoritis tidak berlakunya *The Tiebout Model* di Provinsi Jawa Tengah tidak mendukung pendapat Fuad dkk (2005:245) dan Mangkoesubroto (1994:3-23) karena masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai keterbatasan untuk memilih tempat tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara layanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat dan kesulitan untuk mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD kabupaten/kota karena kondisi politik.
6. Temuan teoritis bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak mendukung pendapat Oates (1993), mendukung pendapat Mulyana dkk (2006:277-285), dan tidak mendukung pendapat Halder (2007) karena agar desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menuntut kemampuan keuangan yang tinggi dengan kemandirian antara 75% s.d 100% (Halim dalam Mursinto, 2004:37).
7. Temuan teoritis bahwa desentralisasi fiskal membuat kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah kabupaten/kota dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) sehingga desentralisasi fiskal dari pusat dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih rendah mendukung pendapat Prud'Homme (1994) karena situasi ekonomi makro pusat dan daerah tidak sama dan ketika bupati/walikota tidak berasal dari partai politik yang sama dengan partai politik yang mengusung presiden terpilih. Hal ini nampak sekali dengan bupati dan walikota atau wakilnya di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang sebanyak 71,43% berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Kompas, 26 Mei 2011).

8. Temuan teoritis bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan perubahannya dari waktu ke waktu (pertumbuhan ekonomi) tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam penghitungan pendapatan nasional dan kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh faktor-faktor lain mendukung pendapat Sen dalam Pressman (2000:272), *World Bank* (2000), Arsyad (2004:32), dan Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi.
9. Temuan teoritis *The Law of Ever Increasing State Activities* dan perkembangan pengeluaran negara pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang berpola seperti tangga rumah yang disebut dengan *steplike* mendukung Adolf Wagner dalam Soepangat (1991:42-44) dan Peacock-Wiseman dalam Soepangat (1991:45-50). Hal ini karena Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2004 s.d 2008 meningkat dari waktu ke waktu dan berpola seperti tangga rumah yang disebut dengan *steplike* karena adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain.

10. Temuan teoritis *fly paper effect* pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mendukung pendapat Fuad dkk (2005:224-228) dan Mulyana dkk (2006:365-366) karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 menggantungkan anggaran belanja total rata-rata lebih kurang sebesar 80% dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
11. Temuan teoritis bahwa belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 telah dikorupsi oleh pejabat pimpinan daerah kabupaten/kota mendukung pendapat Halim (2008:4) karena belanja modal sebagai bentuk investasi yang berupa *capital expenditure* dalam pemanfaatannya harus memperhatikan aspek tujuan dan arah yang terkait dengan aspek ekonomis dan di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik.
12. Temuan teoritis bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung terutama pada pertumbuhan sektor industri mendukung pendapat Kaldor dalam Pressman (2000:216-217). Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 yang menurun karena 7 kabupaten saja dari 35

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai sektor dominan, yaitu sektor industri pengolahan pada PDRBnya, sedangkan sebanyak 19 kabupaten mempunyai sektor dominan, yaitu sektor pertanian.

13. Temuan teoritis bahwa faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendukung pendapat Wicksell dalam Pressman (2000:125-126) dan Kuznets dalam Pressman, (2000:177). Hal ini terjadi karena belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai 6 karakteristik yang melemahkan belanja modal sehingga belanja modal belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Belanja Modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah mengakibatkan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan peranan investasi swasta.
14. Temuan teoritis bahwa pemerintah harus membedakan pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mendukung pendapat Sen dalam Pressman (2000:274), Arsyad (2004), dan Todaro (2006) karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara pengertian juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian kabupaten/kota. Hal ini tampak pada penggunaan target pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan keberhasilan pembangunan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

yang menimbulkan dampak pada kenaikan IKD, penurunan IPM dalam ranking nasional, rasio penduduk miskin, dan kenaikan angka *Index Gini* (*Gini Ratio*) pada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008.

### 6.8.2. Temuan Empiris

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh temuan empiris yang akan memberikan kontribusi terhadap studi empirik berupa temuan empiris sebagai acuan studi selanjutnya, sebagai saran/rekomendasi untuk pengambilan keputusan secara praktis, dan memperkaya studi-studi sebelumnya. Temuan empiris tersebut adalah:

1. Temuan empiris bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Hal ini tampak pada tanda koefisien jalur positif dan terbesar. Temuan empiris ini mendukung hasil studi Suryanto dkk (2005:67-68), Nasution (2007), dan Wibowo (2008) karena desentralisasi fiskal per 1 Januari 2001 telah meningkatkan angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 walaupun masih menyebabkan naiknya IKD, porsi penduduk miskin yang masih sekitar 20%, dan angka *Index Gini* (*Gini Ratio*) kota yang cenderung naik.
2. Temuan empiris bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2004 s.d 2008. Hal ini tampak pada tanda koefisien jalur negatif dan terkecil. Temuan empiris ini mendukung Priyarsono dkk (2010) karena berdasarkan 6 karakteristik Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemampuan dalam mengalokasikan Belanja Modal rendah sehingga berpengaruh rendah sekali terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008. Proporsi Belanja Langsung (didalamnya terdapat anggaran Belanja Modal) terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 15% s.d 35% dan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 rata-rata berkisar antara 44% s.d 66% sehingga menyebabkan ketidakefisienan pemerintah kabupaten/kota dalam melayani kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung hendaknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah tetapi juga digunakan untuk memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata (mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana termasuk Belanja Modal yang belum tentu sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah sehingga Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dialokasikan tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh investasi swasta.

3. Temuan empiris bahwa tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 mempunyai kondisi yang sama pada 1 Januari 2001 termasuk perkembangan pada tahun berikutnya sebagai awal pelaksanaan dan monitoring otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ini menyebabkan Desentralisasi Fiskal berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008, karena pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *big-bang*. Ini mendukung hasil studi Vazques dan Mark Rider (2006) yang menjelaskan bahwa pemerintah China dan India melaksanakan desentralisasi fiskal secara simpel dan bertahap, tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara *big-bang* dan rumit. Keterbatasan pada sumber Pendapatan Daerah pada sumber PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berdampak terhadap Pengeluaran Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Modal sebagai bagian dari Belanja Langsung.
4. Temuan empiris bahwa berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 belum mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi mendukung hasil studi Parhah (2002), Mursinto (2004),

Ismail dkk (2004), Adi (2005b), Suhendra dan Hidayat Amir (2006), Akai dkk (2007), Widhiyanto (2008), serta Priyarsono dkk (2010) karena sebagian besar kabupaten/kota (30 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau 85,71%) tahun 2004 s.d 2008 mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di bawah 20%. Hanya 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kudus yang mempunyai rata-rata nilai desentralisasi fiskal di atas 20%, yaitu masing-masing sebesar 45,55%, 26,11%, 25,9%, 21,12%, dan 20,21%. Alokasi Belanja Pegawai yang besar sebagai bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk membeli produk dari kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Tengah, Belanja Modal yang tidak produktif, dan Belanja Modal yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang menjadi kontraksi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

5. Temuan empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 tidak mendukung studi Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan searah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak mendukung Sasana (2009) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2005, dan tidak mendukung studi Badrudin (2011) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan



mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001 s.d 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi belum digunakan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah meningkatkan angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 tetapi masih menyebabkan naiknya IKD, porsi penduduk miskin yang masih sekitar 20%, dan angka *Index Gini (Gini Ratio)* kota yang cenderung naik.

#### **6.9. Keterbatasan Studi**

Berdasarkan temuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dalam studi ini, disadari bahwa belum mampu menjawab secara menyeluruh semua permasalahan yang dibahas. Terdapat keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu:

1. Penggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan ketidakakuratannya dalam pengumpulan data tentunya akan berpengaruh terhadap hasil-hasil temuan dalam studi ini.
2. Dukungan teori dan empiris yang masih terbatas tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal karena relatif baru berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia yang baru dilaksanakan per 1 Januari 2001 sehingga peneliti menggunakan berbagai teori dan empiris yang tidak secara langsung terkait tetapi mempunyai substansi yang sama.
3. Penggunaan variabel investasi dalam studi ini hanya terbatas pada belanja

modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, belum mempertimbangkan investasi swasta. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, investasi swasta semakin meningkat di berbagai kabupaten/kota yang tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



## BAB 7 PENUTUP

### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena rendahnya proksi PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga pengaruhnya terhadap Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat rendah.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa dalam era otonomi daerah, desentralisasi fiskal sebagai desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana dan aktivitas belanja dari pegawai negeri dari luar kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah sehingga pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menurun. Hal ini ditunjukkan dengan ekspor neto yang negatif. Di samping, desentralisasi fiskal dilaksanakan secara *big-bang* dan tidak bertahap tanpa melihat kesiapan, kondisi ekonomi, dan karakteristik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah positif ini menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa aspek efisiensi merupakan *raison d'etre* untuk desentralisasi fiskal. Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para masyarakatnya dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat.
4. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa porsi Belanja Tidak Langsung yang sebagian besar untuk Belanja Pegawai dan terjadinya penyimpangan anggaran pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan rendahnya porsi Belanja

Modal terhadap Total Pengeluaran Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Alokasi Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah sehingga mengakibatkan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang. Kebijakan anggaran pemerintah menjadi kontraksi bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan peranan investasi swasta.

5. Belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah yang akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi terkendala. Hal ini disebabkan karena adanya 6 karakteristik Belanja Modal dan alokasi Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota yang belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah sehingga mengakibatkan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota menjadi terbatas kemampuannya dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini bermakna bahwa semua pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ketika menyusun target-target hasil pembangunan ekonomi selalu menggunakan salah satu asumsi, yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam persentase tertentu. Apabila target pertumbuhan ekonomi tersebut mampu dicapai bahkan terlewati, maka dikatakan pemerintahan kabupaten/kota berhasil dalam mengelola pemerintahan, sebaliknya apabila target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu dicapai, maka dikatakan pemerintahan kabupaten/kota belum berhasil dalam mengelola pemerintahan bahkan dikatakan gagal. Padahal hasil pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tertentu. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Oleh karena itu, pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi karena kedua istilah tersebut di samping berbeda secara pengertian juga berbeda dalam dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian kabupaten/kota.
7. Berdasarkan hasil pembahasan, hasil studi ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bentuk mendukung dan memperkuat teori dan hasil studi yang mengungkap pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal,

pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Teori Ekonomi Publik menurut Mangkoesubroto, Musgrave *and* Musgrave, Petty, Smith, Wicksell, dan Suparmoko; Teori Desentralisasi Fiskal menurut Oates, Prud'homme, Bhal, Fuad dkk, Mulyana dkk, dan Halder; Teori Pengeluaran Pemerintah menurut Adolf Wagner, Peacock-Wiseman, Fuad dkk, Mulyana dkk, dan Halim; Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi menurut Smith, Kuznets, dan Kaldor; dan Teori Kesejahteraan Masyarakat menurut Sen, UNDP dan World Bank, Arsyad, serta Todaro sebagai temuan teoritis.

8. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD menjadi sangat penting bagi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola APBD hendaknya mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD/pelaksanaan APBD, maupun pertanggungjawaban APBD. Agar tujuan desentralisasi fiskal tercapai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hendaknya memperhatikan empat elemen utama dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan: yaitu sistem dana perimbangan

(transfer), sistem pajak dan pinjaman daerah, sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah, dan penyediaan layanan publik.

9. Berdasarkan kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis, diketahui bahwa dari enam hipotesis yang telah dibuktikan, terdapat tiga hipotesis terbukti signifikan dan tiga hipotesis terbukti tidak signifikan. Berdasarkan tiga hipotesis yang terbukti tidak signifikan, semuanya berkaitan dengan variabel belanja modal sebagai variabel intervening. Oleh karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana termasuk belanja modal sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, alokasi belanja produktif, dan berdasarkan aspek non ekonomis yang menyangkut hal-hal di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral. Kasus yang terjadi dengan penyimpangan dana APBD pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan pimpinan dan pejabat daerah telah merugikan negara ratusan milyar rupiah yang sebenarnya dana tersebut dapat dialokasikan dan bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak sekedar naiknya angka IPM tetapi juga turunnya angka IKD, turunnya porsi penduduk miskin, dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dari PAD yang masih rendah melalui peningkatan pajak dan retribusi hendaknya pemerintahan kabupaten/kota memperhatikan aspek perpajakan dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor



28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per 1 Januari 2010. Peningkatan PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak merupakan upaya untuk meningkatkan proksi desentralisasi fiskal dari kabupaten/kota yang berkemampuan keuangan yang rendah sekali dengan kemandirian keuangan 0% s.d kurang dari 25% dengan pola hubungan pusat-daerah yang instruktif seperti yang terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi minimal kabupaten/kota yang berkemampuan keuangan yang sedang dengan kemandirian 50% s.d kurang dari 75% dengan pola hubungan pusat-daerah yang partisipatif.

## 7.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan studi selanjutnya sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama di antara level pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi setiap daerah. Oleh karena itu, agar tujuan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam era otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal berhasil dengan indikator keberhasilan seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka IPM yang naik per kabupaten/kota atau secara nasional, angka IKD yang turun per kabupaten/kota, rasio penduduk miskin yang menurun, dan angka *Index Gini* (*Gini Ratio*) yang menurun, maka pemerintahan kabupaten/kota maupun Provinsi Jawa Tengah harus mampu mengelola manajemen pemerintahan dengan integritas dan profesional.

2. Oleh karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola APBD hendaknya mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif yang harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD/pelaksanaan APBD, maupun pertanggungjawaban APBD.
3. Berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dari PAD yang masih rendah melalui peningkatan pajak dan retribusi hendaknya pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memperhatikan aspek perpajakan dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per 1 Januari 2010. Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah agar tidak melakukan pungutan-pungutan pajak dan retribusi di luar yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertendensi menjadi beban bagi masyarakat khususnya investor sehingga akan menurunkan minat

investasi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hendaknya mengarahkan strategi pengembangan wilayahnya masing-masing ke arah wilayah ideal dengan karakteristik prima berdasarkan tahapan waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi pengembangan kabupaten/kota dengan karakteristik daerah berkembang adalah menambah investasi untuk meningkatkan PDRB. Strategi pengembangan kabupaten/kota dengan karakteristik daerah prima adalah memperbesar investasi untuk melayani permintaan dari laju pertumbuhan daerah yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota dengan karakteristik daerah potensial adalah memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut dan menciptakan daerah baru bagi pasar produk-produk kabupaten/kota tersebut. Strategi pengembangan kabupaten/kota dengan karakteristik daerah terbelakang dengan melakukan diversifikasi hasil produksi untuk menciptakan daerah baru bagi pasar produk-produk kabupaten/kota tersebut. Penambahan investasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta melalui CSR, *private public partnership*, dan penerbitan obligasi daerah. CSR bagi perusahaan menjadi media untuk pembentukan citra perusahaan, sedang bagi masyarakat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Dalam mewujudkan misi program *Bali Ndeso Mbangun Deso* yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera yang diarahkan untuk menitikberatkan orientasi pembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, alam, lingkungan, sosial, politik dan kewilayahan dan mendorong segenap potensi

masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, teknologi informasi untuk ditularkan kepada masyarakat perdesaan, serta bagi kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan atau modal yang besar dapat memberikan bantuan modal usaha atau bertindak sebagai bapak angkat untuk melindungi, memasarkan, dan mengembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat perdesaan. Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hendaknya menitikberatkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai ketentuan program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global melalui pemerintah pusat.

6. Lima belas jenis kejahatan menurut BPS dalam menghitung IKD tidak termasuk jenis korupsi, padahal korupsi pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup besar nilainya dan diduga telah menjadi salah satu faktor penyebab belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan korupsi menjadi jenis kejahatan menurut BPS. Ada 30 jenis tindakan yang disebut dengan tindak pidana korupsi.
7. Studi selanjutnya yang terkait dengan tema ini disarankan untuk dapat menambah variabel investasi swasta sehingga akan memperdalam kajian analisis dan ketajaman implikasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan Belanja Modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak produktif dan untuk investasi jangka panjang sehingga kebijakan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi kontraksi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto, HM, 2009, *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*, Yogyakarta: BPFE.
- Abdullah, Syukriy dan Asmara, JA., 2007, “Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2007:19-31.
- Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara, 2009, *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Adi, Wijaya dkk., 2005a, *Otonomi Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia..
- Adi, Priyo Hari, 2005b, “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali”, *Jurnal Interdisipliner Kritis*, Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, Vol. XVII, No.1, 2005:1-20.
- Akai, Nobuo dkk, 2007, “Fiscal Decentralization and Economic Volatility: Evidence from State-level Cross-section Data of the United States”, *Journal of Urban Economics*, No. 52:93-108.
- Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Azis, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2008, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan *United Nations Development Programme (UNDP)*, Jakarta: *Building And Reinventing Decentralised Governance*.
- Badan Pusat Statistik, 2004, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2003-2004*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2006a, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2006*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- \_\_\_\_\_, 2006b, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2001-2007*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2009a, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2002-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2009b, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009*, Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2009c, *Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2001-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2009d, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2001-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_, 2009e. *Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah*.
- Badrudin, Rudy, 2010, "Analisis Surplus Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007", *Jurnal Terakreditasi, Jurnal Kinerja*, Vol. 14, No. 1, Pebruari 2010:90-106.
- \_\_\_\_\_, 2011, "Pengaruh Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Terakreditasi, Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 22, No. 1, April 2011:39-66.
- Balai Pustaka, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bank Dunia, 2005, *Analisis Pengeluaran Publik Papua: Sebuah Tinjauan Umum Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia*, <http://www.papua.go.id>, download tanggal 28 Juli 2010, hlm. 4-18.
- Bank Indonesia, 2009, *Laporan Perekonomian Daerah Jawa Tengah*, Semarang: Kantor Bank Indonesia Semarang.
- Bhal, Roy, 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, A Paper Prepared for International Seminar on Land Policy and Economic Development, Taiwan: Land Reform Training Institute, hlm. 4-28.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, Terjemahan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 30-38.
- Brodjonegoro, Bambang, 2004a, *The Indonesian Decentralization After Law Revision:*

*Toward a Better Future*, Tidak Dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 1-21.

\_\_\_\_\_, 2004b, *Three Years of Fiscal Decentralization in Indonesia: Its Impacts on Regional Economic Development and Fiscal Sustainability*, Tidak Dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 1-21.

Budiono, 1992, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFPE.

Carson, Carol S, 2002, *Government Finance Statistic*, Washington: International Monetary Fund.

Chalmers, AF, 1983, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Jakarta: Hasta Mitra.

Cooper, Donald R. and C. William Emory, 1996, *Business Research Methods*, 5<sup>th</sup> ed. Chicago: Richard D. Irwin.

Dariwardani, Ni Made Inna dan Siti Noor Amani, 2008, *Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah*, download 31 Juli 2010. hlm. 1-13.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Erfanie, Sri dkk, 2004, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Fuad dkk, 2005, *Dasar-Dasar Keuangan Publik*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ghozali, Imam, 2006, *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Green, Keith, 2005, *Decentralization and Good Governance: The Case of Indonesia*, Muenchen: Munich Personal RePEc Archive (MPRA).

Halder, Pragna, 2007, *Measures of Fiscal Decentralization*, Georgia: Andrew Young School of Policy Studies Department of Economics, Internship Program, hlm. 1-22.

Halim, Abdul, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ed. 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah*



*Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Handoyo, Rossanto Dwi, 2010, "Penerimaan PAD di Jawa Timur, Efisienkah?". *Majalah EKONOMI*, Vol. XX, No. 1, April 2010:1-19.
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2007, *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 10.
- Ismail, Abd. Ghafar B. dkk, 2004, "Fiscal Decentralization And Economic Growth: Evidence From Selected Muslim Countries", *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 9, No. 2, Desember 2004:109 – 116.
- Jhingan, ML, 1994, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaloh, J., 2003, *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kassum, Jemal-ud-din, 2003, *Decentralizing Indonesia A Regional Public Expenditure Review Overview Report*. Washington: World Bank.
- Khasanah, Mufidhatul, 2007, "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo, Tahun 2004 dan 2005", *Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)*, Vol 18, No. 1, April 2007:43-50.
- Kohli, Atul, 1987, *Demokrasi Dan Pembangunan Dalam Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kompas, *Otonomi Daerah: 80 Persen Daerah Pemekaran Gagal*, 30 September 2009, hlm. 2.
- \_\_\_\_\_, *Moratorium Pemekaran*, 16 Juli 2010, hlm. 4.
- \_\_\_\_\_, *Mekarnya Korupsi Daerah Pemekaran*, 2 Agustus 2010, hlm. 6.
- \_\_\_\_\_, *Satu Tersangka Setiap Pekan*, 18 Januari 2011, hlm. 1.
- \_\_\_\_\_, *Aceh sampai dengan Papua Tersandera Korupsi*, 24 Januari 2011, hlm. 1.
- \_\_\_\_\_, *Akuntabilitas Rendah*, 8 Februari 2011, hlm. 5.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Tahan Pertumbuhan*, 22 Februari 2011, hlm. 1.

- \_\_\_\_\_, *Amandemen UUD 1945 Lagi?*, 19 Maret 2011, hlm. 7.
- \_\_\_\_\_, *10 Pemda Berpotensi Terjerat Perkara Pidana*, 26 Maret 2011, hlm. 1.
- \_\_\_\_\_, *Masihkah Kandang Banteng?*, 26 Mei 2011, hlm. 5.
- \_\_\_\_\_, *Ada Ribuan Rekening Tak Wajar*, 15 Juni 2011, hlm. 5.
- \_\_\_\_\_, *APBD untuk Pegawai*, 15 Juni 2011, hlm. 21.
- Kuncoro, Haryo, 2007, *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*, The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 1-29.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan AMP YKPN Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, Ed.5, Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusreni, Sri, 2009, "Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur", *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 1, April 2009:20-31.
- Kusumadewi dan Arief Rahman, 2007, "Fly Paper Effect Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia", *JAAI*, Vol. 11, No. 1, Juni 2007:67-80.
- Mahi, Raksaka, 2005a, "Tinjauan terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Majalah Usahawan Indonesia*, Vol. XXXIV, No. 7, Januari 2005: 51-54.
- \_\_\_\_\_, 2005b, "Otonomi Daerah dan Iklim Usaha", *Majalah Usahawan Indonesia*, Vol. XXXIV, No. 7, Juli 2005: 3-7.
- \_\_\_\_\_, 2005c, "Manajemen Keuangan Daerah di Era Otonomi", *Majalah Usahawan Indonesia*, Vol. XXXIV, No. 12, Desember 2005: 3-7.
- Maimunah, Mutiara, 2006, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, hlm. 1-27.
- Malizia, Emil E. dan Edward J. Feser. 1999. *Understanding Local Economic Development*. Center for Urban Policy Research. New Brunswick, New York: CUPR Press.

- Mangkoesoebroto, Guritno dan A. Tony Prasetyantono, 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Daerah Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: BPF.
- Mulyana, dkk, 2006, *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Mursinto, Djoko, 2004, *Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan serta Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur, Disertasi*, Tidak Dipublikasikan, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- \_\_\_\_\_, 2005a, "Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Suatu Kajian Normatif". *Majalah EKONOMI*, Vol. XV, No. 2, Agustus 2005: 197-208.
- \_\_\_\_\_, 2005b, "Posisi Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur". *Majalah EKONOMI*, Vol. XV, No. 3A, Desember 2005:344-370.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co.
- Nasution, Ade P., 2007. *Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam*, download tanggal 13 Desember 2010, hlm. 1-22.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi, 2008, *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat*, The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, hlm. 1-24.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Nuryanti, Sri dkk, 2006, *Analisis Proses dan Hasil: Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia.

- Oates, Wallace E., 1993, "Fiscal Decentralization and Economic Development". *National Tax Journal*, Vol. 46, No. 2, Juni 1993:237-243.
- Parhah, Siti, 2002, *Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Data Cross-Section Tahun 2000*. Yogyakarta.
- Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Murai Kencana PT RadjaGrafindo Persada.
- Priyarsono, DS. dkk., 2010, "Desentralisasi Fiskal, *Tax Effort*, dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol. XI, No. 1, Juli 2010:21-34.
- Priyati, Sri, 2010, "Ilmu Hukum *Vis A Vis* Pancasila: Upaya Mewujudkan *Substantive Justice*", *Jurnal Judiciary*, No. 01, Desember 2010:3-8, download tanggal 28 Juli 2011.
- Prud'Homme, Remy, 1994, *On Dangers of Decentralization*, Washington: The Transport Division, Transportation, Water, and Urban Development Department.
- Rafinus, Bobby Hamzar, 2001, "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Ekonomi Makro", *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi 23 Tahun 2001, Jakarta, hlm.1-15.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rochjadi, Achmad, 2004, *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Inter-Governmental Fiscal Review*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Said, Mas'ud, 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi, 2009, "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Terakreditasi, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1, Juni 2009:103 – 124.

- Sekretariat Daerah, 2008, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013*, Semarang: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Sekretariat Negara, 2004a, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2004b, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006a, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006b, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setyowati, Endang, dkk, 2004, *Ekonomi Makro Pengantar*, Edisi 2, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 2002, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, Makalah Seminar "Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia", Yogyakarta, hlm. 1-24.
- Simanjuntak, Robert A., 2003, "Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan", *Working Paper* No. 3, Jakarta: PEM FE UI, hlm. 1-34.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol, 1991, *Pengantar Ilmu Keuangan*

*Negara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Soesilowati, Endang Sri, dkk, 2005, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lestari, 2010, "Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah", *Majalah EKONOMI*, Vol. XX, No. 1, April 2010:20-34.
- Sriningsih, Siti dan Muadi Yasin, 2009, "Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat", *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 2, Agustus 2009:148-162.
- Subiyanto, Ibnu, 2006, "*Strategi Memimpin Pemda Dalam Era Otonomi Daerah*, Makalah Lokakarya "*Leadership Training*", Tidak dipublikasikan, Bogor: *Building and Reinventing In Decentralization Government (BRIDG)*, Bappenas, dan *United Nation Development Programme (UNDP)*, hlm. 1-6.
- Sudarsono, 1982, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP3ES.
- Suhab, Sultan, 2004, "Kebijaksanaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah", *Analisis*, Vol. 1, No. 2, 2004:106-114.
- Suhendra, Maman and Hidayat Amir, 2006, "Fiscal Decentralization in Indonesia: Current Status and Future Challenges", *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 3, No. 1, September 2006:1-26.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Ed. 2, Jakarta: Prenada Media Group.
- Suminto, 2004, *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*, "Makalah dalam *Budget in Brief*", Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suriasumantri, Jujun S., 1993, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Penerbit Sinar Harapan.
- Suryanto, Joko dkk, 2005, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Teori dan Aplikasi Anggaran*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Susanto, Hari dkk, 2004, *Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Susanti, Ira, 2008, “Analisis Karakteristik Daya Saing Regional: Kasus Kabupaten/ Kota Pulau Jawa Tahun 2003”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2008:17-36.
- Tamtomo, Edi, 2010, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, *Tesis MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, *download* tanggal 18 Agustus 2011.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2006, *Economic Development*, 9<sup>th</sup> Edition, New York: Pearson Addison Wesley.
- Usman, Syaiku, 2001, *Indonesia’s Decentralization Policy: Initials Experience and Emerging Problems*, A Paper Prepared for The Third EUROSEAS Conference Panel on Decentralization and Democratization in Southeast Asia, Jakarta: The SMERU Research Institute, hlm. 1-31.
- Vazques, Jorge Martinez and Robert M. McNab, 1997, *Fiscal Decentralization, Economics Growth, and Democratic Governance*, A Paper Prepared for USAID Conference on Economics Growth, and Democratic Governance, Washington, hlm. 4-20.
- Vazques, Jorge Martinez and Mark Rider, 2006, “Fiscal Decentralization and Economics Growth: A Comparative Study of China and India”, *Indian Journal Economics and Business*, Nopember:1-18.
- Waluyo, Joko, 2007, “*Fiscal Decentralization: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*”, Makalah Pusat Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *download* tanggal 28 Juli 2010, hlm. 1-21.
- Weil, David N., *Economic Growth*, 2<sup>nd</sup> Edition, New York: Pearson Addison Wesley.
- Wibowo, Puji, 2008, ”Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008:55 – 83.
- Widhiyanto, Iman, 2008, “*Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004)*”, *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No.1, Oktober 2008:19 – 53.
- Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[<http://www.depkeu.go.id>]

[<http://www.kppod.go.id>]

[<http://kp2kknjateng.org>]

## LAMPIRAN 2: PETA TEORI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Nama Penulis/Peneliti	Judul Buku/Penelitian	Tujuan Kajian/Penelitian	Metode/Teknik Analisis	Variabel Kajian/Penelitian	Hasil Kajian/Penelitian
1	Mangoesubroto (1994:3-23)	Ekonomi Publik	Menjelaskan tentang ekonomi publik	Deskriptif	Peran pemerintah, eksternalitas, penyediaan barang publik	Menjelaskan tentang 1) mengapa pemerintah harus ikut campur tangan dalam menata perekonomian; 2) mengapa timbul monopoli dan bagaimana konsekuensinya terhadap perekonomian makro; 3) mengapa timbul eksternalitas positif dan negatif; 4) bagaimana terjadinya penyediaan barang publik; dan 5) bagaimana mendistribusikan pajak. Pemerintah mempunyai peran penting dalam 1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; 2) menyelenggarakan peradilan; dan 3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti prasarana jalan dan bendungan. Ekonomi publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusinya terhadap pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik.
2	Musgrave and Musgrave (1989:6).	<i>Public Finance in Theory and Practice</i>	Menjelaskan fungsi pemerintah	Deskriptif	Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian terutama untuk melaksanakan fungsinya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3	Musgrave and Musgrave dalam Soepangat (1991:33-34)	Pengantar Ilmu Keuangan Negara	Menjelaskan fungsi pemerintah dalam kebijakan publik	Deskriptif	Alokasi, distribusi, dan stabilisasi	Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan



						bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.
4	Petty dalam Pressman (2000:8-9)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan peran pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris	Deskriptif	Pengeluaran pemerintah, pajak, dan pertumbuhan ekonomi	Pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak merupakan determinan yang lebih penting untuk kemakmuran ekonomi daripada kebijakan perdagangan atau akumulasi surplus perdagangan yang besar; Sistem pajak di Inggris merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena biaya penarikan pajak sangat tinggi, tidak ada kepastian mengenai pajak yang dibayar penduduk, dan banyaknya ketidakadilan dalam praktik penarikan pajak. Kondisi ini mengurangi dorongan rakyat Inggris untuk bekerja keras dan memperbaiki diri sendiri sehingga bukan tidak mungkin akan mengakibatkan ekonomi stasioner; Pemanfaatan pajak lebih penting daripada pengumpulan pajak karena pajak akan merusak perekonomian hanya jika pendapatan pajak dikeluarkan dari sirkulasi; dan Pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang tidak berguna tidak masalah asal pengeluaran pemerintah tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan pengangguran.
5	Smith dalam Pressman (2000:34-36)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan peran pemerintah dalam kaitannya dengan eksternalitas dan meningkatkan pendapatan melalui sistem pajak untuk membiayai pengeluaran	Deskriptif	Eksternalitas, pendapatan negara, pajak, dan belanja publik	Peran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok tertentu yang dirugikan karena eksternalitas yang berupa berupa pengenaan pajak terhadap pihak yang merugikan pihak lain atau pemberian subsidi kepada pihak yang dirugikan (desentralisasi fiskal); Peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dengan cara terbaik melalui sistem

			(belanja) publik			pajak untuk membiayai pengeluaran (belanja) publik; Empat aturan persyaratan untuk menetapkan pajak untuk publik, yaitu 1) pajak seharusnya proporsional; 2) pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak yang harus dibayarkan; 3) pajak seharusnya ditarik pada waktu dan dengan cara yang paling sesuai bagi pembayar pajak; dan 4) pajak terbaik adalah pajak yang paling sedikit membutuhkan biaya pengumpulannya.
6	Smith dalam <i>The Wealth of Nations</i> (Fuad, 2005: 25)	Dasar-Dasar Keuangan Publik	Menjelaskan fungsi pemerintah	Deskriptif	Pengeluaran konsumsi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan penduduk	Empat fungsi pemerintah, yaitu melindungi kelompok masyarakat dari pelanggaran dan invasi yang dilakukan kelompok masyarakat lainnya; melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan anggota lain dalam masyarakat; membentuk dan memelihara institusi publik agar memberi manfaat yang tinggi dan kesempatan kerja bagi masyarakat; dan mengelola biaya yang diperlukan untuk mendukung peraturan-peraturan.
7	Bentham dalam Pressman (2000:41)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan tentang evaluasi pengeluaran publik	Deskriptif	Pengeluaran publik dan penerimaan	Pengeluaran publik seharusnya dievaluasi dengan membandingkan antara keuntungan dari pengeluaran publik dengan biaya yang dihasilkan oleh pajak. Jika keuntungan dari pengeluaran pemerintah melebihi biaya daripada pajak warganegara maka pengeluaran pemerintah itu harus dilakukan, sebaliknya jika biaya yang timbul dari penarikan pajak tambahan lebih besar daripada pengeluaran publik maka pengeluaran pemerintah itu tidak boleh dilakukan dan pajak tidak dikenakan untuk tujuan tersebut.
8	Wicksell dalam Pressman (2000:125-126)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan ekonomi campuran yang mengandung peran pemerintah yang besar dan pengurangan pajak regresif	Deskriptif	Pengeluaran pemerintah dan pajak	Pengurangan pajak regresif melalui penurunan tarif dan pajak penjualan yang dikenakan kepada kelompok berpendapatan rendah, pengembangan pajak progresif pada pendapatan individu, perusahaan, serta tanah dan warisan, serta menekankan bahwa pajak pendapatan yang diperoleh dengan bekerja seharusnya lebih rendah daripada pajak pendapatan yang diterima tanpa bekerja; Aspek pengeluaran pemerintah yang lebih banyak untuk layanan sosial,

						khususnya pendidikan untuk mengimbangi kesenjangan pendapatan yang muncul ketika pendapatan didistribusikan berdasarkan produktivitas marjinal; dan Mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara luas dengan tujuan setiap anggota masyarakat merasa memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan.
9	Reksohadiprodjo (2001:33)	Ekonomi Publik	Menjelaskan mengapa pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian dengan alasan kegagalan pasar dan rasa keadilan	Deskriptif	Barang publik dan kesejahteraan masyarakat	Adanya beberapa barang publik yang bersifat <i>non-rival</i> dan <i>non-excludable</i> , seperti pertahanan nasional dan penerangan jalan yang membuat tidak mungkin membebankan biaya penyediannya kepada para pengguna.; Produksi atau konsumsi barang/jasa publik mungkin menghasilkan suatu akibat eksternalitas positif atau negatif kepada masyarakat yang tidak tercermin dalam harga barang; Tidak dapat Bergeraknya sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja yang dapat membantu mencegah pencapaian alokasi sumber daya yang efisien; Informasi yang tidak simetris dan tidak sempurna mungkin mengarah pada penilaian yang salah terhadap barang dan jasa publik; dan Permasalahan dari seleksi yang tidak menguntungkan dan bahaya moral ketika pembeli atau penjual bertindak secara eksklusif atas dasar mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kepedulian secara luas terhadap kebutuhan mengatasi kemiskinan secara lebih serius harus menjadi perhatian pemerintah; Data empiris di seluruh dunia secara umum menyarankan bahwa peningkatan keadilan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan lebih cepat, dan kurangnya kemiskinan; Ketidakadilan sering menghasilkan ketidakamanan, kejahatan, dan eksternalitas negatif yang mempengaruhi pertumbuhan dan keadilan sosial, secara nasional dan global; Peranan sektor swasta dan kebutuhan kemitraan dalam kesempatan, pemberdayaan, dan proteksi perlu difasilitasi oleh pemerintah; Penekanan pada aspek keadilan bukan berarti bahwa hanya negara yang harus atau dapat memberikan

						kontribusi menekan kemiskinan; dan Sektor swasta dapat berperan aktif dalam menciptakan kesempatan ekonomi, mempromosikan tambahan kepada anggota masyarakat, dan memberikan kontribusi untuk mengurangi ketidakadilan melalui aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah dan partisipasinya dalam sektor swasta.
10	Suparmoko (2002:15-22)	Ekonomi Publik: Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah	Menjelaskan fungsi pemerintah dan kaitannya dengan kebijakan anggaran	Deskriptif	Alokasi, distribusi, dan stabilisasi	Tujuan kebijakan anggaran adalah meningkatkan layanan pemerintah yang perlu diikuti dengan kenaikan pajak (tujuan alokasi), mendistribusikan pendapatan ke kelompok rendah/tinggi yang perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya (tujuan distribusi), dan menaikkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak (tujuan stabilisasi). Suatu kebijakan publik mungkin tidak dapat memenuhi ketiga tujuan sekaligus, sehingga dimungkinkan adanya pengecualian, namun suatu kebijakan selalu berupaya meminimumkan konflik masing-masing tujuan.
11	Oates (1993: 237-243)	<i>Fiscal Decentralization and Economic Development</i>	Meneliti pengaruh sentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di 58 negara maju dan negara sedang berkembang, meneliti kontribusi pemerintah pusat terhadap pengeluaran belanja publik di 43 negara negara maju dan negara sedang berkembang, dan meneliti kontribusi pemerintah pusat selama 2 dekade sejak tahun 1972-1992	Deskriptif dan analitis regresi	Sentralisasi fiskal dan pendapatan per kapita	Sentralisasi fiskal berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat pendapatan per kapita.. Kontribusi pemerintah pusat terhadap pengeluaran belanja publik di 18 negara industri sebesar 65% sedang di 25 negara sedang berkembang sebesar 89%.
12	Prud'Homme Remy dalam <i>Working Paper: The Transport Division, Transportation, Water, and Urban Development</i>	<i>On Dangers of Decentralization</i>	Menjelaskan dampak negatif pengaruh desentralisasi fiskal di Argentina, Peru, Philippina, Polandia,	Deskriptif dan analitis regresi	Desentralisasi fiskal, efisiensi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi makro	Hasil penelitiannya adalah 1) manfaat implementasi desentralisasi fiskal dalam hal efisiensi tidak jelas nyata seperti yang disarankan dalam teori desentralisasi fiskal karena adanya asumsi yang rapuh dalam teori desentralisasi

	<i>Department</i>		Rusia, dan Venezuela tahun 1990-1992			fiskal; 2) efisiensi produksi dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah manfaat yang meragukan karena adanya <i>carry cost</i> ; 3) implementasi desentralisasi fiskal dalam kebijakan redistribusi apakah <i>interpersonal</i> atau <i>interjurisdictional</i> adalah sesuatu yang lebih sulit; dan 4) implementasi desentralisasi fiskal membuat kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah kabupaten/kota dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (pusat).
13	Bhal (1999) dalam <i>International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute</i>	<i>Implementation Rules for Fiscal Decentralization</i>	Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah di negara-negara transisi dan negara sedang berkembang	Deskriptif	Desentralisasi fiskal	Keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan faktor-faktor yang berupa 12 ketentuan peraturan, yaitu 1) desentralisasi fiskal harus dipandang sebagai sebuah sistem yang komprehensif; 2) desentralisasi fiskal harus diikuti dengan desentralisasi keuangan; 3) pemerintah pusat harus mempunyai kekuatan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal; 4) satu sistem dalam <i>intergovernmental</i> tidak <i>fit</i> untuk sektor perkotaan dan perdesaan; 5) implementasi desentralisasi fiskal menuntut pemerintahan lokal yang kuat dalam hal perpajakan daerah; 6) pemerintah pusat harus mampu menjadi kendali dari desentralisasi fiskal yang disusunnnya; 7) adanya ketentuan dalam desentralisasi fiskal yang sederhana yang <i>simple</i> ; 8) desain dari sistem transfer dalam <i>intergovernmental</i> seharusnya sejalan dengan bentuk desentralisasi fiskal; 9) desentralisasi fiskal seharusnya mempertimbangkan tiga tingkatan dalam pemerintahan; 10) paksaan yang ekstra keras dalam memperhatikan kendala anggaran; 11) tuntutan sistem dalam <i>intergovernmental</i> yang terencana dan transisional; dan 12) harus ada keberhasilan dalam implementasi desentralisasi fiskal.
14	Fuad dkk (2005:246)	Dasar-Dasar Keuangan Publik	Menjelaskan aspek keadilan dalam	Deskriptif	Keadilan horisontal dan keadilan lokal	Dalam desentralisasi fiskal, redistribusi pendapatan memiliki dua dimensi, yaitu keadilan

			desentralisasi fiskal			<p>horizontal dan keadilan lokal. Keadilan horizontal merujuk pada tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi layanan publik. Dua faktor utama yang memberikan kontribusi munculnya ketidakadilan horizontal adalah basis pajak yang sangat berbeda secara signifikan antardaerah dan karakteristik regional yang mengakibatkan perbedaan biaya penyediaan layanan.</p> <p>Kesuksesan dalam kebijakan redistribusi juga memerlukan perhatian yang khusus terhadap keadilan lokal. Dalam merancang kebijakan redistribusi, pemerintah daerah memerlukan dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan redistribusi secara efektif. Program redistribusi pendapatan merupakan pajak bagi penduduk kaya dan sebagai subsidi bagi penduduk miskin.</p>
15	Mulyana dkk (2006:277-285)	Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan ABBD di Indonesia	Menjelaskan hubungan fiskal antarpemerintahan	Deskriptif	Federalisme fiskal dan keuangan federal	<p>Model federalisme fiskal adalah model hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pada beberapa negara yang berbentuk federal, pemerintahan negara bagian (<i>state</i>) bukan merupakan pelaku otonom. Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian tinggi. Dalam perspektif ini, kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah bersifat <i>top down</i> dan berpola dekonsentrasi atau maksimalnya berpola delegasi.</p> <p>Model keuangan federal adalah model hubungan fiskal antarpemerintahan yang lebih tepat diterapkan untuk beberapa negara, terutama negara-negara yang memiliki keanekaragaman dalam aspek geografis dan etnis. Dalam model keuangan federal, batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah secara umum ditetapkan melalui undang-undang. Secara teoritis, negara yang berbentuk federal pada umumnya menganut model keuangan</p>

16	Halder (2007) dalam <i>Andrew Young School of Policy Studies Department of Economics, Internship Program</i> , pp. 1-22.	<i>Measures of Fiscal Decentralization</i>	Menjelaskan kondisi di 61 negara dengan menggunakan data panel dan menggunakan 2 standar pengukuran desentralisasi fiskal, yaitu rasio pengeluaran dan rasio penerimaan yang dihitung dengan rasio baru yang disebut <i>Composit Ratio (CR)</i>	Regresi	Desentralisasi fiskal, <i>Human Development Index (HDI)</i> , <i>life expectancy</i> , GDP, dan angka kematian bayi	federal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara umum mempunyai korelasi positif dengan <i>economic outcome</i> yang menguntungkan.
17	Adolf Wagner dalam Soepangat (199:35 dan 141)	Pengantar Ilmu Keuangan Negara	Menjelaskan fungsi pemerintah dan mengemukakan <i>Law of Ever Increasing State Activity</i>	Deskriptif	Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pendapatan nasional	Fungsi pemerintah adalah memenuhi kebutuhan kolektif dengan cara memproduksi secara kolektif. Fungsi ini untuk mempertahankan hukum dan kekuasaan negara dan memelihara perkembangan kebudayaan dan kemakmuran. Adolf Wagner tidak menyetujui pembatasan pengeluaran pemerintah karena adanya tendensi bahwa tugas pemerintah semakin lama semakin bertambah dengan bertambahnya perkembangan kebudayaan. Peranan pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui pembelian barang dan jasa. Kegiatan pemerintah yang dalam faktanya selalu meningkat akan memberikan peningkatan pula dalam GNP. Dengan demikian, semakin meningkatnya perkembangan kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah dalam porsinya terhadap pendapatan nasional (GNP).
18	Peacock dan Wiseman dalam Soepangat (1991:141)	Pengantar Ilmu Keuangan Negara	Menguji <i>Law of Ever Increasing State Activity</i>	Induktif, ekonometri	Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pendapatan nasional	Peranan sektor publik dalam perhitungan <i>Gross National Product (GNP)</i> atau pendapatan nasional adalah pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui pembelian barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan pemerintah yang dalam faktanya selalu meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan peningkatan pula dalam GNP. Dengan demikian, semakin meningkatnya perkembangan kegiatan pemerintah maka semakin besar pula

						pengeluaran pemerintah dalam persinya terhadap pendapatan nasional (GNP).
19	Peacock dan Wiseman dalam Soepangat (1991:45-50)	Pengantar Ilmu Keuangan Negara	Menjelaskan kelemahan teori Adolf Wagner dan mengemukakan pengeluaran negara yang berbentuk <i>steplike</i>	Deskriptif	Pengeluaran pemerintah	Ketiga kelemahan teori Adolf Wagner adalah 1) mendasarkan pada teori kenegaraan yang sekarang tidak lagi dianut oleh negara-negara Barat; 2) tidak memperhitungkan pengaruh perang terhadap pengeluaran negara, dan 3) selalu menekankan dalam jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran negara tersebut. Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berpola seperti tangga rumah atau <i>steplike</i> yang disebabkan tiga efek yang saling berhubungan, yaitu <i>displacement effect</i> , <i>inspection effect</i> , dan <i>concentration effect</i> .
20	Fuad dkk (2005:224-228)	Dasar-Dasar Keuangan Publik	Menjelaskan faktor penyebab pertumbuhan belanja publik	Deskriptif	Belanja publik	Faktor penyebab pertumbuhan belanja publik perlu membedakan faktor belanja barang dan jasa dan belanja transfer karena mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja barang dan jasa di antaranya pertumbuhan pendapatan per kapita, perubahan teknologi, perubahan populasi, biaya relatif, dan urbanisasi. Faktor yang mempengaruhi belanja transfer di antaranya distribusi pendapatan.
21	Fuad dkk (2005:229)	Dasar-Dasar Keuangan Publik	Menjelaskan klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintah	Deskriptif	Belanja	Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintah adalah 1) belanja jasa publik umum; 2) belanja pertahanan; 3) belanja perlindungan umum; 4) belanja urusan ekonomi; 5) belanja perlindungan lingkungan; 6) belanja perumahan dan <i>public utilities</i> ; 7) belanja kesehatan; 8) belanja rekreasi, budaya, dan agama; 9) belanja pendidikan; dan 10) belanja perlindungan sosial.
22	Mulyana dkk (2006:365-366)	Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan ABBD di Indonesia	Menjelaskan kaitan antara pengeluaran negara dengan penerimaan negara	Deskriptif	Pengeluaran dan penerimaan negara	Jika suatu negara mendesentralisasikan tanggungjawab pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat layanan akan menurun atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan kucuran dana dan atau



						pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, maka mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan makro ekonomi dapat kembali muncul.
23	Mursinto (2005a)  Soepangat (1991:91)	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Suatu Kajian Normatif  Pengantar Ilmu Keuangan Negara	Menjelaskan asas-asas pokok dalam penerimaan perpajakan pemerintah	Deskriptif	Pajak	Asas-asas pokok dalam penerimaan perpajakan pemerintah adalah asas manfaat, kemampuan membayar, politik finansial, ekonomis, keadilan, admisnistrasi, dan yuridis.
24	Halim (2008:4-5)	Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah	Menjelaskan pengertian belanja modal	Deskriptif	Belanja modal	Belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan/ pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25	Halim (2008:4-5)	Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah	Menjelaskan belanja modal dan belanja investasi	Deskriptif	Belanja modal dan belanja investasi	Belanja modal merupakan bentuk investasi yang berupa <i>capital expenditure</i> sebagai belanja/biaya/ pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Sebagai bentuk investasi sektor publik, belanja modal lebih fokus pada kebijakan pemerintahan dengan dimensi waktu yang bervariasi. Begitu juga dengan aspek tujuan dan arah yang tidak hanya terkait dengan aspek ekonomis tetapi menyangkut hal-hal di luar kriteria rasionalitas ekonomis, bahkan dimensi moral pun masuk dalam ranah kebijakan investasi sektor publik. belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

						Belanja investasi terdiri belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal ( <i>capital expenditure</i> ) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode yang akan datang.
26	Halim (2007:113-114)	Pengelolaan Keuangan Daerah	Menjelaskan kategori belanja modal	Deskriptif	Belanja modal	Belanja modal dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan fisik lainnya
27	Sen dalam Pressman (2000:274)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan perbedaan pengertian antara ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan	Deskriptif	Ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan	Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan produksi barang terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut. Ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi pembangunan (perkembangan) adalah ilmu yang mempelajari pengembangan kemampuan manusia.
28	Arsyad (2004:12-13)	Ekonomi Pembangunan	Menjelaskan perbedaan pengertian antara ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan	Deskriptif	Ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan	Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan <i>Gross National Product</i> GDP atau <i>Gross National Product</i> (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan GDP/GNP itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya atau

						kelembagaan dalam aspek perbaikan di bidang organisasi dan perbaikan di bidang regulasi.
29	Todaro dan Stephen C. Smith (2006:9)	<i>Economic Development</i>	Menjelaskan perbedaan pengertian antara ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan	Deskriptif	Ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan	Ekonomi pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa berkaitan dengan efisiensi, alokasi biaya minimum dari keterbatasan sumber daya, dan pertumbuhan optimal dari sumber daya. Pemikiran ini sepaham dengan aliran ekonomi tradisional dan Neo-Klasik. Ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan perubahan lain dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan sosial, politik, dan kelembagaan yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.
30	Arsyad (2004:55-56)	Ekonomi Pembangunan	Menjelaskan teori ekonomi pembangunan Adam Smith	Analitis	Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output, dan pertumbuhan penduduk	Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumberdaya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada. Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian, artinya jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada berperan dalam pertumbuhan output. Pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara optimal. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan pasif dalam proses pertumbuhan output, artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi

						<p>daripada tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup, dan sebaliknya. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah tinggi dan meningkat jika permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum dari sumber alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total dapat secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena pertambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output, sedang pengaruh tak langsung adalah meningkatkan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja di antara tenaga kerja.</p>
31	Sen dalam Pressman (2000:273)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan pengertian kesejahteraan masyarakat	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	<p>Kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya.</p>
32	Suryanto dkk (2005:10)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kajian Teori dan Aplikasi	Menjelaskan pengertian kesejahteraan masyarakat	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	<p>Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu</p>

		Anggaran				memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
33	Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22)	<i>Economic Development</i>	Menjelaskan pengertian kesejahteraan masyarakat	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi 1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, 2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan 3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.
34	Arsyad (2004:32)	Ekonomi Pembangunan	Menjelaskan kelemahan tingkat pendapatan per kapita apabila digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan	Analitis	Pendapatan nasional	Kelemahan pertama meliputi kelemahan metodologis dan statistis dalam penghitungan pendapatan per kapita dengan nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Kelemahan kedua meliputi pengabaian faktor-faktor lain selain tingkat pendapatan, seperti faktor ekonomi, yaitu struktur umur penduduk, distribusi pendapatan timpang, corak pengeluaran masyarakat berbeda, dan faktor non ekonomi, yaitu adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat.
35	Arsyad (2004:32-33)	Ekonomi Pembangunan	Menjelaskan indikator dari Nordhaus dan Tobin tentang <i>Net Economic Welfare</i> (NEW)	Analitis	Pendapatan nasional	Indikator NEW menyempurnakan nilai PDB sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agar diperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah menambahkan pemanfaatan waktu senggang dan perekonomian sektor informal dalam penghitungan PDB. Koreksi negatif adalah mengurangi biaya kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan pembangunan dalam penghitungan PDB.
36	Arsyad (2004:36-37)	Ekonomi Pembangunan	Menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat menggunakan <i>Physical</i>	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	PQLI merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan

			<i>Quality of Life Index (PQLI) atau Basic Need Approach</i>			masyarakat PQLI belum memuaskan, karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat.
37	Todaro dan Stephen C. Smith (2006:59-64)	<i>Economic Development</i>	Amartya Sen, Mahbub ul Haq, dan Gustav Ranis mengembangkan usulan dari <i>United Nations Development Program (UNDP)</i> tentang formula <i>Human Development Index (HDI)</i> atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Analitis	Indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks tingkat kehidupan yang layak	IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak. Dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dengan usia harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan lamanya sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta dimensi standar hidup yang layak yang diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan.
38	Arsyad (2004:38)	Ekonomi Pembangunan	Menjelaskan ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan perhitungan non fisik	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan perhitungan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, ekonomi khususnya tingkat konsumsi per kapita, angka kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa.
39	Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22)	<i>Economic Development</i>	Tujuan pembangunan	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Oleh karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan; 2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan

						perhatian terhadap nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil tetapi juga menumbuhkan harga diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.
40	Todaro dan Stephen C. Smith ( 2006:22-24).	<i>Economic Development</i>	Menjelaskan pengertian <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs).	Analitis	Kesejahteraan masyarakat	<p><i>World Bank</i> pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut.</p> <p>Menurut <i>World Bank</i>, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (<i>decrease in poverty</i>), peningkatan kemampuan baca tulis (<i>increase in literacy</i>), penurunan tingkat kematian bayi (<i>decrease in infant mortality</i>), peningkatan harapan hidup (<i>life expectancy</i>), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (<i>decrease income inequality</i>).</p>
41	Sen dalam Pressman (2000:272)	Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia	Menjelaskan tentang ekonomi kesejahteraan	Deskriptif	Kesejahteraan masyarakat	Ekonomi kesejahteraan tidak hanya mencakup tentang konsumsi tetapi juga pengembangan potensi manusia karena ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang melekat dalam diri manusia dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk manusia daripada berusaha memproduksi lebih banyak barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas atau memahami bagaimana cara masyarakat memaksimalkan kepuasan secara rasional.

						<p>Amartya Sen mengkritik pendapat mengenai ekonomi kesejahteraan yang hanya membahas tentang produksi barang dan jasa dalam rangka perdagangan bebas karena tindakan tersebut mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik. Amartya Sen juga mengkritik pendapat mengenai ekonomi kesejahteraan yang hanya membahas bagaimana cara masyarakat memaksimalkan kepuasan secara rasional seperti yang dijelaskan dalam Pareto Optimum sehingga dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik.</p> <p>Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Kesejahteraan manusia adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai orang dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Hal ini berarti ketika konsumen membeli barang tetapi tidak punya pilihan, kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan dengan memberi lebih banyak pilihan.</p>
42	Vazques dan Robert M. McNab (1997) dalam <i>A Paper Prepared for USAID Conference on Economics Growth, and Democratic Governance</i>	<i>Fiscal Decentralization, Economics Growth, and Democratic Governance</i>	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang demokratis dengan studi kasus di beberapa negara sedang berkembang dan negara transisi di kawasan Baltik, Amerika Tengah, Cina, dan India	Deskriptif	Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola yang demokratis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terjadinya kelemahan pada lembaga, tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan menyebabkan ketidakefisienan pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota atau pemerintahan yang berada pada tingkat yang lebih rendah di daerah.
43	Parhah (2002)	Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Data <i>Cross-Section</i> Tahun 2002	Meneliti kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan: data <i>cross-section</i> tahun 2002	Ekonometri	Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 2) indikator Akai dan Sakata yang digunakan dalam mengukur implementasi desentralisasi fiskal belum mampu menjelaskan implimentasi desentralisasi fiskal di Indonesia.
44	Mursinto (2004)	Pengaruh Derajat	Menganalisis derajat	Analisis diskriminan dan	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian di antaranya menunjukkan bahwa



		Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan serta Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur	desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	analisis korelasi	(PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta Sumbangan dan Total Pendapatan Daerah (TPD)	PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masing-masing antara 3,07% sampai dengan 32,66%, 5,85% sampai dengan 29,92%, dan 45,82% sampai dengan 88,85%. Di samping itu, hasil lain menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) masing-masing antara 3,39% sampai dengan 35,59% dan antara 4,68% sampai dengan 50,84%; kontribusi PAD dan BHPBP terhadap PTD dan PRD masing-masing antara 10,86% sampai dengan 59,96% dan antara 11,59% sampai dengan 67,39%. Kesimpulan penelitian Mursinto menunjukkan bahwa berdasarkan sisi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu melaksanakan otonomi daerah
45	Ismail, Muhammad Zilal Hamzah, dan Jhon Tafbu Ritonga dalam <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang</i> , Vol. 9, No. 2, Desember 2004:109 – 116	<i>Fiscal Decentralization And Economic Growth: Evidence From Selected Muslim Countries</i>	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Islam yang terpilih sebagai sampel penelitian	Ekonometri	Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi penerimaan lebih besar daripada desentralisasi pengeluaran dan indikator produksi-penerimaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Analisis juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai peran di beberapa negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa faktor seperti tingkatan dalam keterbukaan ekonomi dan kredit perbankan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi.
46	Adi (2005) dalam <i>Jurnal Interdisipliner Kritis</i> , Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, Vol. XVII, No.1, 2005: 1-20	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali tahun 1998-2003)	Tipologi Klasen, uji beda t, dan uji F (anova)	Pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan daerah menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua daerah benar-benar siap memasuki desentralisasi fiskal. Data awal dari temuan Adi menunjukkan ada 46% daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya di bawah rata-

						<p>rata. Faktor inilah yang diindikasikan sebagai alasan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang positif antardaerah setelah memasuki era desentralisasi fiskal. Namun demikian, apabila dilakukan analisis secara parsial, perbedaan yang terjadi hanya beberapa daerah saja. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang diindikasikan kurang siap menghadapi desentralisasi fiskal. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang signifikan.</p> <p>Terkait dengan hal tersebut, alokasi belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat. Belanja pembangunan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang mampu memacu peningkatan investasi swasta di daerah. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan PAD relatif terjamin, namun demikian yang paling diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal ini investor (para pemilik modal). Belanja ini hendaknya juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati publik. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata dengan mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi.</p>
47	Suryanto (2005)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi Anggaran	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan kajian teoritis dan aplikasi anggaran dengan pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di wilayah penelitian	Deskriptif	Desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

48	Vazques dan Mark Rider (2006) dalam <i>Indian Journal Economics and Business</i> , Nopember 2006:1-18	<i>Fiscal Decentralization and Economics Growth: A Comparative Study of China and India</i>	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi komparatif di Cina dan India tahun 1980-1999	Deskriptif	Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model desentralisasi fiskal yang diimplementasikan di China dan India ada perbedaan dan kesamaan. Misalnya, dalam hal defisit anggaran, pemerintah lokal di China tidak boleh menjalankan anggaran defisit dan dengan demikian tidak boleh membiayai defisit anggaran dengan pinjaman, sedang pemerintah lokal di India boleh menjalankan anggaran defisit dan diperbolehkan membiayai defisit anggaran dengan pinjaman. Sekalipun Pemerintah China dan India berbeda dalam hal implementasi desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan anggaran tetapi Pemerintah China dan India mempunyai kesamaan dalam hal desentralisasi fiskal yang berkaitan dengan implementasi yang secara simpel dan bertahap tidak seperti negara-negara lainnya yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal secara <i>big-bang</i> dan rumit.
49	Suhendra dan Hidayat Amir (2006) dalam <i>Jurnal Keuangan Publik</i> , Vol. 3, No. 1, September 2006:1-26	<i>Fiscal Decentralization in Indonesia: Current Status and Future Challenges</i>	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada Kabupaten dan Kota se Indonesia tahun 2001-2005)	Deskriptif	Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Beberapa hal yang menjadi temuan penelitian adalah 1) kekuatan dan peranan perpajakan di tingkat lokal kabupaten/kota masih rendah karena pemerintah kabupaten/kota masih bergantung dari pemerintah pusat; 2) penentuan formula dalam Dana Alokasi Umum (DAU) berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, peran DAU menjadi kurang signifikan karena kepentingan politik lebih berperan; 3) tekanan transfer lokal membutuhkan pendekatan keseimbangan agar otonomi daerah menjadi lebih kuat dan menjadi insentif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang akuntabel; dan 4) lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antarpemerintah provinsi, antara pemerintah kabupaten dan kota, antarpemerintah kabupaten, dan antarpemerintah kota.
50	Akai, Yukihiro Nishimura, dan Masayo Sakata (2007) dalam	<i>Fiscal Decentralization and Economic Volatility: Evidence</i>	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap volatilitas	Regresi logaritma	Desentralisasi fiskal dan volatilitas ekonomi	Hasil penelitian mendukung spesifikasi teori fungsi produksi dan ada hubungan negatif yang signifikan antara implementasi desentralisasi

		<i>from State-level Cross-section Data of the United States.</i>	ekonomi di 50 negara bagian Amerika Serikat dengan menggunakan data panel selama tahun 1992-1997			fiskal dengan kelabilan ekonomi. Oleh karena itu, apabila desentralisasi fiskal meningkat maka kelabilan ekonomi akan menurun dan apabila desentralisasi fiskal menurun maka kelabilan ekonomi akan meningkat.
51	Nasution (2007)	Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam tahun 2001-2005	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Variabel kemampuan pemerintah diukur dengan indikator PAD dan belanja modal, variabel perkembangan ekonomi diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan variabel kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat daya beli/pendapatan, dan angka kriminalitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan <i>p-value</i> = 0,00, artinya apabila tingkat kemampuan pemerintah meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; 2) perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,05 dengan <i>p-value</i> = 0,00, artinya apabila perkembangan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat Kota Batam juga meningkat; dan 3) kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan ekonomi dengan hasil analisis PLS menghasilkan koefisien jalur 0,0997 dengan <i>p-value</i> = 0,0001, artinya apabila kemampuan pemerintah meningkat maka perkembangan ekonomi Kota Batam juga meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam ditunjukkan dengan peningkatan pada Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Tingkat Daya Beli/Pendapatan, dan penurunan pada Angka Kriminalitas.
52	Widhiyanto (2008) dalam <i>Jurnal Keuangan Publik</i> , Vol. 5, No.1, Oktober 2008:19 – 53	<i>Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity</i> selama tahun 1994-2004	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan disparitas pendapatan regional Indonesia selama tahun 1994-2004 dan meneliti perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan	Regresi	Desentralisasi fiskal, pertumbuhan PDRB per kapita, kepadatan penduduk per km <sup>2</sup> , <i>human development index</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia selain mampu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi juga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan regional per kapita (PDRB per kapita). Hasil penelitian Widhiyanto ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan di negara sedang berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan

			dan disparitas pendapatan regional Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah			ekonomi tetapi tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan regional per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita atau PDRB per kapita).
53	Wibowo (2008) dalam <i>Jurnal Keuangan Publik</i> , Vol. 5, No. 1, Oktober 2008:55 – 83	Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia selama tahun 1999-2004 dan meneliti perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah	Regresi	Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Simpulan ini sekaligus memperkuat teori desentralisasi fiskal dan hasil penelitian Akai dan Sakata (2007). Hasil penelitian Wibowo (2008) juga menunjukkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskal sebelumnya; 3) diperlukan analisis yang lebih cermat untuk mengamati hubungan antara otonomi fiskal yang diperlihatkan dengan indikator PAD sebagai proksi dengan performa pembangunan daerah yang diukur dengan PDRB. Hal ini karena penelitian ini memperlihatkan bahwa sebelum tahun 2001, hubungan antara kedua variabel tersebut adalah negatif, sehingga bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu. Kendati demikian, otonomi fiskal cenderung membaik pada era sesudah tahun 2001 yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah seiring dengan penerapan otonomi fiskal; dan 4) sekurang-kurangnya terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang <i>favourable</i> sebelum periode reformasi fiskal, yakni i) kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah dan ii) monitoring pemerintah pusat atas penerapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.
54	Sasana (2009) dalam <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan</i> , Vol. 10,	Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi,	<i>Path analysis</i>	Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap laju

	No.1, Juni 2009:103 – 124	Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah	tenaga kerja terserap, jumlah penduduk miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data populasi, di mana populasi, yaitu seluruh daerah kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk <i>time series</i> dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data <i>cross section</i> yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan <i>pooled the data</i> yaitu gabungan antara data <i>time series</i> (tahun 2001-2005: 5 tahun) dengan data <i>cross section</i> 35 kabupaten/kota		jumlah penduduk miskin, dan kesejahteraan masyarakat	pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; 2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 4) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; 5) tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah; dan 6) jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
55	Priyarsono dkk (2010) dalam <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia</i> , Vol. XI, No. 1, Juli 2010: 21-34	Desentralisasi Fiskal, <i>Tax Effort</i> , dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Kabupaten/Kota di Indonesia 2001-2008	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal dan <i>tax effort</i> terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia 2001-2008. Penelitian menggunakan model analisis regresi dengan <i>pooled data</i> gabungan antara <i>time series</i> dan <i>cross section</i>	Regresi	Desentralisasi fiskal, <i>tax effort</i> , dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kinerja keuangan daerah di Indonesia masih rendah, baik ditinjau dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran; 2) alokasi belanja rutin masih mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan; 3) sumber pembiayaan utama belanja daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sehingga kemandirian daerah belum optimal; 4) dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan <i>tax effort</i> ; 5) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada komponen dana perimbangan lainnya dalam

						mempengaruhi peningkatan <i>tax effort</i> ; dan 6) PAD dan dana perimbangan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
56	Badrudin (2011) dalam Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol. 22, No. 1, April 2011:39-66	Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2001-2008	Meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2001-2008. Penelitian menggunakan model analisis regresi dengan <i>polled data</i> gabungan antara <i>time series</i> dan <i>cross section</i>	Regresi	Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) belanja modal tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Prud'Homme Remy (1994), Adi (2005), Suryanto (2005), serta Suhendra dan Hidayat Amir (2006); 2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Sasana (2009); dan 3) belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan ini mendukung penelitian Sasana (2009).
57	Badrudin (2011)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	<i>Partial Least Square</i>	Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh non signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, belanja modal pada APBD kabupaten/kota berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.